



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 248-17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 66-14-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 07-08-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 89-16-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 185-18-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 176-04-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DPR, DPRD,
DAN DPD 2019 PROVINSI ACEH**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN (MENDENGAR JAWABAN
TERMOHON, KETERANGAN PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN
BAWASLU, DAN PENGESAHAN ALAT BUKTI)**

J A K A R T A

SENIN, 15 JULI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 248-17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 66-14-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 07-08-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 89-16-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 185-18-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 176-04-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR, DPRD, dan DPD 2019 Provinsi Aceh

PEMOHON

1. Partai Daerah Aceh
(Perkara Nomor 248-17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
2. Partai Demokrat
(Perkara Nomor 66-14-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
3. Partai Keadilan Sejahtera
(Perkara Nomor 07-08-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
4. Partai Aceh
(Perkara Nomor 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
5. Partai SIRA, Said Mustajab
(Perkara Nomor 89-16-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
6. Partai Nanggroe Aceh
(Perkara Nomor 185-18-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
7. Partai Persatuan Pembangunan
(Perkara Nomor 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
8. Partai Golongan Karya dan Teuku Juliansyah
(Perkara Nomor 176-04-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
9. Partai Bulan Bintang
(Perkara Nomor 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
10. Partai Nasional Demokrat
(Perkara Nomor 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

TERMOHON

KPU RI

ACARA

Pemeriksaan Persidangan (Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, dan Pengesahan Alat Bukti)

Senin, 15 Juli 2019, Pukul 14.45 – 21.11 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Nallom Kurniawan
Riani Anggraini
Alia Harumdani W.
R. A. Shella Hendrasmara

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 248-17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Zulfiansyah
2. Muharramsyah

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 66-14-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Dimaz Elroy
2. Lidya Agatha Rafli

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 07-08-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Kasibun Daulay
2. Khairul Anwar Hasibuan

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Fadjri
2. Hermanto
3. Ridwan Hadi
4. Iskandar

E. Pemohon Perkara Nomor 89-16-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Said Mustajab

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 89-16-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Mukhlis

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 185-18-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Muhammad Reza Maulana

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Muhammad Ardi
2. M. Natsir

3. Tantri Maulana

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 176-04-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Beni Arbi Batu-Bara
2. Raja Inal Manurung

J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Edi Wirahadi
2. R. Asmoro Wening

K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Qodirun
2. Jalaluddin
3. Syahrul Rizal

L. Termohon:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1. Ilham Saputra | (KPU RI) |
| 2. Kharisma Umar Fadhillah | (KPU RI) |
| 3. Tharmizi | (KPU Prov. Aceh) |
| 4. Munawarsyah | (KPU Prov. Aceh) |

M. Kuasa Hukum Termohon:

1. Subagio Aridarmo
2. Absar Kartabrata
3. Imam Hadi Wibowo
4. Taufik H.
5. Ulin Nuha
6. Zahru Arqom
7. Fajar Maulana Yusuf
8. Arif Effendi
9. Tito Prayogi

N. Badan Pengawas Pemilu:

1. Nyak Arief Fadilahsyah
2. Marini
3. Naidi Faisal

O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 248-17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Zulkifli
2. Judianto

P. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 66-14-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Heru Andeska
2. Partogi Manurung

Q. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 07-08-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Imran Mahfudi
2. Wayan Sudirta
3. Ridwan Darmawan

R. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Syahroni

S. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 185-18-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Muharramsyah
2. Zulfiansyah

T. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Imran Mahfudi
2. Irfan Maulana
3. Boihaqi

U. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Sayuti Abubakar
2. Niko Kresna Aria Putra
3. Boihaqi
4. Pangihutan B. Halolo

V. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Sayuti Abubakar
2. Boihaqi
3. Kamaruddin
4. Ade Yan Yan

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.45 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu.

Ya, sidang siang ini giliran untuk Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu yang akan memberikan jawaban atau keterangan. Tapi, saya mau absen dulu. Untuk Perkara Nomor 248-17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Daerah Aceh, hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 248-17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULFIANSYAH (PARTAI DAERAH ACEH)

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Cukup, ya. Berarti hadir, ya. Dari Pemohon? Nomor 66-14-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Demokrat, hadir?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66-14-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIMAZ ELROY (DEMOKRAT)

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Perkara Nomor 07-08-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari PKS?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07-08-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KASIBUN DAULAY (PKS)

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Perkara Nomor 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Aceh?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FADJRI (PARTAI ACEH)

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

ya. Perkara 89-16-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Termohon, ini Perseorangan Pak Said Mustajab, S.Sos.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89-16-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUKLIS (PARTAI SIRA, SAID MUSTAJAB)

Hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Perkara Nomor 185-18-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Nanggroe Aceh?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 185-18-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD REZA MAULANA (PARTAI NANGROE ACEH)

Hadir, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Perkara Nomor 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Persatuan Pembangunan?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANTRI MAULANA (PPP)

Hadir, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Kemudian Perkara 176-04-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Pemohon, Partai Golkar?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 176-04-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BENI ARBI BATUBARA (GOLKAR)

Hadir, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Wuih. Dan perseorangan, Pak Teuku Juliansah, hadir?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 176-04-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BENI ARBI BATUBARA (GOLKAR)

Hadir, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Nomor 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Bulan Bintang?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: R. ASMORO WENING (PBB)

Hadir, Yang Mulia.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Nomor 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Nasdem, hadir?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: QODIRUN (NASDEM)

Hadir, Yang Mulia.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari Termohon, hadir?

24. KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Hadir, Yang Mulia.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

26. KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Termasuk Prinsipal dari KPU RI dan KIP Aceh. Terima kasih.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih.
Kemudian, Bawaslu. Hadir, ya?

28. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Hadir, Yang Mulia.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.
Ya, sekarang Pihak Terkait. Untuk Perkara Nomor 248-17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Pihak Terkait Nanggroe ... Partai Nanggroe Aceh?

30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248-17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JUDIANTO

Hadir, Yang Mulia.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Pihak Terkait Perkara Nomor 66-14-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Golkar?

32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 66/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERU ANDESKA

Hadir, Yang Mulia.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Kemudian Partai Demokrat? Enggak ada, ya? Untuk Pihak Terkait Perkara Nomor 66-14-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? tidak hadir, ya, tidak ada. Baik, Pihak Terkait untuk Perkara 07-08-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, PDIP?

34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 07-08-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WAYAN SUDIRTA

Ya. Hadir, Yang Mulia.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, PDIP?

36. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WAYAN SUDIRTA

Hadir, Yang Mulia.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Perkara Nomor 89-16-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Pihak Terkait nya tidak ada, ya. Kemudian, Pihak Terkait untuk nomor 185-18-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Daerah Aceh?

38. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 185-18-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHARRAMSYAH (PARTAI DAERAH ACEH)

Hadir, Yang Mulia.

39. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Lalu Perkara Nomor 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Pihak Terkaitnya ada 3, PDIP?

40. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: (PDIP)

Ya, hadir, Yang Mulia.

41. KETUA: ANWAR USMAN

Partai Nanggroe Aceh?

42. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAYUTI ABUBAKAR (PNA)

Hadir, Yang Mulia.

43. KETUA: ANWAR USMAN

PBB?

44. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRFAN MAULANA (PBB)

Hadir, Yang Mulia.

45. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari Perkara 176-04-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Pihak Terkaitnya tidak ada. Kemudian, Perkara Nomor 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Pihak Terkaitnya ada 2. Partai Aceh?

46. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NIKO KRESNA ARIA PUTRA (PARTAI ACEH)

Hadir, Yang Mulia.

47. KETUA: ANWAR USMAN

Partai Demokrat?

48. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOLO (PARTAI DEMOKRAT)

Hadir, Yang Mulia.

49. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Perkara Nomor 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Pihak Terkaitnya ada 5 ini, ya. Partai Aceh?

- 50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAYUTI ABUBAKAR (PARTAI ACEH)**

Hadir, Yang Mulia.

- 51. KETUA: ANWAR USMAN**

Partai Nangroe Aceh?

- 52. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAYUTI ABUBAKAR (NANGROE ACEH)**

Hadir, Yang Mulia.

- 53. KETUA: ANWAR USMAN**

PKB?

- 54. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN (PKB)**

Hadir, Yang Mulia.

- 55. KETUA: ANWAR USMAN**

Partai Golkar?

- 56. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN (GOLKAR)**

Hadir, Yang Mulia.

- 57. KETUA: ANWAR USMAN**

Partai Kebangkitan Bangsa?

- 58. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN (PKB)**

Hadir, Yang Mulia.

59. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kita langsung ke (...)

60. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAHRONI

Mohon izin, Yang Mulia.

61. KETUA: ANWAR USMAN

Ya?

62. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : SYAHRONI

Pihak Terkait dari Partai Gerindra Nomor 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

63. KETUA: ANWAR USMAN

Mana? Oh, ya. Nomor perkara?

64. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAHRONI

46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

65. KETUA: ANWAR USMAN

46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, kok enggak ada. Sudah mengajukan permohonan, ya?

66. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAHRONI

Sudah, Majelis.

67. KETUA: ANWAR USMAN

Siapa biasanya? Sudah? Tapi, belum diketik, ya? Gerindra.
Ya, baik. Jadi, untuk Pihak Terkait Gerindra ini Ridwan Hadi, ya?
Mana tadi? Enggak, Pihak Terkait, sana.

68. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAHRONI

Pihak Terkait dari Partai Gerindra, Syahroni.

69. KETUA: ANWAR USMAN

Syahroni?

70. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAHRONI

Perkara Nomor 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

71. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ya, ya. Ya, nama Pemohonnya Syahroni, gitu ya? Apa (...)

72. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAHRONI

Kuasa Hukumnya Syahroni.

73. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, Kuasa Hukumnya. Ya, ya, baik.
Ya, baiklah. Ya, ada, ada, ya.

74. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAHRONI

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

75. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sudah terdaftar di sini.
Baik. Ya.

76. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

Ini anu, ya ... sama dengan yang tadi kita pakai tata cara begini. Ini tidak apa ... tidak melanggar Hukum Acara, jadi kita selesaikan dulu sekarang misalnya untuk Perkara 248-17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, saya minta Termohon untuk menyampaikan jawabannya, kemudian

langsung habis itu Partai Nanggroe Aceh saya minta buat keterangannya bagaimana. Dan kalau ada dari Bawaslu, langsung. Begitu itu selesai, kita menginjak ke berikutnya. Jadi tidak jawaban Termohon, Termohon, Termohon sampai selesai ke bawah kemudian Pihak Terkait begitu, enggak. Tapi kita selesaikan per perkara, ya.

Baik, dan juga akan saya ... agak saya pandu supaya lebih fokus dan lebih cepat untuk kita selesaikan. Didasarkan pada hal-hal yang penting yang didalilkan oleh Pemohon pada waktu menyampaikan permohonannya. Baik, kita mulai. Sekarang ke yang pertama adalah Partai Daerah Aceh.

77. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Terima kasih, Assalamualaikum wr. wb. Menunjuk kepada permohonan Termohon pada perkara a quo. Termohon menyampaikan jawaban sebagai berikut.

Ada 3 bagian dalam eksepsi pokok permohonan dan petitum. Dalam eksepsi (...)

78. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sekarang (...)

79. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya, dan eksepsi sifatnya normatif (...)

80. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Eksepsi dulu.

81. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya. Karena ini sifatnya berkaitan dengan sengketa penghitungan hasil, maka menjadi kewenangan Bawaslulah sebelum diajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, sebagaimana hal itu merupakan exertion of remedies, jadi hal yang sudah dilakukan terlebih dahulu.

82. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kenapa kok, bisa mengatakan gitu? Ini hal yang berhubungan dengan permohonan apa? Kok bisa dikatakan bahwa ini tidak bisa ke MK tapi sebetulnya harus ke Bawaslu dulu?

83. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya, menunjuk kepada Pasal 461 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemilu. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan selanjutnya memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif pemilu (...)

84. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke, jadi yang dipersengketakan ini, sebentar ... di ini ... di dapil mana dulu?

85. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Dapilnya ada dua. Dapil Aceh Timur VI dan Dapil Aceh Timur II.

86. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dapil Aceh Timur ... berapa yang pertama?

87. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Dua.

88. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dua.

89. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Eh, VI yang pertama, maaf, VI.

90. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

VI. Dan?

91. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Dan Dapil Aceh Timur II.

92. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang II. Oke.

Nah, yang dipersoalkan di Dapil Aceh Timur apa? Kok bisa dikatakan itu bukan kewenangan Mahkamah? Karena ini sebetulnya adalah persoalan administrasi.

93. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya. Kami ... kami menganggapnya itu ... seperti itu karena berkaitan (...)

94. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke, karena soal administrasi, ya, persoalan (...)

95. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Berkaitan dengan pengurangan dan penambahan suara.

96. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

97. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Sengketanya. Antara Partai Daerah Aceh dengan Partai Nanggroe Aceh. Jadi terkaitnya itu.

98. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

99. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Baik.

100. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terus. Eksepsi yang kedua?

101. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Berkaitan Obscure Libel. Kalau ini menurut hemat kami antara materi dalam posita dan petitum itu (...)

102. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tidak konsisten?

103. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya, tidak konsisten. Karena (...)

104. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

105. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ujung (...)

106. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

107. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya, ya, itu saja pendeknya. Nanti bisa dipertegas lagi.

108. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

109. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Kemudian biar cepat lanjutnya dalam pokok perkara.

110. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dalam pokok perkara.

111. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Pada pokok permohonan dalam halaman 5 ada persandingan. Kami mengadilkan persandingan perolehan suara partai politik (...)

112. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Halaman 5 dijawabannya?

113. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya. Ini (...)

114. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Persandingan apa yang disandingkan?

115. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Dapil Aceh VI Timur, Dapil Aceh Timur VI, persandingan Form Model C1-DPRA yang dimiliki Pemohon dengan Form Model DAA1-DPRA menurut Termohon di Kecamatan Peureulak Partai Nangre ... Partai Nangre ... Nanggroe Aceh (...)

116. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kecamatan Peureulak.

117. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Peureulak, ya. Jadi (...)

118. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

119. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Di situ ada ... di Kecamatan Peureulak itu ada Desa Bandrong, Desa Blang Balok, Desa Cot Muda Itam.

120. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Berapa desa itu?

121. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ada (...)

122. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang dipersoalkan. Ini yang dibandingkan antara Formulir C-1 apa ... C-1 apa? C-1 yang berhologram, punya Anda?

123. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya.

124. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dengan yang kepunyaan Pemohon apa? Yang di buktinya dia?

125. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Kok, ini C-1 Pemohon itu kan yang salinan, itu.

126. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pemohon C-1 salinan, ya?

127. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya.

128. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pemohon mengajukan C-1 yang belum tentu di ... apa ... di ... apa ... bisa dibuktikan kebenaran atau keasliannya?

129. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya.

130. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dibandingkan dengan C-1 berhologram yang Anda punya, ya?

131. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya, betul.

132. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Atas dasar persandingan itu, gimana?

133. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya, di sini kemudian ada perbedaan 5 suara.

134. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Bedanya 5 suara?

135. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Jadi, di halaman 7 itu ada jumlah kalau menurut Pemohon itu 1.240, kalau menurut DAA-1 Termohon kemudian 1.235.

136. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

1.235?

137. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

1.235.

138. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu menurut C-1 hologramnya? Benar? Diulangi!

139. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Halaman 7?

140. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, halaman 7 ada beda antara (...)

141. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Kalau di sini (...)

142. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ha, gimana?

143. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya, di sini kami persandingkan dengan DAA-1 Termohon.

144. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

145. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Kalau dari hasil DAA-1 Termohon itu jumlahnya 1.235.

146. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

147. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Versinya Pemohon yang mendalilkan dengan C-1 salinan, itu 1.240. Jadi ada 5.

148. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

1.240?

149. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya.

150. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, ada selisih 5 suara?

151. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya.

152. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terus?

153. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Kemudian, persandingan lagi.

154. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya?

155. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

DAA1-DPRA dan DA1-DPRA Kecamatan Peureulak yang benar menurut Termohon untuk Partai Nanggroe Aceh atas nama Ruslan Razali, M.Ed. adalah sebagai berikut. Karena ini berkaitan dengan (...)

156. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ada tabelnya?

157. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ada, halaman 8.

158. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dianggap dibacakan, ya, tabelnya. Itu di bukti berapa yang Anda sampaikan?

159. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

T-002.

160. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

T-002? Oke. Ini disandingkan dengan buktinya Pemohon yang ada punya Pemohon, kan?

161. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya.

162. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terus?

163. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Kemudian persandingan lagi, tabel 3. C1-DPRA menurut Pemohon dengan DA1-DPRA menurut Termohon, kecamatan yang sama untuk atas nama Ruslan Razali, M. Ed.

164. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

165. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Calon anggota dewan.

166. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Buktinya? T?

167. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Itu Kecamatan Peureulak itu di situ TPS ... ada TPS, C1-DPRA Pemohon dan DA1-DPRA Termohon, ada selisih 192.

168. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

192 suara suara.

169. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Jadi, dari Desa Bandrong sampai dengan 25, itu, Paya Meuligo.

170. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya? Itu di bukti Anda, berapa itu?

171. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Sama, itu masih di T-002 karena kumpulan.

172. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Masih di T-002, masih?

173. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Masih, itu kumpulan dari (...)

174. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

175. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

4. Perbandingan DA1-DPRA menurut Pemohon dan Termohon di Kecamatan Peureulak. Perolehan suara Partai Nanggroe Aceh atas nama Ruslan Razali. Jadi, mirip dengan di atas. Nah, kalau versi dari Pemohon dan Termohon, itu, maka ada selisih 928. Jadi, dari tadi kelurahan ... desanya (...)

176. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang, kita ... anu ... aja ... kalau ... anu ... kita total saja, perbedaan antara data Anda dengan datanya Pemohon, itu berapa totalnya?

177. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Oke, baik. Jadi gini (...)

178. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang tadi disebutkan ada berapa kecamatan? Kecamatan Peureulak ada berapa desa tadi?

179. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

25 desa.

180. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

25 desa. Ini yang dipersoalkan kan Kecamatan Peureulak saja?

181. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya, Peureulak saja.

182. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Totalnya perbedaannya menurut Termohon berapa? Untuk Pemohon berapa?

183. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Kalau menurut Termohon yang benar, ya, perolehan untuk Partai Daerah Aceh, ya, untuk Dapil Aceh Timur VI tadi.

184. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

185. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Kalau Termohon ... dari data Termohon ada 13.814, sedangkan di permohonan tidak disebutkan.

186. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ulang, jangan terlalu cepat. Saya ikut mengikuti, meskipun sudah ada di rekaman tapi saya juga ... anu ... 13.000 atau berapa?

187. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Di Kabupaten Aceh Timur itu, Partai Daerah Aceh memperoleh suara menurut Termohon sesuai bukti T-002 tadi adalah 13.814 suara. Sedangkan (...)

188. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

13.814 suara. Sedangkan yang Pemohon?

189. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Kalau Pemohon karena tidak rinci disebutkan di dalam permohonan, kami belum bisa memastikan.

190. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tidak diketahui, ya?

191. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Tidak mengklaim untuk yang jumlah betul (...)

192. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jumlah yang betul berapa.

193. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Kalau ini rekap ... kemudian untuk Partai Nanggroe Aceh.

194. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

195. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Kabupaten yang sama, perolehannya adalah menurut Pemohon dalam permohonannya tidak disebutkan.

196. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

197. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Kalau data Termohon adalah 13.788.

198. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

13.788?

199. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

13.788 suara.

200. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

13.788. Ini yang untuk kecamatan?

201. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Perola tadi.

202. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Perola? Ini yang 13.814, itu apa?

203. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Oh, maaf. Itu kabupat ... untuk seluruh Kabupaten Aceh Timur, maaf.

204. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ha.

205. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Kalau Partai ... tadi sama yang disebutkan, Partai Nanggroe Aceh tadi untuk Kabupaten Aceh Timur 13.788.

206. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ah, oke. Oke.

Ini selesai berarti, ya, yang Aceh Timur VI? Yang Aceh Timur II?
Untuk eksepsinya sama, toh?

207. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya, ya, sama.

208. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Eksepsinya sama.

209. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Untuk Dapil Aceh Timur II, perolehan suara di tingkat desa dan kecamatan yang tertuang di Formulir DAA1-DPRK dan DA1-DPRK Dapil Aceh Timur II.

210. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

He em?

211. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Di 4 Desa dalam Kecamatan Peureulak Barat, kalau tadi Peureulak, ini Peureulak Barat.

212. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Peureulak Barat.

213. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Dan menurut Termohon adalah sebagai berikut.

214. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

215. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Pada tabel. Peureulak Barat itu ada desa ... 4 desa. Karena tadi disebutkan (...)

216. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tabel berapa itu, tabelnya?

217. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Tabel 1 (...)

218. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Halaman berapa?

219. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Halaman 13.

220. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

13?

221. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya. di situ ada jumlah TPS (...)

222. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, betul.

223. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Kemudian, perolehan suara dan sebagainya.

224. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. he eh, terus?

225. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Nah, selisihnya adalah nol. Jadi tidak ada selisih kalau di Peureulak Barat.

226. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. he eh. Terus?

227. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang menyatakan hasil rekapitulasi yang tertuang dalam DB1-DPRK Dapil II Aceh Timur, terdapat perbedaan dengan Keputusan KIP Aceh Timur Nomor 58 dan sebagainya itu adalah tidak benar.

228. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tidak benar?

229. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Kemudian, dalil Pemohon (...)

230. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Karena sudah sesuai toh berarti?

231. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Oh, ya, ya. Sudah sesuai.

232. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. ya, terus ada lagi?

233. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Kemudian, dalil Pemohon mengenai adanya penambahan suara untuk Partai Aceh dan ditemukannya adanya Model DA1-DPRK lain yang telah diubah oleh Termohon. Selain Model DA1-DPRK hasil pleno dan menambah 300 suara ke salah satu Caleg Partai Aceh, atas nama Nasrian ... Nasrianti di 17 TPS pada 4 desa Kecamatan Peureulak Barat tadi adalah juga tidak benar.

234. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

He em, ya. Terus, ada lagi?

235. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Kemudian dalil Pemohon yang menyatakan tindakan Termohon menambahkan sejumlah 300 suara untuk Partai Aceh. Sehingga, berubah total perolehan suara DPRK Dapil Aceh II Timur untuk Partai

Aceh. Dari total 23.420 suara menjadi 23.720 suara. Yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon karena hilangnya alokasi kursi kesebelas untuk Pemohon adalah tidak benar. Hal ini sesuai dengan perolehan suara partai politik dan perolehan kursi DPRK Dapil Aceh Timur II sebagai berikut. Jadi, ada tabel lagi halaman 14 (...)

236. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang benar adalah seperti yang ditentukan oleh atau diputuskan oleh Termohon, ya?

237. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya. Jadi, ya. Partai Aceh suaranya 23.720 mendapatkan 5 kursi sampai dengan yang 7, Partai (...)

238. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Kita enggak bicara sampai kursi, tapi suara saja.

239. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya.

240. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terus yang benar ini 23.720?

241. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya.

242. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, oke.

243. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Berikutnya, permohonan, Majelis, seperti pada umumnya, menerima eksepsi Termohon (...)

244. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Itu dianggap telah dibacakan petitumnya.

245. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya, terima kasih.

246. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Petitum dalam eksepsi maupun Petitum dalam pokok permohonan, ya? Sudah?

247. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Sudah.

248. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ada tambahan?

249. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Sementara cukup.

250. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Cukup, ya?

251. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya.

252. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sekarang Pihak Terkait! Pihak Terkait Partai Nanggroe Aceh, silakan!

253. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248-17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULKIFLI

Assalamualaikum wr. wb.

254. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb. Sama dengan yang ... apa ... dikemukakan Termohon, sama?

255. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248-17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULKIFLI

Majelis, ada beberapa perbedaan. Yang pertama, ingin kami sampaikan itu dalam eksepsinya berdasarkan Pasal 473 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7. Kemudian, Pasal 74 Ayat (2) huruf c Undang-Undang MK (...)

256. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

He eh?

257. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248-17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULKIFLI

Selanjutnya, berdasarkan PMK ... Pasal 5 PMK 2 Tahun 2018.

258. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Apa substansinya?

259. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248-17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULKIFLI

Substansinya adalah penetapan atau hasil rekapitulasi yang memengaruhi peroleh kursi. Sedangkan, apabila dihubungkan dengan keputusan KPU secara nasional, Pemohon memiliki atau ada kursi ditetapkan di DPRA. Artinya, secara hukum permohonan ini tidak dapat diterima, Majelis.

260. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Karena dia juga mempersoalkan kursi?

261. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248-17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULKIFLI

Ya.

262. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tapikan sebetulnya dia juga sebelum mempersoalkan kursi, mempersoalkan perolehan suara dulu?

263. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248-17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULKIFLI

Ya, Majelis. Karena di sini ditetapkan adalah hanya dapat diajukan terhadap penetapan KPU yang memengaruhi perolehan kursi. Sedangkan putusan KPU tersebut, mereka mendapatkan kursi, Majelis.

264. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Ini menurut Pemohon ... eh, menurut Pihak Terkait begitu, ya?

265. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248-17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULKIFLI

Ya, Majelis.

266. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu. Terus yang di pokok permohonan masih ada eksepsi lain?

267. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248-17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULKIFLI

Cukup, Majelis. Kami langsung masuk pada (...)

268. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pokok permohonannya (...)

269. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248-17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULKIFLI

Pokok permohonan. Yang pertama, kami menganggap Pemohon adanya kebohongan hukum di dalam dalil Pemohon. Artinya begini Majelis (...)

270. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ada apa?

271. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248-17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULKIFLI

Kebohongan hukum (...)

272. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, ya.

273. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248-17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULKIFLI

Yang didalilkan oleh Pemohon (...)

274. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

275. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248-17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULKIFLI

Kenapa saya katakan demikian, atau kami katakan demikian? Karena Pemohon mendalilkan bahwa KIP Aceh Timur belum melaksanakan Putusan Panwaslih Aceh Timur Nomor 8 dan seterusnya, Majelis. Sedangkan KIP Aceh Timur telah melaksanakan putusan tersebut. Dengan cara berkoordinasi dengan Panwaslih Aceh Timur (...)

276. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

277. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248-17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULKIFLI

Kemudian berkoordinasi dengan PPK, sudah dilakukan rekapitulasi ulang (...)

278. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi rekom sudah dilaksanakan?

279. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248-17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULKIFLI

Ya, Majelis.

280. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Rekomnya itu apa? Untuk melakukan apa?

281. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248-17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULKIFLI

Untuk melakukan rekapitulasi, Majelis. Rekapitulasi ulang terhadap perolehan suara di Kecamatan Peureulak, Majelis.

282. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Rekap ulang di Peureulak? Tapi rekomendasi itu hasilnya sama atau berbeda dengan yang awal?

283. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248-17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULKIFLI

Hasilnya sama, Majelis.

284. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sama. Ya, ini kan enggak bohong. Dia kan ingin berusaha. Begitu, kan?

285. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248-17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULKIFLI

Saya lanjut, Majelis. Kemudian ada ... apa namanya ... sesuai dengan berita yang diterbitkan oleh Harian Serambi Indonesia, yaitu Saksi Pelapor atas nama Teuku Ridwan M. Dahlan, sudah mengakui bahwa Putusan Panwaslih Aceh Timur sudah di eksekusi.

286. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

287. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248-17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULKIFLI

Artinya, semua dalil yang disampaikan dalam permohonan Pemohon tersebut tidaklah benar menurut kami Pihak Terkait.

288. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nanti kita ... anu ... cek ke Bawaslu nanti, ya. Ya, ini ... jadi menurut Saudara rekomendasi yang dilakukan oleh Bawaslu di Peureulak sudah dilakukan atau sudah dilaksanakan dengan melakukan rekapitulasi ulang?

289. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248-17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULKIFLI

Sudah, Majelis.

290. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Hasilnya tetap sama?

291. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248-17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULKIFLI

Tetap sama, Majelis.

292. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Ya. Terus ada lagi, enggak?

293. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248-17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULKIFLI

Kemudian selanjutnya menurut Pihak Terkait, adanya manipulasi angka atau selisih perolehan suara. Kenapa kami katakan demikian? Artinya, menurut Pemohon, berdasarkan permohonannya itu, menjelaskan bahwa ada penggelembungan suara sebanyak 736 suara terhadap Caleg Ruslan Razali.

294. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

295. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248-17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULKIFLI

Nah, mereka baru menghitung itu di sekitaran 25 TPS, 77 desa. Artinya di Kecamatan Peureulak itu ada 38 desa dan 128 TPS. Ada 13 Desa dan 51 TPS yang belum dihitung. Nah, kalau menurut Pihak Terkait, bila dihitung yang dari 13 desa, 51 TPS, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya, yaitu jumlah suara Ruslan Razali itu 1.240 ditambah 180 yang belum dihitung oleh Pemohon, sehingga suara Ruslan Razali sebenarnya 2.050. Artinya bukan bertambah, malah berkurang suara Ruslan Razali, didasari pada DB-1 KPU, cuma 1.200 (...)

296. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Dalam permohonan, itu sebetulnya belum dihitung semua, kan?

297. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248-17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULKIFLI

Belum, Majelis.

298. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Ya. terus?

299. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248-17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULKIFLI

Sedangkan dibandingkan dengan DB1-KPU, suara Ruslan Razali di Peureulak, itu cuma 1.904 ... 9.294[sic!]. Ada kekurangan suara atas nama Caleg Ruslan Razari yaitu sekitar 756, Majelis.

300. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terus berarti perhitungan seluruhnya itu betul sebagaimana apa yang ditentukan oleh KPU, ya, oleh Termohon.

301. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248-17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULKIFLI

Sebenarnya ada kekurangan kalau ... kemudian Pihak Termohon tadi menyampaikan 3 ... apa namanya ... 77 TPS. Ada sekitar 51 TPS yang tidak dihitung, Majelis.

302. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Lho, enggak, ini suara yang benar sebagaimana yang sudah ditentukan ... apa ... diputuskan oleh KPU itu betul apa salah?

303. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248-17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULKIFLI

Benar, Majelis.

304. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Itu kan intinya itu. Anda kalau berbeda dengan KPU-nya, malah langsung ramai itu, lebih ramai lagi ini berarti. Datanya 3 Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait beda-beda kan jadinya. Nanti kita menentukan, menilai mana yang paling benar, kan gitu. Tapi sama, ya? Data yang ditentukan perolehan suara masing-masing yang ditentukan oleh Termohon, Pihak Terkait juga ... menurut Pihak Terkait sama, betul?

305. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248-17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULKIFLI

Sedikit saya jelaskan, Majelis. Kalau misalnya di ... apa namanya ... di 77 TPS itu benar, di 25 desa. Akan tetapi kan belum dihitung di 51 TPS lagi, Majelis.

306. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Enggak. Akhirnya seluruhnya (...)

307. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248-17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULKIFLI

Akhirnya benar.

308. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sudah, kan?

309. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248-17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULKIFLI

Ya, benar, Majelis.

310. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, akhirnya itu perolehan suara Pihak Terkait itu betul, sudah sama, kan?

311. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248-17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULKIFLI

Ya, Majelis.

312. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Seperti perhitungannya Termohon, kan? Ya. Ini kita sudah bicara masalah hasil akhirnya sama, gitu. Terus, ada lagi?

313. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248-17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULKIFLI

Cukup, Majelis.

314. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Cukup.

315. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248-17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULKIFLI

Kemudian pada Petitem.

316. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Udah, dianggap dibacakan Petitemnya.

317. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248-17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULKIFLI

Dianggap dibacakan, Majelis.

318. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terus, kemudian yang untuk di ... anu ... di Aceh Timur II?

319. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248-17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULKIFLI

Sebentar, Majelis. Di Aceh Timur II, itu DPRK, Majelis, bukan DPRA. Kami cu ... masuk sebagai Pihak Terkait di DPRA, Majelis.

320. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tidak, ya? Sebagai DPRA-nya saja, ya?

321. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248-17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULKIFLI

Ya, Majelis.

322. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Tadi tidak mempersoalkan yang di 2 ini, ya?

323. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248-17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULKIFLI

Tidak, Majelis.

324. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Cukup ya, berarti, ya?

325. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248-17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULKIFLI

Cukup, Majelis. Wassalamualaikum wr. wb.

326. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb.

Ini kita sudah selesaikan Perkara 248-17-01,249-07-00/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Bawaslu yang terakhir.

Ada ... anu ... tadi, hanya minta ... saya minta konfirmasi? Ada rekomendasi yang dikeluarkan? Ada? Dipakai miknya

327. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Ada, Yang Mulia.

328. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ada? Rekomendasinya berupa apa?

329. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Untuk me ... melakukan rekapitulasi ulang.

330. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Rekapitulasi ulang? Itu sudah dilaksanakan?

331. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Sudah dilaksanakan.

332. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terus, hasilnya sama?

333. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Hasilnya sama, Yang Mulia.

334. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sama? Antara perhitungan yang pertama dengan rekapitulasi ulang tidak ada perbedaan?

335. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Ya.

336. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Cukup, ya? ada lagi yang mau disampaikan?

337. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Baik. Untuk ... Perkara 248-17-01, 249-07-00/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ini, ada beberapa hal yang mungkin secara detail sudah kami tulis.

338. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

339. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Di dalam keterangan.

340. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Di halaman berapa?

341. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Kita mendasarkan ... pada perolehan di ... di halaman 15 ... di halaman 13.

342. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Halaman 13. Apa itu yang ditulis di situ?

343. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Itu ... rekapitulasi DAA1-DPRA Kecamatan Peureulak Timur.

344. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

345. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Berjumlah 2.708 (...)

346. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sama dengan apa yang disampaikan Termohon tadi? Itu tadi sudah saya ... anu ... sudah saya tanyakan, sudah dilakukan rekomendasinya untuk melakukan perhitungan suara ulang sudah ... rekap ulang sudah dilakukan hasilnya sama, gitu kan?

347. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Rekap ... rekap ulang itu yang ... rekap ulang itu terjadi pada tingkat kabupaten, Yang Mulia.

348. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

349. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Yang kami sampaikan ini adalah data DAA-1 di tingkat kecamatan.

350. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

351. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Nah, jadi di tingkat kecamatan itu di Perlak ... di Kecamatan Peureulak Timur (...)

352. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tapi itu kan sudah kemudian diangkat di tingkat ... rekapitulasi ulangnya tuh di dilaksanakan di mana, toh? Tingkat apa, toh?

353. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Kabupaten, Yang Mulia.

354. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kabupaten. Nah ya, kalau itukan berarti sudah selesai di atas itu. Ini kok yang di tingkat kecamatan itu kenapa mau disampaikan?

Kan tadi dari kecamatan, kecamatan, kecamatan terus dilakukan rekapitulasi tingkat kabupaten. Kan gitu, kan? Nah, yang rekap di tingkat kabupaten itu sudah dilaksanakan untuk menghitung ... untuk merekap ulang kan di kecamatan-kecamatan itu, kan?

355. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Ya, Yang Mulia.

356. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, hasilnya sama?

357. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Sama, Yang Mulia.

358. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sama, tidak beda dengan hasil rekap yang pertama. Nah, sekarang yang rekap kecamatan ini mau disampaikan kaitannya apa?

359. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Khususnya di ... maaf Yang Mulia, di kecamatan yang tadi Peureulak ... Peureulak Barat Yang Mulia (...)

360. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke, gini sekarang ini di dapil yang Aceh Timur II, yang di Peureulak?

361. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Oke, baik Yang Mulia. Selesai.

362. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke, kalau yang di Aceh Timur VI kan udah selesai. Nah sekarang yang di Peureulak II gimana? Di ... anu ... 4 desa itu tadi. Terus dilakukan rekap di tingkat kecamatan, gimana?

363. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Sebentar, Yang Mulia. Rekapitulasi tingkat Kecamatan Peureulak Barat itu berdasarkan DA-1 untuk 4 desa itu.

364. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, 4 desa yang dipersoalkan itu.

365. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Ya, untuk perolehan suara ... untuk Desa Beringin 421, Beusa Seuberang 402, Paya Gajah 265, Beusa Baroeh 121.

366. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

He eh.

367. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Kemudian, berdasarkan C1-DPRK Kecamatan Peureulak Barat perolehan suara Partai Aceh di Desa Beringin, Beusa Seuberang, Paya Gajah dan Beusa Baroeh itu sudah ada dalam tabel bisa dilihat.

368. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

369. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Kemudian untuk terkait yang disampaikan tadi (...)

370. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oleh Termohon jumlahnya 23.720 benar apa enggak itu?

371. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Kami ingin mengomentari tentang adanya tambahan suara itu terhadap Saudari Nasrianti.

372. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

373. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Sebanyak 865 suara. Itu data ... maaf, data yang diterima oleh Panwaslih Aceh Timur DA1-DPRK Kecamatan Peureulak Barat, itu perolehan suara Nasrianti sebanyak 865 suara. Kemudian pada DB1-DPRK rekap tingkat kabupaten perolehan suara Nasrianti juga sebanyak 865 suara.

374. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

375. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Kemudian, berdasarkan C1-DPRK Peureulak Barat perolehan suara untuk Nasrianti untuk Beringin sebanyak 33 suara, Beusa Seuberang 53 suara, Paya Gajah 86, dan Beusa Baroeh 69 suara. Demikian Yang Mulia.

376. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Tapi yang total seluruhnya itu 23.720 betul? Sama data Anda? Tadi Termohon menyampaikan total suara di Peureulak seluruhnya itu 23.720, ya? Betulkan? Ya? Betul, ya?

377. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Ya, Yang Mulia.

378. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu untuk seluruh Peureulak? Peureulak Barat? Tapi ada persoalan yang dipersoalkan hanya untuk di tingkat 4 desa ini saja, ya kan?

379. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Ya.

380. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, ini ada uraian yang disampaikan oleh Panwaslih itu perinciannya untuk yang 4 desa itu begini, begitu ya?

381. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Ya.

382. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Ya, ada lagi yang akan disampaikan? Cukup?

383. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Cukup, Yang Mulia.

384. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih.

385. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sebentar, ya, ini ke Bawaslu, ya.

Di dalam keterangannya ini memang tidak ditandatangani, ya, Pak, ya? Keterangan yang disampaikan ini?

386. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Sudah ditandatangani, Yang Mulia (...)

387. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ditandatangani merujuk kepada (...)

388. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Sudah ... sudah renvoi kemarin.

389. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sebentar. Jadi merujuknya kepada perkara yang lain, ya? Jadi ... eh ... karena jadi satu tadi, ya, keterangannya.

390. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Enggak, itu kita sudah masukkan setiap semua perkara yang kemarin kita masukkan tanda tangannya.

391. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ditandatanganinya di perkara yang mana?

392. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Semua perkara.

393. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Semua perkara?

394. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Sudah ... Ketika sidang yang lalu itu Majelis Hakim meminta untuk ditandatangani.

395. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

396. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Dan kita sudah masukkan tanda tangannya. Dan kita sudah mendapatkan aktanya 11.

397. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Begini, ya, untuk Bawaslu RI, Bawaslu provinsi, kemudian Bawaslu kabupaten/kota, itu keterangannya harus ditandatangani dan tanda tangan itu ditandatangani oleh semua komisionernya.

398. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Betul.

399. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu di dasarkan pada rapat pleno.

400. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Betul.

401. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Karena terjadi begini, sering terjadi itu juga praktik-praktik pada waktu pilkada, Bawaslu nya itu pecah, saling memihak, sehingga yang 1 memberikan keterangan A, yang 1 memberikan keterangan B. Lah, kalau terjadi kayak begitu, kan bisa dilaporkan di DKPP bahwa Bawaslu itu tidak netral, kan? Makanya, keterangan Bawaslu yang valid yang diterima oleh Mahkamah adalah keterangan Bawaslu yang didasarkan pada hasil pleno yang dilakukan oleh seluruh Komisioner. Kalau misalnya terjadi ada dissenting, yang 1 tidak setuju, anggotanya misalnya 3, yang 1 tidak setuju, tapi yang 2 setuju, berarti yang dipakai yang mayoritas yang setuju, itu keterangannya. Ini ditandatangani semua?

402. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Izin, Yang Mulia. Kami jelaskan.

403. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

404. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Dalam penyampaian keterangan tertulis ini, pertama-tama kami menyampaikannya secara utuh dalam dalam (...)

405. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Secara keseluruhan?

406. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Secara keseluruhan.

407. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Seluruh perkara yang masuk di ... ya ...di sini untuk Daerah Aceh?

408. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Ya (...)

409. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terus, kemudian dipisah-pisahkan?

410. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Terus, sudah kita tanda tangani, sudah ditandatangani 5. Kemudian dalam penyampaian di ... ketika diverifikasi, diminta untuk disampaikan secara tertulis (...)

411. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Secara terpisah untuk daerah masing-masing?

412. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Ya.

413. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

414. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Kemudian, kita sampaikan, kemudian sudah kita tanda tangani pada saat sidang yang lalu.

415. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

416. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Itu kan belum kita tanda tangani. Kemudian, setelah sidang, kita tanda tangani, semuanya kita masukkan kembali.

417. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

418. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Dan kita sudah mendapatkan 11 akta.

419. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

420. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Sebagai bukti bahwa itu (...)

421. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

422. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Sudah ditandatangani.

423. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, itu gimana? Bukti fisiknya ada tanda tangan?

424. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Mohon maaf, Yang Mulia. Jadi, pada saat penyampaian keterangan tertulis itu, jadi dari pihak verifikator, itu kita menyampaikan dokumen yang berbeda, ya, yang ... yang bagian tanda tangannya, kemudian, disisip di ... di semua dokumen, sehingga tidak ... tidak membuka (...)

425. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, ini keterangannya memang sudah ditandatangani, ya?

426. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Sudah.

427. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Ya, ya, terima kasih. Kita cek itu supaya semuanya serba jelas, ya.

Baik, kita lanjutkan. Sekarang dengan Perkara Nomor 66-14-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh Partai Demokrat, dengan Pihak Terkait Golkar, ya.

Baik, Termohon, silakan! Siapa yang akan menyampaikan?

428. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Partai ... dari Termohon untuk Partai Demokrat.

429. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

430. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Ya, kami langsung ke (...)

431. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang mau direspons itu di sini ada berapa dapil yang dipersoalkan?

432. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Ada 4, Yang Mulia.

433. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

4 dapil.

434. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Ya. Dapil pertama, Aceh VI.

435. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, Aceh VI.

436. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

DPRK Aceh Timur.

437. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Aceh VI. Kemudian, Aceh Timur.

438. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Terus, Dapil III, DPRK Aceh Singkil.

439. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Aceh Singkil.

440. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Dan terakhir Dep ... Dapil IV DPRK Aceh Timur.

441. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang terakhir Aceh?

442. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Aceh Timur, Dapil IV.

443. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Timur Dapil IV. Ini ... anu ... yang Aceh VI ini untuk DPR pusat?

444. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Provinsi, Yang Mulia.

445. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Provinsi?

446. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Betul.

447. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terus, kemudian yang kedua untuk?

448. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Yang Dapil III DPRK Aceh Timur untuk DPRK, Yang Mulia.

449. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

DPRK.

450. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Kemudian ketiga Dapil III DPRK juga, Aceh Singkil.

451. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

He eh.

452. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Yang terakhir (...)

453. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

DPRK?

454. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

DPRK Aceh Timur, Dapil IV.

455. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Jadi, yang tingkat provinsi hanya Aceh VI, ya?

456. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Betul, Aceh VI.

457. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, silakan disampaikan.

458. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Dalam Pokok Perkara (...)

459. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan!

460. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Persandingan perolehan suara (...)

461. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sebentar, sebentar, Pak. Ini Prof. Enny Yang Mulia, mau tanya ini, untuk minta klarifikasi Anda.

462. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, sebelum dilanjutkan.

463. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Baik.

464. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini jawaban ini, yang dipakai hanya 1 saja, yang tanggal 5 juli saja, ya?

465. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Betul, Yang Mulia.

466. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak ada yang lain, ya?

467. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Tidak ada.

468. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik.

469. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan!

470. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Baik, Yang Mulia.

Persandingan perolehan suara partai politik bersama ... sesama anggota Caleg Partai Demokrat untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Aceh.

Pada prinsipnya, Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon sepanjang berkaitan dengan dalil tuduhan Pemohon yang dalilkan tentang adanya perbedaan hasil penghitungan suara.

471. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ini, sebentar. Enggak ada eksepsi, ya?

472. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Oh.

473. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ada enggak eksepsinya?

474. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Mohon maaf, ada, Yang Mulia.

475. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Apa itu eksepsinya?

476. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Sedikit. Eksepsinya tentang permohonan Pemohon tidak jelas.

477. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Permohonan kabur.

478. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Ya, karena (...)

479. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kenapa tidak kabur ... eh, kenapa kabur?

480. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Karena tidak jelas, apakah permohonan ini merupakan permohonan yang diajukan oleh partai politik atau perseorangan. Dalam hal ini, Caleg DPRD atas nama Iqbal Farabi Nomor Urut 1 melawan Muhammad Yunus, Nomor Urut 2, sesama partai (...)

481. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sesama Partai Demokrat?

482. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Demokrat.

483. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

484. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Kemudian, ada juga Caleg DPRK atas nama Abdul Kadis melawan Elma Zalmi.

485. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

486. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Nah.

487. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ini juga sesama internal?

488. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Sesama internal, Yang Mulia.

489. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

490. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Sehingga, menurut kami, ini tidak jelas. Karena faktanya, mereka masuk melalui partai politik.

491. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Partai politik.

492. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Padahal, dalam PMK Nomor 3 ... Pasal 3 PMK Nomor 2 Tahun 2018, sangat jelas disebutkan bahwa Pemohon itu bisa dari partai politik maupun dari perseorangan.

493. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Perseorangan.

494. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Demikian, Yang Mulia.

495. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ada beda, kalau perseorangan harus ada rekomendasi atau izin dari pimpinan partainya, kan gitu.

496. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Betul (...)

497. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tapi kalau partai politik berarti permohonan harus ditandatangani oleh pimpinan partai politik yang bersangkutan.

498. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Betul.

499. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kan, gitu. Nah, ini untuk yang Aceh VI dan Aceh Timur yang DPRK dua-duanya itu tidak jelas karena seolah-olah bisa permohonan perorangan atau bisa permohonan partai?

500. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Ya, demikian.

501. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kalau yang Aceh Singkil III dan Aceh ... Aceh Timur IV, gimana itu? Ini enggak ... enggak ada masalah?

502. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Tidak ada, Yang Mulia.

503. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Hanya ini ... hanya mempersoalkan yang dua itu, ya?

504. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Betul.

505. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terus, sekarang pokok permohonan?

506. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Pokok permohonan.

507. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Di pokok permohonannya gimana?

508. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Baik. Pada prinsipnya kami menolak dalil Pemohon. Yang mendalilkan tuduhan Pemohon tentang adanya perbedaan hasil perhitungan suara antara calon legislatif dari Partai Demokrat Nomor 1 atas nama Iqbal Farabi dengan Calon Legislatif Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Yunus ... Muhammad Yunus Banta. Yang disebabkan adanya penambahan suara yang terjadi secara terstruktur dan masif di tiap-tiap kecamatan, yaitu Kecamatan Peureulak Kota, Kecamatan Peureulak Timur, Bireum Bayeun, dan Rantau Selamat. Dalil tersebut kami bantah karena tidak benar.

509. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Saya perdalam. Caleg Nomor 1 memperoleh suara berapa dan Caleg Nomor 2 memperoleh suara berapa itu?

510. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Menurut data kami, bapak Iqbal Farabi ini memperoleh suara 6.500 (...)

511. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu caleg ... pak Iqbal Farabi caleg nomor berapa? Nomor (...)

512. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Nomor 1.

513. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Satu?

514. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Ya. Memperoleh suara 6.545 suara.

515. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

516. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Sementara Nomor Urut 2 Muhammad Yunus Banta memperoleh suara 8.772 suara, sehingga (...)

517. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

8.000 ... saya ulangi 8.000?

518. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

772 suara.

519. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

700, berapa?

520. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

72 suara, Yang Mulia.

521. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, ini tadi saya makannya kebanyakan jadi mikirnya agak susah kalau angka-angka ini. Jadi, 8.700?

522. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

72 suara.

523. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

72 suara. Oke.

524. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Selisih antar kedua calon ini adalah totalnya selisihnya 2.227 suara.

525. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Jadi yang unggul itu sebetulnya Caleg Nomor 2, ya?

526. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Betul, Yang Mulia.

527. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Ini menurut Termohon?

528. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Ini secara fakta demikian.

529. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, menurut Termohon, kan?

530. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Ya, menurut kami.

531. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Menurut yang ditetapkan Termohon?

532. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Betul, Yang Mulia.

533. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tapi waktu itu Pemohon mengatakan "Ini ada penggelembungan suara.", kan gitu?

534. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Betul.

535. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

536. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Secara masif dan terstruktur.

537. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, TSM. Ya, terus!

538. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Oke, baik. Nah. Bahwa ... kami lanjut, Yang Mulia.

539. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan!

540. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Dari total 4 kecamatan yang disebutkan oleh Pemohon dalam permohonannya. Apabila jumlah suaranya digabung dari 4 ... 4 kecamatan tadi yang dianggap ada penggelembungan.

541. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

542. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Itu totalnya suaranya Pemohon mendapat 323 suara, Yang Mulia.

543. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sebentar, ya. Ya, terus!

544. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Sehingga, andaikata misalnya dari selisih tadi yang 2.227 suara tadi.

545. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

He em.

546. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Apabila dikurangi oleh hasil dugaan penggelembungan sebesar 323 suara, maka ternyata masih ada selisih antara Pemohon atas nama Iqbal Farabi ini dengan Calon Legislatif atas nama Muhammad Yunus.

547. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nomor Urut 2 tadi?

548. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Betul.

549. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

550. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Sebesar 1.904 suara.

551. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, meskipun ini kayak begini, tapi kalau anu ... tetap yang unggul tetap Nomor 2, gitu?

552. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Betul, Yang Mulia. Sehingga, hal ini juga mempertegas bahwa Termohon tidak melakukan kesalahan dalam perhitungan suara dan tidak benar ada penambahan suara, sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon, Yang Mulia.

553. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

554. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Dengan demikian, dalam petitum kami mohon untuk (...)

555. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Menolak?

556. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Untuk menolak permohonan Pemohon sebelumnya.

557. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dalilnya, ya. Itu, satu. Terus yang berikutnya?

558. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Berikutnya, persandingan perolehan suara partai politik sesama anggota partai untuk pengisian keanggotaan DPRK Aceh Timur, Provinsi Aceh.

559. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

560. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Prinsipnya, kami Termohon, Yang Mulia, menolak dalil ... dalil tuduhan Pemohon sepanjang berkaitan dengan tuduhan yang mendalilkan tentang adanya perbedaan hasil perhitungan suara antara Pemohon dengan Calon Legislatif dari Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Elma Zalmi yang disebabkan (...)

561. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nomor Urut 1 Elma Zalmi.

562. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Yang disebabkan adanya penambahan suara dengan cara memasuk ... memasukkan suara Badan Partai Demokrat ke suara Badan Calon Legislatif Nomor Urut 1 atas nama Elma Zalmi.

563. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Ya.

564. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Dalil tersebut tidak benar, Yang Mulia. Dan kami membantah keras.

565. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Jadi itu sebetulnya kekeliruan, menurut Pemohon mestinya perolehan partai tapi dimasukkan ke Elma, gitu?

566. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Betul, Yang Mulia.

567. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kan. Nah, kalau menurut Termohon, gimana?

568. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Ya.

569. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu memang sudah betul begitu?

570. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Betul demikian.

571. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Berarti berapa yang nyoblos partai dan berapa yang perolehan suara di Elma sudah bisa di anu kan ... menurut Saudara?

572. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Partai di sini 129 suara, Yang Mulia.

573. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Untuk Elmanya, Caleg Nomor 1?

574. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Oh.

575. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kebalik.

576. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Mohon maaf, untuk Partai, Elma 129.

577. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

He eh?

578. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Versi kami, Pemohon 224.

579. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

224? Oke. Ya. Ini untuk yang Aceh Timur, ya?

580. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Betul, Yang Mulia.

581. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Ada lagi yang akan disampaikan untuk merespons Aceh Timur atau cukup?

582. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Selanjutnya bahwa untuk mempertegas saja.

583. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

584. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

KIP Aceh Timur ketika melaksanakan rapat pleno rekapitulasi dan penghitungan perolehan suara untuk Kecamatan Birem Bayeun tidak mendapatkan Form DA-2 keberatan dari saksi Partai Demokrat.

585. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada keberatan?

586. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Betul. Dan tidak ada pula sanggahan apapun dari Saksi Partai Demokrat yang hadir pada saat itu.

587. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada sanggahan. Semuanya menerima rekap itu, ya?

588. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Betul, Yang Mulia.

589. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terus?

590. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Selanjutnya ke Petitem, Yang Mulia. Mohon untuk permohonan atas Petitem (...)

591. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, dianggap dibacakan, ditolak, kan?

592. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Ditolak, betul.

593. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang yang Nomor 3 di Aceh Singkil III.

594. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Ya, baik. Persandingan perolehan suara partai politik sesama anggota partai untuk pengisian Keanggotaan DPRK Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh.

595. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

596. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Perolehan suara, tabel menurut kami untuk Partai Golkar (...)

597. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Halaman berapa itu?

598. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Halaman 15, Yang Mulia.

599. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Halaman 15 untuk Golkar?

600. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Untuk Golkar memperoleh suara menurut kami 1.598 suara.

601. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

602. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Partai Demokrat memperoleh suara 1.587

603. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Berapa? 1.500?

604. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

1.587.

605. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

1.587. Terpaut 11, ya?

606. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Betul.

607. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke, selisih 11 itu, ya? Yang betul menurut Termohon ini, ya?

608. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Ya, betul, Yang Mulia.

609. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, tidak ada persoalan dan tidak ada keberatan juga pada waktu rekapitulasi ini?

610. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Tidak ada, Yang Mulia.

611. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada.

612. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Hanya beberapa kejadian yang disebutkan oleh Pemohon, antara lain adalah bahwa terdapat ... sebentar, halaman 18, Yang Mulia, nomor 8.

613. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

614. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Terda ... terhadap dalil Pemohon tentang adanya pencoblosan oleh anak yang masih berusia 15 tahun.

615. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, coblos yang dilakukan anak, benar enggak, itu?

616. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Dapat kami jelaskan, Yang Mulia. Bahwa telah dilakukan serta dibuktikan melalui klarifikasi langsung kepada KPPS TPS 5 Desa Situban Makmur oleh (...)

617. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

TPS berapa?

618. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

TPS 5 Desa Situban Makmur.

619. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

TPS 5 Desa Situban Makmur, gimana?

620. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Yang mana hasil dari klarifikasi tersebut adalah bahwa si anak tersebut yang bernama Ira Suryani tidak diberikan hak pilih, Yang Mulia.

621. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ada di DPT, enggak? Surya ... Irma Suryani, itu?

622. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Karena memang tidak daftar, tidak terdaftar di DPT.

623. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, tidak terdaftar karena dia belum cukup umur kan?

624. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Betul, Yang Mulia.

625. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sudah kawin belum Ira, ini?

626. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Itu kami belum mendalami ke sana.

627. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

628. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Yang pasti tuduhannya demikian, kami bantah demikian.

629. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, anak di bawah umur nyoblos, ternyata dia enggak nyoblos?

630. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Ndak, ndak nyoblos.

631. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

632. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Kemudian (...)

633. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ada laporan di situ? Di TPS itu, waktu itu ada keberatan dari saksi Pemohon?

634. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Nah, ini kami tegaskan bahwa pada saat pemungutan suara di TPS 5 Situban Makmur tidak terdapat keberatan, Yang Mulia.

635. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada?

636. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Dari PTPS dan saksi dari partai politik, termasuk saksi dari Pemohon terhadap pengguna hak pilih yang demikian.

637. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke, saksi-saksi tidak keberatan, termasuk saksinya Demokrat, ya?

638. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Betul, Yang Mulia.

639. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ini hanya 1 yang dipersoalkan, ya, kemarin, ya? Anak di bawah umur itu?

640. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Ya, kalau untuk perseorangan, ya, Yang Mulia.

641. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ya, kan?

642. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Selebihnya, selebihnya selisih.

643. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Ada lagi yang untuk ini, Aceh Singkil?

644. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Aceh Singkil, cukup, Yang Mulia.

645. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Cukup, ya. Jadi, hanya selisih 11 sebetulnya.

646. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Betul.

647. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terus, sekarang yang keempat?

648. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Keempat. Persandingan perolehan suara partai politik sesama anggota partai untuk pengisian Keanggotaan DPRK Aceh Timur Provinsi Aceh.

Bahwa pada prinsipnya, Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan dalil tuduhan Pemohon yang mendalilkan tentang adanya perbedaan hasil

penghitungan suara yang mengakibatkan Pemohon kehilangan suara dengan selisih suara sebanyak 123 suara.

649. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

650. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Menurut Pemohon, berdasarkan hasil rekapitulasi di Kecamatan Simpang Ulim, Pemohon mendapat suara 1.116 suara, sementara rekapitulasi di Kabupaten Aceh Timur, Pemohon suaranya berkurang menjadi 993 suara, sehingga ada selisih 123 suara, Yang Mulia.

651. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

123 suara. Terus?

652. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Kemudian, dalil tersebut kami bantah, Yang Mulia, tidak benar. Karena berdasarkan Formulir Model DA-1 Kecamatan Simpang Ulim yang diteliti dan dibacakan oleh PPK dalam rekapitulasi, memperoleh suara ... maaf ... yang dilaksanakan terbuka dihadiri oleh saksi partai politik dan juga oleh panitia pengawas. Jumlah perolehan suara Pemohon yang benar adalah sebesar 993 suara.

653. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ini memang sudah betul, ya?

654. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Betul, Yang Mulia.

655. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, memang itu selisih 123 memang ternyata betul, ya?

656. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Betul, Yang Mulia.

657. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Karena memang perolehan suara Pemohon hanya 993, itu?

658. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Betul.

659. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Nah, itu yang didalilkan tidak betulnya kenapa? Kok dia bisa mengatakan itu? Misalnya tadi, kalau tadi yang dipersoalkan kan ada anak nyoblos di ... Ini digelembungkan 100 ... 116 ini menurut dia, apa ini?

660. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Lah, itu yang kami juga tidak mengerti, Yang Mulia.

661. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, oke.

662. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Kalau dari klien kita sih bahasanya mencari-cari aja.

663. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, oke. Mencari-cari. Ada lain?
Tadi Petitumnya kan perhitungan suara yang benar, perolehan Pemohon adalah 993.

664. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Betul, Yang Mulia.

665. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tetap gitu, kan?

666. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Ya, betul.

667. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Karena sebetulnya tidak ada persoalan apa-apa.

668. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Tidak ada masalah apa-apa.

669. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Rekapnya juga tidak ada masalah.

670. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Tidak ada masalah.

671. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

672. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Saya kira (...)

673. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kalau waktu itu juga tidak ada keberatan? Hasil 993 itu?

674. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Tidak ada, Yang Mulia.

675. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada. Cukup, ya?

676. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Cukup, Yang Mulia. Demikian, terima kasih.

677. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sekarang Pihak Terkait. Terima kasih.

Pihak Terkaitnya dari Golkar. Gimana, Golkar? Saya minta ... anu ... dulu. Golkar itu mau ... menganu ... yang mana, merespons yang mana?

678. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 66-14-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : HERU ANDESKA (GOLKAR)

Pada pokoknya, Golkar merespon bahwa sama dengan Termohon, Yang Mulia.

679. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Enggak, untuk ... untuk dapil berapa, semua? Enggak, kan?

680. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 66-14-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : HERU ANDESKA (GOLKAR)

Untuk ... enggak, untuk Kabupaten Aceh Singkil III.

681. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Hanya Golkar ... hanya untuk Aceh Singkil III?

682. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 66-14-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : HERU ANDESKA (GOLKAR)

He eh.

683. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Gimana? Jadi, pada pokoknya apa yang disampaikan oleh Termohon betul, ya?

684. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 66-14-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : HERU ANDESKA (GOLKAR)

Betul, Yang Mulia.

685. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Betul itu hanya memang betul selisih suaranya 11?

686. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 66-14-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : HERU ANDESKA (GOLKAR)

Selisih suaranya 11 karena (...)

687. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Anak yang dibawah umur tidak ada yang mencoblos?

688. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 66-14-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : HERU ANDESKA (GOLKAR)

Tidak, Yang Mulia.

689. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Selain itu, apa lagi yang akan disampaikan?

690. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 66-14-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : HERU ANDESKA (GOLKAR)

Pada pokoknya sesuai dengan Termohon, Pihak Terkait memperoleh 1.598 suara (...)

691. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

He eh.

692. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 66-14-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : HERU ANDESKA (GOLKAR)

Dan Pemohon 1.587 suara.

693. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

1.587 itu, ya?

694. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 66-14-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : HERU ANDESKA (GOLKAR)

He eh. Itu berdasarkan pleno rekap ... rekapitulasi perhitungan suara di tingkat PPK (...)

695. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

He eh.

696. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 66-14-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : HERU ANDESKA (GOLKAR)

Dan berdasarkan pleno rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Aceh Singkil III, Yang Mulia.

697. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Dan tidak ada keberatan?

698. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 66-14-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : HERU ANDESKA (GOLKAR)

Tidak ada keberatan, Yang Mulia.

699. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Cukup itu, ya, berarti?

700. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 66-14-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : HERU ANDESKA (GOLKAR)

Cukup, cukup, Yang Mulia.

701. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, selisihnya memang hanya 11 suara ini? Betul, ya? Baik. Bawaslu atau panwas ada persoalan di sini ini? Kalau tidak ada, tidak usah. Tapi kalau ada, sampaikan.

702. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Baik. Yang pertama (...)

703. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Silakan, Pak!

704. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Yang pertama, terkait dengan DPRA antara Saudara Iqbal Farabi dan Yunus Banta.

705. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

He eh.

706. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Data ... data yang ada di Panwaslih Provinsi Aceh itu sama dengan data Termohon.

707. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sama?

708. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Sama.

709. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sama, baik.

710. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Kemudian, selanjutnya (...)

711. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

He eh.

712. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Pemilihan Anggota DPRK Aceh Timur III.

713. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

DPRK Aceh Timur III.

714. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Untuk ... antara Saudari Elma Zalmi, ya.

715. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya?

716. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Itu yang dapat kami berikan keterangan. Bahwa Abdul Kadis pernah datang menjumpai Panwas Kecamatan Biren Bayeun pada tanggal 23 April 2019, dengan membawa data DA1-DPRK (...)

717. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya?

718. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Kemudian meminta untuk dibandingkan dengan data panwas.

719. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya?

720. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Pada saat itu panwas belum memiliki data.

721. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

He em.

722. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Lalu, kita menyampaikan di forum ini, salinan DA1-DPRK.

723. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

He eh.

724. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Saudara ... suara ... DA1-DPRK, suara Elma Zalmi itu 362.

725. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya?

726. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Abdul Kadis mendapat 47 suara.

727. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya?

728. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Ya. Kemudian, suara partai sebanyak 129 suara.

729. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

129 tadi itu?

730. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Kemudian, C1-DPRK Kecamatan Birem Bayeun, untuk perolehan suara Elma Zalmi 263 suara dan Abdul Kadis 47 suara.

731. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

732. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Untuk Partai Demokrat 224 suara.

733. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

He eh.

734. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Kemudian, untuk DPRK Aceh Timur IV.

735. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya?

736. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Untuk Simpang Ulim, ya, khususnya, bisa kami sampaikan. Kami ingin menyampaikan data perolehan suara Partai Demokrat berdasarkan DA1-DPRK Kecamatan Simpang Ulim, itu sebanyak 1.116 (...)

737. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

1.116.

738. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Ya, itu DA1-DPRK. Tetapi, berdasarkan C1-DPRK Simpang Ulim, itu terjadi perbedaan, ya. Perolehan suaranya untuk Partai Demokrat sebanyak 993 suara.

739. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Jadi ada selisih (...)

740. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Kemudian, kita sampaikan juga di forum ini bahwa TPK Simpang Ulim atas nama Abu Bakar, melalui telepon meminta kepada Ketua Panwas Kecamatan Simpang Ulim untuk datang ke Puskesmas Kecamatan Simpang Ulim untuk mengambil DA1-DPRK, hasil perbaikan. Ketua PPK menyatakan ada kekeliruan hasil rekap DA1-DPRK terhadap Caler ... Caleg DPRK Partai ... Partai Aceh atas nama Usman. Sehingga, perolehan suara untuk Partai Demokrat menjadi 993.

741. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

742. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Hasil perbaikan itu di luar pleno.

743. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, oke.

744. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Itu untuk (...)

745. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Aceh Timur IV?

746. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Aceh Timur IV. Kemudian, untuk Aceh Timur ... maaf, untuk Singkil.

747. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Aceh Singkil III, he eh.

748. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Kami perlu menyampaikan beberapa keterangan terkait beberapa hal yang disampaikan oleh Pemohon.

749. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

750. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Yang pada sidang yang lalu.

751. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

752. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Yang pertama, terkait dengan kecurangan di Danau Paris. Seperti misalnya, disebutkan oleh kotak suara di Kecamatan tidak bersegel, Bergeraknya logistik, dan sebagainya.

753. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

He eh.

754. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Bisa kami sampaikan bahwa Panwaslih Aceh Singkil telah menindaklanjuti laporan itu. Kemudian yang dilakukan oleh KPPS TPS 1, Lae balno II, dan sebagainya, ya. Kemudian, pelanggaran ... Kemudian

kedua, kami sampaikan juga bahwa terkait adanya dugaan pelanggaran pidana pemilu pada tanggal 21 tahun 2019, pengadilan telah menerbitkan Keputusan Nomor 39.

755. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Apa itu?

756. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Inti keputusannya adalah (...)

757. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pelanggaran pidananya menyangkut apa itu?

758. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Pelanggaran pidanya itu menyangkut ... menyangkut ada dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh KPPS TPS 01, ya, TPS 02, KPPS Sikoran, Situbuh-tubuh, dan TPS 4 Desa Biskang.

759. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ini sudah diputus pengadilan?

760. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Sudah.

761. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sudah?

762. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Sudah.

763. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh.

764. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Amar putusannya (...)

765. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

He eh.

766. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana, menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana (...)

767. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Apa pelanggaran mengenai apa? Kok dipidana ini?

768. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Melakukan tindakan ... maaf melakukan tindak pidana sebelum masa ... maaf, ini pelanggarannya mem ... apa ... membuka ... membuka ... apa namanya ... membuka kotak suara.

769. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

He eh.

770. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Tidak bersegel. Kemudian ... apa namanya ... intinya itu, Pak, membuka kotak suara yang tidak bersegel. Di dalam keterangan kita, sudah kita lampirkan juga putusan pengadilannya.

771. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

772. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Kemudian (...)

773. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terus mengenai yang itu ... yang anak di bawah umur nyoblos, ada enggak, terjadi enggak itu?

774. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Mengenai anak di bawah umur nyoblos itu. Pertama, tidak dilaporkan ke panwas dan (...)

775. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tidak.

776. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

... Apa namanya ... setelah dilakukan klarifikasi informasi bahwa anak tersebut tidak .. tidak mencoblos.

777. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ... tidak ... anu ... ya ... tidak ada didalam DPT juga, ya?

778. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Tidak.

779. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

780. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Kemudian, ada hal yang mungkin agak berbeda dengan ... dengan Termohon bahwa proses rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Danau Paris pada tanggal 21 April, itu Saksi Partai Demokrat atas nama Abdul Manam mengajukan protes terhadap DPK karena adanya ketidaksesuaian antara data pemilih dan pengguna hak pilih. Lalu (...)

781. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sebentar, sebentar. Ada beda antara data pemilih yang di DPT?

782. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Ya.

783. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dengan?

784. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Dengan pengguna hak pilih.

785. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Penggunaan itu kan (...)

786. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Perbedaan antara data daftar pemilih DPK, ya.

787. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

788. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Ketidaksesuaian antara data pemilih dan pengguna hak pilih.

789. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Berarti kalau pengguna hak pilih itu masuk ke C7, kan?

790. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

C7. Lalu meminta PPK membuka Form C-7.

791. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ada selisih berapa antara DPT dan C-7? Banyak yang di mananya?
Tentunya kalau dipersoalkan itu banyak C-7 nya, kan?

792. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Ya.

793. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, banyaknya berapa itu?

794. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Sebentar, Pak.

795. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ini yang dimaksud bisa disimpulkan. Ini yang partisipasi pemilih lebih 100% berarti di sini?

796. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Ya.

797. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ha?

798. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Jadi (...)

799. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Betul?

800. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Perlu kami sampaikan begini. Hal itu tidak terungkap karena pada saat itu tidak dipenuhi oleh PPK untuk membuka kotak suara untuk melihat perbedaan antara C-7 dan (...)

801. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

DPT?

802. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

DPT.

803. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

He em.

804. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Kemudian, pada saat penetapan di tingkat kabupaten, pada tanggal 2 sampai 6, pada saat penghitungan itu, untuk Kecamatan Danau Paris, itu Saudara Abdul Manam mengajukan keberatan terkait

jumlah pengguna hak pilih lagi. Dalam DPTb dan DPK di beberapa TPS dalam Kecamatan Danau Paris.

805. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

806. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Kemudian, saksi juga meminta untuk membuka C-7 DPK, namun permintaan itu tidak dipenuhi oleh KIP, sehingga juga tidak diketahui berapa ada perbedaannya.

807. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

808. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Kemudian, terkait adanya ... terkait dengan keberatan dari Saksi Partai Demokrat di Kecamatan Danau Paris dan keberatan saksi di TPS di Situban Makmur, ya, di Situbuh-Tubuh, dan Desa Napa Galuh, Panwaslih Aceh Singkil menerbitkan surat rekomendasi, ya, yang pada pokoknya meminta KIP menyelesaikan berbagai keberatan yang dimaksud pada saat rekapitulasi di tingkat ... di tingkat kabupaten.

809. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

810. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Kami kira demikian. Terima kasih, Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb.

811. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke, baik.

Berarti untuk ... ada partisipasi yang melebihi 100% itu tidak bisa dicek karena memang tidak dilakukan pembukaan lagi, ya. Oke. Cukup? Ya, baik. Terima kasih, Bawaslu.

Sekarang kita Perkara Nomor 07-08-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yang diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera dengan Pihak Terkaitnya dari PDIP.

Silahkan, Termohon, siapa yang akan menyampaikan? Ini yang dipersoalkan berapa dalil dulu?

812. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb.

Itu tadi disampaikan berkaitan dengan Perkara Register Nomor 07-08-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 itu, Pemohon adalah PKS.

813. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

814. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Yang dipersoalkan adalah DPRK Aceh Singkil Dapil I, Yang Mulia.
Kemudian (...)

815. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dapil 1?

816. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Betul.

817. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terus?

818. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Hanya mohon perhatiannya saja, Pak ... Yang Mulia bahwa persandingan suara antara Pemohon dengan (...)

819. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Hanya 1 dapil ini, ya?

820. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Ya.

821. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

822. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Dan memang tidak ... kalau diperhatikan juga tidak berkaitan dengan masalah hasil perolehan suara, Yang Mulia. Nah, mohon perhatian bahwa persandingan suara yang disajikan oleh Pemohon itu sama dengan Termohon. Itu dalam jawaban kami di halaman 2, itu tidak ada perbedaan antara hasil (...)

823. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Untuk persandingan perolehan suara, enggak ada?

824. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Enggak ada.

825. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, apa yang dipersoalkan kemudian (...)

826. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Nah, ini yang dipersoalkan 2 hal, Yang Mulia.

827. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

828. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Pertama, terjadi adanya penggunaan hak pilih oleh pemilih di luar Provinsi Aceh.

829. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

830. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Mengenai hal ini sudah kami jawab, Yang Mulia.

831. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

832. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Dalam jawaban kami halaman 3 Yang Mulia, di nomor ... halaman 3, angka 3. Dan kalau di diperkenankan, kami memerlukan renvoi, Yang Mulia, sebagai saran dari Prof. Enny untuk me-refer pada vide bukti.

833. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, oke. Buktinya (...)

834. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Nah, angka 3 ini bahwa ... Angka 3 ini, kami me-refer pada surat bukti untuk (suara tidak terdengar jelas) saja.

835. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, bukti T berapa?

836. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Itu T-7 sampai T-14, Yang Mulia.

837. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

T-7 sampai 14?

838. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Betul. Nah itu yang tadi sudah ... Jadi, tidak benar kalau ada berkaitan dengan (...)

839. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Orang yang tidak punya hak pilih, memilih, ya?

840. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Ya, betul. Kemudian yang kedua, Yang Mulia (...)

841. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu Pemohon enggak menyebutkan secara spesifik di TPS mana, TPS mana, kan enggak disebutkan.

842. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Enggak disebut, ya.

843. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kan?

844. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Kemudian yang kedua, Yang Mulia. Ini berkaitan dengan adanya perbedaan antara ... menurut versi Pemohon, adanya perbedaan jumlah pengguna hak pilih DPK dalam Formulir C-1.

845. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

846. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Ini sebetulnya merupakan rekomendasi dari Panwaslih dan kami sudah jawab, Yang Mulia, itu di halaman 3 angka 4 dan mohon me-refer kepada surat bukti T-16 sampai dengan T-17.

847. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Rekomnya berupa apa ini?

848. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Berupa pembukaan kotak suara, Yang Mulia.

849. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pembukaan kotak suara.

850. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Dan dimana terbukti bahwa apa yang didalilkan tidak benar.

851. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, sudah dibuka, ya?

852. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Sudah, Yang Mulia.

853. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dilaksanakan, ya?

854. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Dilaksanakan.

855. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Untuk mengecek, ya?

856. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Betul, Yang Mulia.

857. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke, ternyata tidak ada persoalan?

858. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Tidak ada persoalan.

859. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Masih tetap sama?

860. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Betul.

861. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terus?

862. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Itu poinnya, Yang Mulia, 2 hal tadi. Secara rinci sudah kami ajukan dalam jawaban.

863. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

864. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Dan sekali lagi, kalau diperkenankan, mohon direnvoi, Yang Mulia.

865. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

866. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Untuk angka 5, Yang Mulia.

867. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

He eh.

868. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Halaman 3. Kami me-refer kepada T-18.

869. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

T-18, ya.

870. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Kemudian di halaman 4, Yang Mulia.

871. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

872. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Itu angka 8 kami me-refer kepada T-20.

873. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Halaman 4 angka berapa?

874. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Angka 8, T-20.

875. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

T-20.

876. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Termasuk yang 9 juga T-20, Yang Mulia.

877. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

878. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Dan terakhir, di halaman 5 (...)

879. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

880. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Angka 10. Kami me-refer kepada vide surat bukti T-20 juga.

881. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

T-20 juga. Ya.

882. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Ya, berdasarkan penjelasan ini, kami mohon kiranya Petitemnya sudah kami tuangkan dalam jawaban.

883. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik.

884. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Terima kasih, Yang Mulia.

885. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dari Pihak Terkait PDIP.

886. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI (PDIP)

Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, sebagaimana tadi disampaikan oleh Termohon bahwa memang Pemohon tidak mempersoalkan angka-angka, artinya angka Pemohon dengan Termohon, dan Pihak Terkait tidak berbeda.

Jadi, Pemohon mempersoalkan yang pertama ada 7 orang pemilih di TPS 1 dan TPS 3 Telaga Bakti yang terdaftar dalam DPT daerah lain, kemudian menggunakan hak pilih di TPS tersebut.

887. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

888. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI (PDIP)

Terkait dalil tersebut, Pihak Terkait menyampaikan bahwa ke-7 orang tersebut telah memiliki KTP Elektronik di Desa Telaga Bakti. Nah, ini juga kita lampirkan dalam Bukti PT Singkil 1 dengan PT ... sampai dengan PT Singkil 7.

Jadi 7 orang yang disampaikan oleh Pemohon yang menggunakan hak pilih di TPS 1 dan TPS 3 Telaga Bakti itu sesungguhnya adalah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih khusus yang menggunakan KTP.

889. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

890. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI (PDIP)

Dan (...)

891. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Berarti, jadi dia tidak enggak milih di tempat lain, ya?

892. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI (PDIP)

Tidak, Yang Mulia.

893. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dia hanya memilih di situ berdasarkan ... karena dia mempunyai KTP elektronik, sehingga didaftar di situ?

894. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI (PDIP)

Ya, Yang Mulia.

895. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

896. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI (PDIP)

Karena ada juga yang di ... apa ... sebelum mereka pindah ke situ, sudah terlebih dahulu terdaftar di DPT tempat lain dan jaraknya itu sangat jauh. Ada yang sampai di Sumatera Utara. Jadi, tidak mungkin pada hari yang sama dia (...)

897. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dua kali yang sama mencoblos di tempat lain.

898. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI (PDIP)

Ya, Yang Mulia.

899. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

900. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI (PDIP)

Kemudian, terkait dengan dalil per angka 6 dan 7 yang menyatakan bahwa ada penggelembungan suara dari daftar pemilih khusus, pada TPS 2, TPS 6, TPS 7, TPS 12 Desa Pulo Sarok, Kecamatan Singkil, dimana seharusnya berjumlah 15 pemilih telah bertambah menjadi 108 pemilih. Maka dengan ini, Pihak Terkait menjelaskan bahwa tidak benar ada penggelembungan daftar pemilih khusus pada TPS-TPS tersebut, dimana jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sama dengan jumlah suara sah dan suara tidak sah pada TPS-TPS tersebut.

Bahwa Saksi Pemohon menandatangani C-1 dan tidak mengajukan keberatan pada TPS-TPS tersebut. Ini kita lampirkan dalam Bukti PT-Singkil 10 sampai dengan PT- Singkil 13.

901. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Jadi, tanda tangan, ya, saksi, ya?

902. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI (PDIP)

Ya, Yang Mulia.

Kemudian, terakit dengan dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa adanya pengguna hak pilih yang tidak terdaftar dalam DPK, namun menggunakan hak pilih di TPS 2 dan TPS 6 Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara. Dengan ini Pihak Terkait menerangkan sebagai berikut.

Bahwa pemilih khusus yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb dan namanya tidak ada dalam daftar, sehingga jumlahnya baru diketahui pada saat mengisi daftar hadir pemilih khusus, Form C-7 DPK KPU. Dimana sesuai ketentuan, pemilih khusus tersebut adalah pemilih yang menggunakan KTP yang beralamat di TPS setempat yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya, 1 jam sebelum pemungutan suara berakhir.

Kemudian juga, Saksi Pemohon menandatangani C-1 dan tidak mengajukan keberatan pada TPS-TPS tersebut. Ini juga kita lampirkan bukti, yaitu Bukti PT-Singkil 14 sampai dengan PT-Singkil 15.

903. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

14 sampai 15?

904. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI (PDIP)

15, Yang Mulia.

905. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

906. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI (PDIP)

Kemudian, ini kami mempertegas terkait dengan Petitum Pemohon yang meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang. Kami merujuk kepada ketentuan Pasal 372 Undang-Undang Pemilu juncto Pasal 65 PKPU Nomor 3 Tahun 2009 yang pada intinya mengatur tentang kondisi atau keadaan untuk dapat dilakukan (...)

907. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dilakukannya PSU, ya.

908. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI (PDIP)

Pemungutan suara ulang. Jadi, yang ingin kami tegaskan bahwa dari apa yang diuraikan oleh Pemohon itu, tidak terdapat 1 kondisi untuk ... 1 kondisi ataupun suatu keadaan untuk dapat dilakukan pemungutan suara ulang. Itu penegasan terkait dengan rujukan undang-undang, Yang Mulia.

909. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik.

910. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI (PDIP)

Kemudian Petitum, ya menolak (...)

911. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, dianggap dibacakanlah.

912. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI (PDIP)

Ya.

913. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya?

914. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI (PDIP)

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

915. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Jadi, tidak ada yang terakhir tadi, tidak ada kondisi yang harus diputus dengan melakukan PSU, ya?

916. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI (PDIP)

Ya, Yang Mulia.

917. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Karena tadi 7 orang itu juga memilih berdasarkan memang dia punya hak memilih di situ, gitu kan?

918. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI (PDIP)

Ya.

919. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Otomatis (...)

920. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI (PDIP)

Karena sudah memiliki KTP di situ, Yang Mulia.

921. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik.

Baik, terus sekarang selesai. Berarti Bawaslu, ada keterangan dari Bawaslu?

922. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Baik, Yang Mulia.

923. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang ringkas.

924. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Yang pertama, Yang Mulia. Ingin kami sampaikan bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Singkil Utara itu memang Saksi PKS menyampaikan keberatannya dan dituangkan dalam DA-2.

Kemudian, kita menerima laporan dari PKS atas nama Molida pada tanggal 2 Mei, ya, terkait ... terkait keberatannya pada saat rekap. Kemudian, terhadap laporan itu, ya, Panwaslih Aceh Singkil telah melakukan klarifikasi terhadap PPK, ya, kemudian KPPS dan sebagainya. Maka ditemukan beberapa fakta.

Yang pertama, terhadap dugaan adanya penduduk yang memilih di Telaga Bakti yang berasal dari luar provinsi. Itu pada awalnya ... pada awalnya mereka dating, mereka tidak terdaftar dalam DPT. Mereka datang ke TPS menggunakan KTP-el, kemudian meminta untuk bisa memilih. Kemudian oleh KPPS berkoordinasi dengan PPK, kemudian tanpa mengecek, melindungi hak pilih di website itu, kemudian diberikan untuk memilih. Kemudian, PPK baru mengetahui jika pemilih itu tidak terdaftar dalam DPK pada saat ... tapi memiliki NIK KTP-el DPT Sumatera Utara, itu pada saat rekap di tingkat kecamatan. Lalu, berdasarkan hasil klarifikasi Panwaslih Aceh Singkil, itu sebenarnya terdapat 28 orang yang tersebar menggunakan hak pilihnya di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 6 di Desa Telaga dan kesemuanya mereka adalah penduduk Desa Telaga Bakti, meskipun memiliki NIK Sumatera.

925. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

926. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Kemudian, perlu kami sampaikan juga terhadap yang disebut-sebutkan pada sidang yang lalu ada Saudara Ananda Arianti Gajah yang terdaftar dalam DPT TPS Biskang. Kemudian menggunakan hak pilih di Telaga Bakti. Kemudian Septian Triyono terdaftar DPT TPS 2 Kelurahan Perangusan Kecamatan Gunung Meriah, menggunakan hak pilih TPS Desa Telaga Bakti. Kemudian Sarno, teradapati ... terdaftar dalam DPT TPS 2 Kelurahan Tulaan Gunung Meriah ... Kecamatan Gunung Meriah menggunakan hak pilihnya di TPS Telaga Bakti. Nah, kesemua orang ini, dua ... tiga orang itu ... tiga orang tadi yang kami sebutkan namanya itu adalah termasuk 28 orang yang kita klarifikasi.

927. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

928. BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Kemudian, Nanda Arianti Gajah, Septian Triono, dan Sarno itu adalah penduduk yang memiliki KTP-el Desa Telaga Bakti. Dia tidak mengetahui terdaftar di TPS 1 Biskang, tidak mengetahui terdaftar di Danau Paris, dan juga tidak melakukan pemungutan suara di daerah yang kami sebutkan itu.

Kemudian, terkait dengan dalil adanya penggelembungan suara di Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil itu, bisa kami sampaikan bahwa pada saat rekapitulasi perhitungan tingkat kecamatan di Singkil ... di Pulo Sarok itu mengajukan keberatan karena jumlah pemilih DPK di seluruh TPS di Desa Pulo Sarok meminta agar PPK membuka kotak suara. Dan pada saat itu, PPK membukakan apa ... membukakan kotak suara dan diperiksa, hasilnya adalah jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPK dengan jumlah pengguna hak pilih itu sama. Jadi tidak ... berdasarkan itu bisa disimpulkan kalau tidak ada penggelembungan suara. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

929. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb.

Jadi tidak ada problem, ya, di situ, ya?

Baik. Ini kita sudah selesai Perkara Nomor 07-08-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Sekarang Perkara 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, permohonan dari Partai Aceh dengan PDIP dan Gerindra sebagai Pihak Terkait. Silakan, Termohon!

930. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb.

Itu yang mengenai tadi perkara dengan registrasi 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ini, Pemohonnya adalah Partai Aceh.

931. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

932. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Untuk DPRA Dapil IV dan Dapil II, Yang Mulia.

933. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang dipersoalkan Dapil IV (...)

934. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Dan DPRA Dapil II.

935. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dan Dapil II.

936. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Nah, setelah ... setelah kami mempelajari permohonan Pemohon itu.

937. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

938. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Ada empat hal yang ... yang ... yang dipersoalkan. Pertama, adanya penggelembungan suara untuk partai ... untuk Partai PDI Perjuangan karena perbedaan antara Form C-1 dengan Form DAS ... DAA-1 di 7 ps ... di 7 TPS di Kabupaten Aceh Tengah.

939. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

940. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Untuk mengenai hal ini, langsung saja barangkali, Yang Mulia. Kami sudah menjawab ... menanggapi secara rinci di halaman jawaban kami nomor 3 ... halaman 3 maaf.

941. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Halaman 3? Oke.

942. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Halaman 3 hanya mau rein ... renvoi, Yang Mulia. Di halaman 3 angka 1, vide buktinya tertulis T-003.

943. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

T-003.

944. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Seharusnya T-005.

945. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

946. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Kemudian dan ... dan seterusnya dan T-004, Yang Mulia, seharusnya T-006.

947. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

948. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Kemudian ... kemudian terdapat selisih sebanyak 11 suara antara Pemohon dengan PDI Perjuangan pada perolehan kursi keenam. Ini juga

sudah kami jawab ini, di halaman ... masih halaman 7. Hanya sekali, kami mohon renvoi.

949. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

950. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Videnya (...)

951. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Buktinya.

952. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Ada kesalahan tulis, Yang Mulia. Di halaman 3, angka 2. Dua baris terakhir, Yang Mulia.

953. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

954. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Harus ... di ... tertulis T-003 (...)

955. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Mestinya?

956. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Seharusnya T-005 Aceh dan seterusnya.

957. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

958. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Kemudian tertulis T-005, seharusnya T-007.

959. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

960. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Kemudian, terdapat perbedaan pengguna hak suara, dalil pemohon terhadap pengguna hak suara dalam C-7 dengan C-1, kemudian terdapat rekomendasi dan seterusnya. Hal ini sudah kami jawab juga, berkaitan dengan dalil Pemohon itu dari mulai angka 3 dan seterusnya. Sekali lagi, kami mohon diberi kesempatan untuk merenvoi, halaman 4 angka 3, Yang Mulia. Angka 3, dua baris terakhir, surat T-003 seharusnya T-005. Kemudian, baris terakhirnya Aceh IV, seharusnya Aceh VIII. Demikian pula di angka 4, Yang Mulia, tertulis 002 seharusnya 004. Kemudian masih di angka 4, tertulis 003 seharusnya 005.

961. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

962. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Kemudian di angka 5 masih berkaitan dengan ... berkaitan dengan dalil seolah-olah ada penambahan suara bagi PDIP, kami sudah menjelaskannya dalam halaman 4 angka 5. Kami mohon saja ada renvoi mengenai vide buktinya, itu tertulis paling ke ... angka 5 alinea ... garis kedua terbawah, tertulis Aceh IX ... IV, maaf, harusnya Aceh IX. Kemudian tertulis ang ... dan 00 ... tertulis 008 harusnya Aceh 0010. Demikian pula, Yang Mulia, dalil seolah-olah terdapat penambahan bagi suara PDI Perjuangan atas nama Caleg Nomor 4, Khairuddin. Kami sudah jelaskan di angka 6, sekali lagi kami mohon renvoi untuk vide buktinya. Tertulis 007 seharusnya 009, vide ... dan tertulis 009 seharusnya 011.

963. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

964. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Dan seterusnya, Yang Mulia. Kemudian (...)

965. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang dapil anu ... Dapil IV, ya?

966. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Dapil IV.

967. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang yang Dapil II?

968. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Sebentar. Dan semuanya sudah kami jelaskan dalam jawaban.

969. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

970. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Kemudian dalam Dapil Aceh II, Dapil Aceh II, adanya pengurangan suara Pemohon atas nama Bahtiar, itu sudah kami jelaskan di angka ... halaman 8, Yang Mulia.

971. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

972. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Maaf, Yang Mulia, ditambah lagi dengan di halaman 9 angka 15.

973. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Angka 15. Jadi, intinya itu kalau yang pertama tadi tidak ada angka penambahan.

974. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Tidak ada penambahan.

975. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Untuk yang Caleg PDIP, ya?

976. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Betul.

977. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kalau yang kedua ini, intinya tidak ada pengurangan?

978. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Betul, Yang Mulia.

979. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Untuk angka Pemohon, ya?

980. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Untuk Pemohon atas nama ca (...)

981. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Perolehan suara Pemohon, ya?

982. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Betul, betul.

983. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, konklusi dari itu (...)

984. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Sudah barang itu ... setelah itu, kami mohon agar Petitum kami sesuai dengan jawaban yang diajukan.

985. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, jadi apa yang sudah ditetapkan oleh Termohon adalah (...)

986. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Dianggap benar, Yang Mulia.

987. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu yang benar, ya?

988. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Benar. Demikian, Yang Mulia.
Wassalamualaikum wr. wb.

989. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Baik.
Terus ... sebentar, saya lihatnya. Untuk Pihak Terkait PDIP dulu.

990. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI (PDIP)

Terima kasih, Yang Mulia.
Untuk Dapil Aceh IV, ini kita menga ... ada mengajukan eksepsi.

991. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ada eksepsi.

992. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI (PDIP)

Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

Yang pertama, terkait dengan penjumlahan dimana Pemohon mengatakan ada penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 89 suara. Ini tidak sinkron dengan perolehan suara menurut Pemohon yang menyebutkan suara Pihak Terkait itu 12.623, 12.623 suara. Harusnya, kalau memang ada penambahan 89 suara, suara yang telah ditetapkan oleh Termohon itu untuk Pihak Terkait 12.702 dikurangi 89 suara menjadi 12.613 suara.

Kemudian, terkait dengan adanya penggabungan Petitem. Bahwa Pihak Terkait di satu sisi meminta agar Mahkamah menetapkan suara menurut Pemohon, baik untuk suara Pemohon, maupun suara Pihak Terkait. Namun, pada Petitem yang lain, Pemohon meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 1 dan TPS 2 Desa Oak, dimana kedua Petitem ini bukanlah bersifat alternatif. Jadi, merupakan ... Petitem ini merupakan Petitem yang bersifat kumulatif, sehingga menurut Pihak Terkait, ini mengakibatkan permohonan ini menjadi kabur.

Kemudian terkait ... masuk ke Pokok Permohonan. Terkait dengan dalil yang mengatakan ada 89 suara Pihak Terkait yang ditambahkan, Pemohon telah menguraikan di halaman 4 sampai dengan halaman 6.

993. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ini mengenai Pokok Permohonan, ya?

994. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI (PDIP)

Betul, Yang Mulia. Jadi, di masing-masing TPS dan juga kita sebutkan juga merujuk kepada bukti mana. Jadi, mulai dari halaman ... halaman 4. Yang pertama itu, suara Muhammad Ridwan pada TPS 01 Desa Pedekok, Kecamatan Pegasing sebanyak 10 suara. Itu tidak benar sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Ini kita ... kita ajukan Bukti PT-AcehIV-4, gitu. Ini telah kita uraikan sampai dengan masing-masing TPS-nya, Yang Mulia.

995. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

996. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI (PDIP)

Sampai dengan halaman 6.

997. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

998. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI (PDIP)

Kemudian, dalil yang lain terkait dengan adanya permintaan pemungutan suara, PSU, di 2 TPS sebagaimana yang tadi disebutkan, yaitu TPS 1 dan TPS 2 Desa Oak dikarenakan ada rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Linge yang diterbitkan pada tanggal 30 April 2019. Ini juga kita ajukan sebagai bukti.

Nah, terkait dengan dalil tersebut, Pihak Terkait menanggapi bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Pasal 372 Undang-Undang Pemilu juncto Pasal 65 PKPU yang mengatur secara rigid tentang situasi atau keadaan untuk dapat dilakukan pemungutan suara ulang.

999. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Tidak memenuhi syarat untuk diadakan pemilihan PSU, ya?

1000.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI (PDIP)

Ya. Nah, oleh karena itu, menurut Pihak Terkait, tindakan Termohon yang tidak melaksanakan rekomendasi itu adalah suatu tindakan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang. Karena rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwas Kecamatan Linge tersebut bertanggal 30 April, sementara PKPU dan undang-undang mengatur kapan waktu paling lama pelaksanaan PSU, yaitu 10 hari setelah pemungutan suara atau selambat-lambatnya itu adalah tanggal 27 April Tahun 2019. Jadi, menurut Pihak Terkait (...)

1001.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sudah lewat?

1002.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI (PDIP)

Tindakan Termohon yang tidak melaksanakan PSU sebagaimana yang dimintakan oleh ... oleh Panwas Kecamatan Linge adalah tindakan untuk melaksanakan undang-undang karena undang-undang telah memberi batasan yang jelas tentang keadaan untuk dapat dilaksanakan PSU dan kapan PSU itu bisa dilaksanakan.

1003.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

1004.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI (PDIP)

Kemudian Petitem. Eksepsi (...)

1005.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Dianggap dibacakanlah. Sudah, ya?

1006.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI (PDIP)

Oke. Terima kasih, Yang Mulia.

1007.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Eksepsinya kabur. Terus yang kedua, perolehan suara yang benar ya seperti yang Termohon itu, kan?

1008.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI (PDIP)

Ya. Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

1009.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. sekarang Partai Gerindra.

1010.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAHRONI (GERINDRA)

Terima kasih, Yang Mulia.

1011.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

1012.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAHRONI (GERINDRA)

Untuk Pihak Terkait Partai Gerindra. Sehubungan dengan permohonan Pemohon dari Partai Aceh, kami mengajukan juga eksepsi, yaitu permohonan tidak jelas. Hal ini karena Pemohon dalam permohonannya mendalilkan untuk perolehan suaranya di beberapa TPS. Di Dapil II Aceh, meliputi Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya berkurang sebesar 5.300 suara. Namun, dalil tersebut tidak disandingkan atau tidak disertai dengan bukti sebagai satu persandingan terhadap Model DB-1 dari perolehan suara Termohon, yaitu berupa C-1, DAA-1 ataupun DB-1 yang mana sebagai bukti yang seharusnya untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon.

Kemudian yang kedua. Bahwa Pemohon sama sekali tidak menuangkan atau memaparkan bukti persandingan sebagaimana yang disampaikan di dalam tabel perolehannya. Sehingga menurut Pihak Terkait, dasar Pemohon tersebut tanpa mencantumkan perolehannya

menjadi jelas tidak kabur, artinya menjadi jelas kabur. Kemudian atas ketidakjelasan tersebut pada tabel yang disampaikan dikarenakan oleh karena tidak sesuai atau tidak ada kesesuaian di antara tabel yang satunya, maka permohonan yang disampaikan sebagaimana yang Model DB1-DPRA sejumlah 23 ... 29.300, padahal yang diperolehnya adalah ... oleh Pemohon menurut DB1-DPRA adalah sebenarnya 29.335. Namun, perolehan tersebut menurut Pemohon yang sejumlah 51.781 ini tidak didapatkan angka perolehannya yang dari mana, sehingga tidak jelas terkait dengan apa yang didalilkan.

Kemudian yang keempat. Oleh karena dasar Pemohon yang mencantumkan perolehan tersebut menjadi kabur dikarenakan ada ketidaksesuaian di dalam jumlah penghitungan, maka menurut Terkait ... Pihak Terkait bahwa Mahkamah Konstitusi sekiranya menerima eksepsi dari Pihak Terkait.

Kemudian Pokok Permohonannya. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana mengenai adanya perselisihan suara dalam perolehan suara pengisi ... untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi, DPRA Provinsi Daerah ... Aceh Daerah, meliputi pemilihan Dapil II, sebagaimana di dalam dalil-dalil Pemohon adalah berdasarkan fakta dan data yang keliru, sehingga tidak benar.

Oleh karenanya rekapitulasi perhitungan suara hasil pemilihan umum yang nyatanya telah dilakukan secara seksama dan diketahui, diperiksa, disetujui, serta dituangkan secara bersama-sama yang disaksikan ... yang disaksikan oleh para saksi dari setiap partai Peserta Pemilu adalah secara berjenjang, dari mulai tingkat TPS, tingkat kecamatan, tingkat Kabupaten, tingkat provinsi, dan seterusnya adalah secara benar.

Oleh karena itu, Pemohon yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran pemilu sebagaimana di dalam didalilkan, namun Pemohon sendiri tidak dapat menunjukkan atau dapat membuktikan telah melakukan upaya keberatan sebagaimana yang telah ditentukan, sehingga apa yang didalilkan telah terjadi pelanggaran pemilu, merupakan asumsi semata dari Pemohon.

1013.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Jadi, tidak dilakukan keberatannya secara bertingkat itu, ya?

1014.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAHRONI (GERINDRA)

Ya.

1015.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

1016.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAHRONI (GERINDRA)

Bahwa oleh karena Pemohon tidak menggunakan tabel-tabel perolehan suaranya di dalam perolehannya tersebut dengan dasar persandingannya, maka adapun atas hal tersebut, Pihak Terkait tentu saja menolak dan membantahnya. Oleh karena Pemohon tersebut mendalilkan dalil-dalil data berdasarkan data dan fakta yang keliru. Bahwa oleh karena berdasarkan rekapitulasi permohonan suara untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh II yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Termohon terhadap Pemohon, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi DPRA ... Provinsi Aceh Daerah Pemilihan Dapil II bersangkutan paut dengan Pihak Terkait, yang mana untuk Model DB1-DPRA a quo agar supaya ditetapkan dan disahkan adalah sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku. Maka, Pihak Terkait dalam hal ini tetap merujuk dan mendasarkan pada hasil rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan (...)

1017.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang dilakukan Termohon, ya.

1018.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAHRONI (GERINDRA)

Oleh Termohon.

1019.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Petitumnya dianggap dibacakan, ya?

1020.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAHRONI (GERINDRA)

Petitumnya, kami anggap dibacakan. Terima kasih, Majelis.

1021.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih.

Sekarang Bawaslu. Yang berkenaan dengan ... langsung saja, to the point. Kronologisnya kan sudah ada di dalam ... anu ... jawaban ...

keterangan Bawaslu. Jadi, di situ disinggung ada ... apa tadi ... rekap, ya? Betul kan rekap berjenjang, tidak ada keberatan, begitu?

1022.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Baik, Yang Mulia.
Untuk ... terhadap ada ... ada dugaan penambahan perolehan suara untuk Partai PDI ini.

1023.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

He eh.

1024.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Kami sudah jawabkan di halaman 100 ... eh di halaman 13.

1025.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

1026.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Kemudian pada pokoknya, terjadi pengoreksian perolehan suara atas nama PDI, ya.

1027.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

He eh.

1028.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Kemudian (...)

1029.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pengoreksian itu terjadi di mana? Di rekap mana?

1030.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Saat rekap ... saat rekap di tingkat TPS di Desa Pedekok, Kecamatan Pegasing, ya.

1031.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

1032.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Dilakukan pembukaan C plano.

1033.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, ya.

1034.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Dan melakukan pembetulan kesalahan penjumlahan perolehan ... perolehan pada C1-DPRA untuk perolehan suara atas nama Muhamad Ridwan, Partai PDI. Yang semula tertulis 1, dikoreksi, setelah dibuka C-1 plano menjadi 11 suara.

1035.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

1036.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Kemudian di Desa Jejem, Kecamatan Pegasing juga PPK membuka C plano, membetulkan kesalahan penjumlahan perolehan suara pada C1-DPRA untuk perolehan suara atas nama Yunia Sofiasli dari Partai PDI Perjuangan, yang semula tertulis 0, dikoreksi menjadi 10 suara.

Kemudian pada saat rekapitulasi perhitungan suara di TPS 3 Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, dibukakan juga C plano, mengoreksi jumlah perolehan suara atas nama Muhammad Ridwan dari Partai PDI Perjuangan yang semula tertulis 2 suara, dikoreksi menjadi 12 suara.

Kemudian ... kemudian di TPS 1 Burni Bius, Kecamatan Silih Nara juga demikian, dibukakan C plano, mengoreksi jumlah perolehan suara pada (...)

1037.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, jadi begini saja. Kesimpulannya (...)

1038.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Pengoreksian.

1039.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ada pengoreksian dan pengoreksian itu akhirnya itulah yang benar, begitu, ya?

1040.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Ya. setelah dibukakan C plano.

1041.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, setelah dicek di C-1 plano, ya?

1042.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Ya.

1043.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terus itu secara lengkap sudah ada di dalam keterangan Pihak Bawaslu, ya? baik.

1044.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Ya. Kemudian terkait dengan ... dengan hoax. Yang perlu kami sampaikan di sini. Yang pertama, kita sudah menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran pidana, ya. Kemudian pada rapat pembahasan kedua, Gakkumdu, ya, yang dituduhkan Saudara Mulyadi, Ismail Samarnawan, Rasidin dan Mulyadi, Samsul A, itu yang dituduh memilih menggunakan C-6 milik anaknya, itu tidak terbukti.

1045.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

1046.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Kemudian pada rapat pembahasan kedua itu, perkaranya ditutup.

1047.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

1048.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Kemudian, kami juga perlu sampaikan terkait apa yang disampaikan oleh Pihak Terkait bahwa terhadap rekomendasi Panwaslu Kecamatan Oak itu di Desa Oak, maaf.

1049.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

1050.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Itu Panwaslu Provinsi Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 20 telah menerbitkan putusan pelanggaran kode etik, ad hoc, terhadap ... maaf ... terhadap rekomendasi panwaslih ... rekomendasi pemungutan suara ulang itu. Terima kasih.

1051.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. baik. Ini sampai di mana prosesnya pelanggaran etik ini?

1052.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Su ... sudah ... sudah selesai, Pak.

1053.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sudah selesai, ya?

1054.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Sudah.

1055.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Baik. Cukup, ya? Terima kasih.
Sekarang yang berikutnya, Perkara 89-16-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ini Pemohonnya adalah perorangan, dari partai ... mana ini? Disebutkan enggak ini? Pak Said Mustajad.

1056.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Partai Sira, siap.

1057.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dari Partai Sira, ya?

1058.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Partai Sira.

1059.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Silakan, Termohon!

1060.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

1061.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ini dipersoalkan di dapil mana ini?

1062.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Dapil Nagan Raya I, Yang Mulia.

1063.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dapil Nagan Raya I, baik. Perseorangan. Ini Pak Mustajab ini Partai Sira, ya?

1064.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Partai Sira.

1065.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Caleg nomor?

1066.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Nomor urut 1, Yang Mulia.

1067.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nomor urut 1. He eh. Apa yang dipersoalkan Pemohon dan kemudian apa yang (...)

1068.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Mohon maaf, Caleg nomor urut 2, Yang Mulia.

1069.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Gimana?

1070.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Nomor urut 2.

1071.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Caleg nomor urut 2.
Dia mempersoalkan perolehan suara Caleg Nomor?

1072.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Pemohon sendiri, Yang Mulia. Nomor urutnya dia sendiri kemudian ada dugaan dikurangi di 4 kecamatan (...)

1073.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Jadi dia merasa bahwa perolehan suaranya dikurangi, begitu?

1074.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Dikurangi dan dialihkan kepada caleg partai lain ... partai yang sama, nomor urut berbeda.

1075.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Partai yang sama tapi dia tidak tahu kepada siapa?

1076.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Disebutkan di sini Caleg Cut Alila, Sulaiman, dan Meilis Vasniati.

1077.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke, kepada caleg lain?

1078.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Caleg lainnya dalam ada yang sama.

1079.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Perolehan dari Pemohon ini berapa perolehan suaranya?

1080.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Perolehan partai, untuk atas nama Pak Said Mustajab 1.255, Yang Mulia.

1081.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

1.255. Urut-urutannya gimana coba? Saudara ada tabelnya di situ?

1082.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Ada tabelnya, Yang Mulia.

1083.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sudah di ... anu ... dibuat tabel, ya?

1084.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Ya, dibuat tabel.

1085.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tabel di halaman berapa? Halaman 7?

1086.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Ya.

1087.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Kemudian kenapa dia ... dikurangi betul enggak, menurut ...
anu ... dalil-dalil Pemohon bahwa suaranya dikurangi?

1088.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Tidak benar, Yang Mulia.

1089.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tidak benar. Yang benar menurut Termohon gimana itu?

1090.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Yang benar adalah yang sesuai dengan data milik Termohon. Baik
itu mulai dari DA-1 sampai DB-1 (...)

1091.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu konsisten, ya?

1092.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Konsisten, Yang Mulia.

1093.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Mulai dari C-1 Planonya kemudian DAA-1 sampai kemudian
terakhir rekap itu sudah konsisten?

1094.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Benar, Yang Mulia.

1095.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada perubahan-perubahan?

1096.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Tidak ada, Yang Mulia.

1097.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada keberatan dari siapapun di sini?

1098.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Saksi dari Partai Sira ikut menandatangani pada saat proses rekapitulasi (...)

1099.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke, Partai Sira juga sudah tanda tangan.
Oke, ada lagi yang akan disampaikan?

1100.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Cukup, Yang Mulia.

1101.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Cukup ya, ini. Pihak Terkaitnya tidak ada.
Ada persoalan Bawaslu? Untuk ini? Pak Said Mustajab ini? Atau tidak ada sama sekali?

1102.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Ya, terima kasih Yang Mulia. Kami telah menjawab terkait keterangan Panwaslih Pak Mustajab ini.

1103.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

1104.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Dengan menyajikan data C-1 yang dimiliki oleh Panwaslih berdasarkan beberapa kecamatan yang dipersoalkan.

1105.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

1106.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Kami kira demikian.

1107.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu saja, ya?

1108.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Ya.

1109.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Data yang dipunyai oleh Bawaslu sama dengan datanya Termohon?

1110.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Data yang kami terima itu adalah data dari Termohon.

1111.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Data dari Termohon, kan?

1112.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Ya.

1113.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi enggak ada perubahan sama sekali, ya? Persis sama, ya?

1114.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Ya.

1115.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Ya. Cukup ini. Terima kasih.

Sekarang untuk, Perkara 185-18-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Dimohonkan oleh Partai Nanggroe Aceh. Pihak Terkaitnya Partai Daerah Aceh. Ini 185-18-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Oh, ini urutan-urutan ini menyusunnya salah ini. Sebentar, cari dulu. Prof. Enny, sudah siap? Silakan, Bu! Satu dulu saja saya carinya, Bu.

1116.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini yang 185-18-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya ini. Perbaiki jawaban yang tanggal 10 Juli yang dipakai, ya?

Ya ini dalilnya terkait dengan Aceh VI saja, ya?

1117.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM HADI WIBOWO

Aceh VI, betul Majelis.

1118.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Aceh VI saja, ya, silakan!

Ini bagaimana jawaban dari Pihak Termohon?

1119.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM HADI WIBOWO

Baik, terima kasih Majelis.

Jadi kami ... dalam jawaban ini kami juga melampirkan kronologis yang disampaikan oleh KIP Aceh yang sudah kami ajukan juga sebagai bukti dengan kode bukti T-003-AcehVI-PNA dan seterusnya, Majelis.

1120.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kode buktinya T-003?

1121.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM HADI WIBOWO

T-003-AcehVI-PNA.

1122.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

1123.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM HADI WIBOWO

Baik, pertama. Untuk eksepsi Majelis.

1124.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Eksepsinya gimana?

1125.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM HADI WIBOWO

Menurut kami permohonan dari Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan. Karena permohonan Pemohon tidak menguraikan secara jelas di dalam Posita maupun Petitumnya mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon. Hal ini misalnya terlihat pada dalil permohonan Pemohon yang terdiri dari, pertama dalil Pemohon mengenai pengurangan jumlah perolehan suara Partai Nanggroe Aceh, atau PNA, atau Pemohon. Pemohon hanya menyebutkan bahwa perolehan suara Pemohon di Kecamatan Peureulak Timur berkurang 182 suara dari 957 suara menjadi 775 suara. Tapi Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai dari mana hilangnya suara Pemohon. Apakah dari suara partai atau suara caleg partai.

1126.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

1127.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM HADI WIBOWO

Pemohon juga tidak menjelaskan di lokasi TPS mana saja suara Pemohon dikurangi.

Selain itu, apabila Pemohon mendalilkan adanya perolehan suara Pemohon maka seharusnya berdampak juga pada penambahan suara kepada partai lain. Karena jika tidak demikian maka akan terdapat perbedaan total suara sah dengan total perolehan suara untuk masing-masing partai.

1128.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

1129.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM HADI WIBOWO

Kemudian dalil Pemohon mengenai penambahan atau penggelembungan jumlah suara Partai Daerah Aceh. Menurut Termohon, Pemohon juga hanya mendalilkan penambahan jumlah suara bagi Partai Daerah Aceh di 5 kecamatan, sebanyak 42 suara.

1130.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

42 suara itu, ya?

1131.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM HADI WIBOWO

Ya.

1132.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

1133.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM HADI WIBOWO

Tapi Pemohon tidak menyebutkan perubahan suara tersebut berasal dari mana dan Pemohon tidak menyebutkan apakah ada perubahan atau tidak pada suara partai atau caleg partai nomor tertentu. Pemohon juga tidak menjelaskan di lokasi TPS mana saja penambahan atau penggelembungan suara Partai Daerah Aceh.

1134.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, ini yang ... kalau dari Termohon, suara yang benarnya ada tabel ... dalam tabel mana?

1135.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM HADI WIBOWO

Ada, ada, Majelis.

1136.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ada?

1137.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM HADI WIBOWO

Ada, nanti di bagian Pokok Perkara, Majelis.

1138.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

1139.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM HADI WIBOWO

Baik, kami lanjutkan (...)

1140.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Masih ada lagi yang penggelembungan?

1141.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM HADI WIBOWO

Ya?

1142.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Masih ada lagi yang terkait penggelembungan?

1143.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM HADI WIBOWO

Sudah. Jadi, berdasarkan uraian di atas, menurut kami, permohonan dari Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan karena tidak menguraikan secara jelas di dalam Posita maupun Petitumnya mengenai kesalahan hasil penghitungan suara.

1144.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Kemudian dari Termohon tadi yang saya tanyakan suaranya yang ben ... yang kemudian benar, seperti apa? Ada di sini?

1145.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM HADI WIBOWO

Ada di (...)

1146.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di halaman 7 ini, ya?

1147.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM HADI WIBOWO

Ya.

1148.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini sudah menyangdingkan C-1 dengan DA-1 nya, ya?

1149.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM HADI WIBOWO

Sudah, Majelis.

1150.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Kemudian, sampai ke Petitum berarti?

1151.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM HADI WIBOWO

Sekarang Pokok Perkara, Majelis.

1152.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, ya. Pokoknya.

1153.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM HADI WIBOWO

Ya.

1154.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Silakan!

1155.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM HADI WIBOWO

Pokok Perkara. Pertama, mengenai tidak ada pengurangan suara Pemohon. Di dalam permohonannya, Pemohon menyebutkan jumlah suara Pemohon di Kecamatan Peureulak Timur ber ... berjumlah 957 suara. Dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Karena berdasarkan data yang kami miliki, jumlah suara Pemohon, berdasarkan Formulir Model DA1-DPRA Peureulak Timur bukan 957 suara, tetapi 775 suara.

1156.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

775, ya?

1157.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM HADI WIBOWO

Betul.

1158.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

775. Ini halaman 6, ya?

1159.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM HADI WIBOWO

Ya, di tabel di halaman 5 dan 6 dari jawaban poin 12.

1160.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

1161.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM HADI WIBOWO

Kemudian, di tingkat rekap (...)

1162.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di tingkat provinsi?

1163.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM HADI WIBOWO

Di tingkat kabupaten juga ... masih tetap juga, Majelis.

1164.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sama, ya.

1165.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM HADI WIBOWO

775 suara. Berdasarkan Form DB1-DPRA Aceh Timur. Sudah kami jadikan bukti juga, yaitu bukti T-004-Aceh VI dan seterusnya.

1166.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Ini yang kabupaten tadi, ya?

1167.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM HADI WIBOWO

Yang kabupaten.

1168.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

1169.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM HADI WIBOWO

Berlanjut ke tingkat provinsi. Kami juga masih tetap ber ... berpedoman pada jumlah suara Pemohon berdasarkan data DA-1 yang ada di kami.

1170.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

1171.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM HADI WIBOWO

Sehingga jumlah suara Pemohon di tingkat kabupaten ... maaf, ya, suara tingkat ... suara Pemohon di tingkat kabupaten pada rekap provinsi berjumlah 13.788 suara.

1172.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

13.788 suara, Pemohonnya 13.970 ini?

1173.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM HADI WIBOWO

Betul, Majelis.

1174.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, buktinya T-002, ya?

1175.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM HADI WIBOWO

Buktinya T-002.

1176.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

1177.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM HADI WIBOWO

Itu mengenai tidak adanya pengurangan suara Pemohon. Kemudian, mengenai dalil tidak adanya penggelembungan suara untuk Partai Daerah Aceh, sudah kami buat tabel persandingan di halaman 7, dalil 16, jawaban.

1178.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

1179.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM HADI WIBOWO

Di situ terlihat bahwa sebenarnya tidak ada penggelembungan atau penambahan. Yang ada justru suara Partai Daerah Aceh kami ... kami koreksi.

1180.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Koreksinya seperti apa koreksinya?

1181.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM HADI WIBOWO

Koreksi ... kalau dari C-1 dan D-1, C-1 nya lebih 3 suara, Majelis. Jadi, kami menggunakan di DA-1 jadi dikurangi 3 suara.

1182.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, ada kelebihan 3 suara, ya.

1183.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM HADI WIBOWO

Ya, itu sudah kami koreksi di DA-1.

1184.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu suara siapa itu?

1185.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM HADI WIBOWO

PDA, Partai Daerah Aceh.

1186.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

PDA-nya, ya?

1187.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM HADI WIBOWO

Betul. Jadi, kalau di ... dikaitkan dengan dalil-dalil Pemohon, tidak ada penggelembungan, justru malah ada pengoreksian.

1188.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ada penam ... ya.

1189.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM HADI WIBOWO

Jumlah Partai Daerah Aceh.
Kemudian, yang ketiga, dalil mengenai putusan Panwaslih Aceh. Panwaslih Aceh, putusan Panwaslih Aceh ini juga sudah ditindaklanjuti oleh KIP Aceh Timur.

1190.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

1191.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM HADI WIBOWO

Dengan melakukan pencermatan.

1192.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pencermatan tadi bentuknya koreksi itu, ya?

1193.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM HADI WIBOWO

Ini beda ... ya, beda lagi, Majelis.

1194.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Beda lagi?

1195.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM HADI WIBOWO

Beda lagi. Jadi, kalau boleh kami uraikan, seperti ini kira-kira, latar belakangnya adalah Pemohon mengajukan keberatan pada saat rekap penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten.

1196.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

1197.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM HADI WIBOWO

Kemudian, Saksi Pemohon melapor pada Panwaslih Aceh, sehingga Panwaslih Aceh mengeluarkan Putusan Nomor 001/LP dan seterusnya tertanggal 22 Mei 2019.

1198.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

1199.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM HADI WIBOWO

Yang salah satunya memerintahkan KIP Aceh Timur untuk mencermati tata cara prosedur.

1200.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Prosedur.

1201.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM HADI WIBOWO

Rekapitulasi sesuai dengan tingkatannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

1202.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

1203.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM HADI WIBOWO

Atas putusan tersebut, KIP Aceh Timur lalu mengeluarkan Surat Nomor 658 dan seterusnya tertanggal 25 Mei 2019. Berikut Berita Acara Nomor 42 dan seterusnya, Perihal Tindak Lanjut Putusan Panwasli Provinsi Aceh.

1204.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, kemudian hasilnya?

1205.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM HADI WIBOWO

Hasilnya memang setelah pencermatan, ada angka 480 ... 890 suara.

1206.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini ... ini yang dicermati itu antara apa dengan apa ini? Yang dimaksud dengan pencermatan di sini?

1207.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM HADI WIBOWO

Di tingkat kecamatan, Majelis. DA-1, Majelis.

1208.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

DA-1 nya yang dicermati?

1209.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM HADI WIBOWO

Ya. Nah (...)

1210.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

1211.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM HADI WIBOWO

Tapi, berdasarkan hasil pencermatan tersebut, kami tidak bisa ... tidak bisa mengubah hasil pleno karena putusan dari ba ... panwaslih saja itu sudah dikeluarkan pada tanggal 22 Mei 2019 atau 1 hari setelah dilakukannya rekap hasil penghitungan suara tingkat nasional.

1212.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terus, kemudian hasil pencermatan digunakan untuk apa?

1213.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM HADI WIBOWO

Belum bisa, Majelis.

1214.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Masih tetap seperti itu, ya?

1215.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM HADI WIBOWO

Ya.

1216.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, ini buktinya apa untuk yang ini, terkait dengan pencermatan ini?

1217.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM HADI WIBOWO

Itu bukti T-008.

1218.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

T-008?

1219.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM HADI WIBOWO

Ya.

1220.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, masih ada lagi?

1221.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM HADI WIBOWO

Sudah cukup, Majelis.

1222.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, saya kira Petitumnya dianggap dibacakan, ya?

1223.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM HADI WIBOWO

Ya.

1224.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, kalau begitu. Kemudian ke pihak ... ini Pihak Terkaitnya ada? Partai Daerah Aceh, ya?

1225.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 185-18-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHARRAMSYAH (PNA)

Ada, Majelis.

1226.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Silakan, Pihak Terkait menanggapi hal itu. Sama dengan Termohon, ya.

1227.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 185-18-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHARRAMSYAH (PNA)

Ya. Assalamualaikum wr. wb.

1228.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Walaikumsalam wr. wb.

1229.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 185-18-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHARRAMSYAH (PNA)

Secara garis besar sama dengan Termohon, Majelis. Tetapi, ada beberapa hal yang perlu kami tegaskan. Yang pertama, menyangkut

dalam hal eksepsi, menyangkut dengan obscur libel itu sama dengan Termohon sendiri.

1230.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

1231.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 185-18-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHARRAMSYAH (PNA)

Tetapi, ada eksepsi kami tentang Kewenangan Mahkamah sendiri, menyangkut dengan apakah berwenang dalam hal mengadili perkara ini atau tidak ... permohonan ini atau tidak? Yaitu, bagi kami sebagai Pihak Terkait melihat bahwa karena bukti utama yang diajukan oleh Pihak Pemohon itu adalah tentang Keputusan Panwaslih Aceh Nomor 001 dan seterusnya, itu menyangkut dengan pelanggaran administratif pemilu, jadi kami melihat sesuai dengan Pasal 470 Undang-Undang Nomor 7.

1232.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, ini sama tadi, ya, masalah administratif pemilu, ya?

1233.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 185-18-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHARRAMSYAH (PNA)

Oke. Ya, sama, Majelis.

1234.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Untuk eksepsinya itu.

1235.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 185-18-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHARRAMSYAH (PNA)

Ya, baik, Majelis.

1236.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian yang tadi pengurangan?

1237.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 185-18-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHARRAMSYAH (PNA)

Tentang ... ke Pokok Permohonan.

1238.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

1239.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 185-18-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHARRAMSYAH (PNA)

Secara garis besar juga sama dengan Pihak Termohon. Tetapi, ada yang perlu kami tegaskan juga menyangkut dengan hasil verifikasi dan validasi data dan rekapitulasi perhitungan suara berjenjang yang didasari pada hasil perhitungan suara di TPS yang tertuang dalam Form C1-DPRA Kecamatan Peureulak Timur, Majelis.

1240.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

1241.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 185-18-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHARRAMSYAH (PNA)

Bagi kami sebenarnya mak ... tidak ada pengurangan perolehan suara di Kecamatan Peureulak Timur, justru yang ada adalah penambahan suara untuk Pemohon sebanyak 23 suara.

1242.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi ada penambahan 23 suara tadi ya yang disampaikan tadi, ya? Bukan pengurangan?

1243.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 185-18-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHARRAMSYAH (PNA)

Ya.

1244.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

1245.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 185-18-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHARRAMSYAH (PNA)

Sehingga, patut diduga perolehan suara yang didalihkan Pemohon sebanyak 957 suara tersebut di Kecamatan Peureulak Timur yang terdapat pada DA1-DPRA versinya Pemohon, Majelis.

1246.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

1247.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 185-18-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHARRAMSYAH (PNA)

Yang menjadi rujukan Pemohon adalah adanya pengurangan suara adalah hasil tidak resmi atau bagi kami, kami sebutkan ini adalah DA1-DPRA bodong, Majelis.

1248.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, monggo, silakan.

1249.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 185-18-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHARRAMSYAH (PNA)

Ya. Dan itu perlu kami tegaskan, Majelis. Yang lainnya sama dengan (...)

1250.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi hanya soal ini saja, ya?

1251.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 185-18-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHARRAMSYAH (PNA)

Ya.

1252.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Justru ada penambahan 23 suara itu.

1253.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 185-18-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHARRAMSYAH (PNA)

Benar, Majelis.

1254.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Selebihnya tidak ada lagi ya, tambahan, ya?

1255.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 185-18-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHARRAMSYAH (PNA)

Ya.

1256.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik.

1257.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 185-18-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHARRAMSYAH (PNA)

Petitumnya dianggap dibacakan.

1258.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Baik, kemudian hanya satu saja yang ter ... Pihak Terkaitnya. Kemudian Bawaslu, ada catatan dari Bawaslu?

1259.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Untuk ... untuk perkara ini, kami bisa sampaikan. Yang pertama, setidaknya ada (...)

1260.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini di halaman 13, ya, Pak, ya?

1261.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Ya. Setidaknya ada 3 versi.

1262.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Versinya apa saja, Pak?

1263.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Yang pertama versi DA-1 sejumlah 9.507.

1264.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

9.507, ya?

1265.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Maaf, 957, ya, 957. Itu adalah versi yang ditetapkan pada saat rekap ... eh, maaf, itu adalah versi yang di ... dibacakan oleh PPK pada saat rekap.

1266.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini direkap PPK, ya?

1267.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Direkap ... direkap (...)

1268.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

1269.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Peureulak Timur.

1270.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, itu versi pertama.

1271.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Ya. Kemudian, versi yang kedua, itu sejumlah 775, itu adalah (...)

1272.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Versi kedua, 775 suara.

1273.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Ya. Itu adalah vers (...)

1274.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu dasarnya adalah?

1275.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Versi yang penetapan pimpinan sidang rekap pada saat itu di tingkat kabupaten.

1276.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini yang di tingkat kabupaten, ya?

1277.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Ya.

1278.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini menggunakan DA itu, ya.

1279.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Ya. Kemudian, satu versi lagi rekap yang berjumlah 888. Ini adalah rekap tingkat kecamatan yang diterima oleh panwaslih kecamatan disampaikan kepada panwaslu kabupaten dan angka ini adalah angka yang terungkap pada saat dibukakan kotak suara, tetapi tidak (...)

1280.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kapan itu dibuka kotak suaranya, Pak? Dijelaskan di sini, Pak.

1281.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Baik. Pada saat ... pada saat rekap di tingkat kabupaten, itu karena terjadi chaos dan ... apa ... akhirnya ... pimpinan sidang memutuskan untuk membuka kotak suara.

1282.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu di tingkat kabupaten ada ... ada, ya semacam chaos, begitu?

1283.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Ya, semacam keributan.

1284.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

1285.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Perdebatan sengit, gitu, akhirnya diambil kesimpulan untuk membuka kotak suara. Dan pada saat pembukaan kotak suara itu, jumlah ... jumlah perolehan suara untuk PNA, maaf, atas nama Ruslan itu (...)

1286.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ruslan Razali.

1287.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Sebanyak 888. Tetapi karena pada saat itu KIP tidak memutuskan angka yang disebutkan di kotak dengan pertimbangan KPI itu adalah banyaknya angka yang ... rekap yang menyebutkan angka 775, maka kemudian diputuskan 775. Kemudian benar pelapor ... maaf, Roeslan Abdul Gani ... Roeslan ini kemudian menyampaikan laporannya kepada panwaslih dan panwaslih telah me ... memutuskan dan di dalam keputusan-keputusan Bawaslu itu karena pada saat itu sudah selesai proses penetapan dan tidak ada kewenangan panwaslih untuk menetapkan apa namanya ... perolehan suara yang mana yang paling tepat, maka kami memintakan kepada KIP Aceh Timur untuk melakukan pencermatan.

1288.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Pencermatan itu dilakukan kapan, Pak?

1289.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Termohon, tadi.

1290.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sama dengan Termohon tadi, ya?

1291.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Kemudian, juga perlu kami sampaikan bahwa di dalam ... di dalam ... sudah terungkap juga di dalam keterangan ini bahwa angka ... bahwa rekapitulasi angka 957 itu adalah rekapitulasi diubah di luar ... di luar pleno rekap kecamatan berdasarkan (...)

1292.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Coba, coba ulangi lagi yang itu, 957 tadi.

1293.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Bahwa rekapitulasi sejumlah DA-1 perolehan suara untuk PNA yang berjumlah 9 ... 957.

1294.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

957.

1295.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Adalah itu rekap yang diubah pada saat setelah rekap di tingkat kecamatan berdasarkan laporan berdasarkan ... ketua PPK mengubahnya ber ... berdasarkan laporan atau sanggahan keberatan dari beberapa orang yang termasuk di dalamnya nomor urut di dalam Partai PNA. Dan itu diakui oleh ketua PPK bahwa dia mengubah di luar rekap kabupaten ... di luar rekap kecamatan, maaf.

1296.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

1297.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Kami kira, gitu. Terima kasih.

1298.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian yang tanda tangan, siapa saja? Saksi datang semua ini pada saat itu? Ada saksinya?

1299.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Tidak ada.

1300.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak dijelaskan di sini?

1301.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Tidak ada saksi, yang ada (...)

1302.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ketika ada perubahan rekap itu?

1303.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Tidak ada saksi, yang ada adalah ketua rek ... kecamatan itu menyampaikan hasil perubahannya itu kepada ... menyampaikan langsung kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Timur. Oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur menerimanya dan melihat ternyata ada perbedaan, tetapi Panwaslih Kabupaten Aceh Timur tetap berpegang pada rekapitulasi yang diberikan oleh panwaslih pada saat ... pada saat Pleno Rekap Kecamatan Peurlak Timur.

1304.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, ya, baik. Masih ada lagi, Pak? Itu saja, ya?

1305.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Ya.

1306.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Kalau tidak ada, selesai untuk yang Perkara Nomor 185-18-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

1307.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kita mulai lagi yang Perkara Nomor 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Jadi, Permohonan Partai Persatuan Pembangunan.
Ya, silakan Termohon?

1308.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Siap, terima kasih, Yang Mulia. Jawaban PPP, perbaikan.

1309.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu tolong dimatikan, miknya! Ya, supaya enggak ... anu. Siapa yang akan menyampaikan?

1310.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Saya, Yang Mulia.

1311.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Silakan.

1312.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Ya, jadi Permohonan PPP ini ada 3 dapil, Yang Mulia. Yang pertama, Dapil Kota Sabang I. Dua, Dapil Kabupaten Aceh Besar V. Yang ketiga, Kabupaten Aceh Tengah II.

1313.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Aceh Besar V, kemudian Aceh Tengah?

1314.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Aceh Tengah II.

1315.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Aceh Tengah II. Ya, oke. Kita satu per satu. Untuk Sabang V dulu.

1316.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Siap.

1317.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ada eksepsi?

1318.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Tidak ada, Yang Mulia.

1319.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada. Baik, langsung Sabang V.

1320.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Siap. Di Dapil Kota Sabang I, Pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara partai sebanyak 4 suara dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang sebanyak 34 suara di 8 TPS, Yang Mulia.

1321.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Gimana menurut Termohon?

1322.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Menurut Termohon, hal itu tidak benar, Yang Mulia.

1323.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tidak benar. He eh, tidak benar. Ini langsung masuk ke Pokok Permohonan, tidak benar. Yang benar gimana menurut Termohon?

1324.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Yang benar memang suara Pemohon adalah 465, sedangkan PBB 472.

1325.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, lebih banyak PBB, ya?

1326.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Lebih banyak PBB, Yang Mulia.

1327.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terus? Hanya ini yang dipersoalkan?

1328.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Yang dipersoalkan hanya itu, Yang Mulia.

1329.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Untuk Sabang I, ya?

1330.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Di 8 TPS.

1331.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu ditunjukkan dengan bukti berapa? T berapa itu?

1332.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Untuk T-nya, kita T-06, Yang Mulia.

1333.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

T-06?

1334.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Ya.

1335.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Jadi yang benar menurut Saudara, tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan, tapi suaranya yang benar, perolehan suara Pemohon PPP 465, sedangkan suara PBB?

1336.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

472.

1337.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ini Pihak Terkait, ya, PBB nanti 472?

1338.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Siap, Yang Mulia.

1339.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Ya, Petitumnya, ya, ini yang benar, gitu kan?

1340.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Siap, Yang Mulia.

1341.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terus, sekarang yang kedua, Aceh Besar?

1342.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Untuk Kabupaten Aceh Besar V, Pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara bagi Pemohon sebesar 10 suara dan penambahan suara bagi Partai PNA sebanyak 13 suara yang terjadi di dua desa.

1343.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

1344.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Benar. Menurut Termohon, hal itu tidak benar. Karena menurut data Termohon, suara Pemohon adalah 3.468, Yang Mulia.

1345.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3.468?

1346.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Sedangkan PNA, 3.486.

1347.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3.486?

1348.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Ya, benar.

1349.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Untuk pihak?

1350.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Terkait, PNA.

1351.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terkait, PNA, ya. Baik. Jadi tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan, ya?

1352.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Benar, Yang Mulia.

1353.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ini di lokasinya di mana ini? Untuk ini, keseluruhan dari Aceh Besar?

1354.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Aceh Besar ini ada di Desa Meunasah Papeun dan Desa Gla Meunasah Baro, Yang Mulia.

1355.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Di dua desa itu?

1356.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Di dua desa itu, Yang Mulia.

1357.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke, ya. Baik. Terus, apa lagi? Buktinya, bukti P ... T berapa?

1358.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Untuk buktinya ini, ada bukti yang baru kita lampirkan, T-13, Yang Mulia, ini tadi.

1359.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

T-13. Sudah diserahkan yang baru?

1360.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Sudah diserahkan, Yang Mulia.

1361.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Tadi Petitemnya, Saudara minta suara yang benar, ya ini, ya?

1362.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Benar, Yang Mulia. Ya, siap.

1363.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Ini selisihnya berapa sih ini? Jadi, dia tadi mendalilkan ada pengurangan 10 bagi dia dan penambahan 13 bagi PNA kan sebetulnya? Ya, tapi sebetulnya, suara yang benar tuh ini, ya?

1364.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Benar, Yang Mulia.

1365.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Sekarang yang ketiga, untuk Aceh Tengah II?

1366.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Untuk Kabupaten Aceh Tengah II, Pemohon mendalilkan adanya dugaan perbedaan jumlah antara C7-KPU dengan surat suara yang digunakan dan menurut Termohon permasalahan ini pernah diselesaikan oleh PPK Kecamatan Linge berdasarkan rekomendasi dari Panwaslih Kecamatan Linge.

1367.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi sudah ada ... anu ... ya ... rekomendasi PPK, ya?

1368.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Sudah ada rekomendasi, Yang Mulia.

1369.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dan sudah dilaksanakan?

1370.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Rekomendasi waktu di kecamatan itu untuk perhitungan surat suara ulang. Ya.

1371.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Untuk menghitung ulang, mencocokkan antara C-7 dengan suara yang digunakan, berarti?

1372.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Benar, Yang Mulia.

1373.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu C-7 kan daftar hadirnya?

1374.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Daftar hadirnya.

1375.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sesuai ... akhirnya sesuai dengan ... anu ... jumlah pemilihnya? Suara yang digunakan, berapa itu? Anda bisa namanya ... anunya ... orang yang memilih yang daftar hadir di C-7 jumlahnya berapa?

1376.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Sebentar, Yang Mulia.

1377.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

C-7 itu kan pemilih yang hadir?

1378.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Benar.

1379.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, berapa itu? Berapa orang? Atau kita cek, Anda bisa menunjukkan buktinya?

1380.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Ya. Sebentar, Yang Mulia. Kumpulan C, yang Aceh Tengah, Aceh Tengah.

1381.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, temannya membantu itu.

1382.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Ada, DPT-nya juga ada, C-7 nya juga ada. Ya, di T-012, Yang Mulia.

1383.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

T-012.

1384.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

T-011 dan T012 itu, C-6 sama C-7 nya di situ, Yang Mulia.

1385.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. C-7 dan suara yang digunakan, ya?

1386.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Sama ... Benar, Yang Mulia.

1387.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Untuk mengecek suara yang digunakan itu, berarti kan suara yang memilih, kan?

1388.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Suara yang memilih.

1389.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik yang memilih ... artinya memilih yang sah dan memilih ... dan yang tidak sah, kan?

1390.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Benar, menggunakan hak pilihnya, Yang Mulia.

1391.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ya, pokoknya yang menggunakan hak pilih, kan? Bisa sah, bisa tidak sah, gitu. Ya, ternyata berkesesuaian?

1392.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Cukup, Yang Mulia.

1393.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, berkesesuaian itu antara C-7 dengan suara surat suara yang digunakan?

1394.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Benar, Yang Mulia.

1395.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Benar? Sesuai. Jadi tidak ada persoalan sebetulnya, ya?

1396.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Ya.

1397.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Ada lagi dalilnya yang Anda jawab?

1398.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Cukup, Yang Mulia.

1399.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Cukup? Baik.

Sekarang Pihak Terkaitnya ... Itu diserahkan T-012, ini di sini kok tidak di ... Taufik Hidayat siapa? Ini kok, di sini kok enggak jadi diserahkan T-10 atau berapa ini di sini? 012, mana 012? Oke.

1400.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Ada, tadi kita susulkan, Yang Mulia.

1401.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Menjadi T-013?

1402.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Ya, 13, tadi.

1403.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

He eh, jadi bukan T-012, dicoret ini di sini.

1404.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Ya.

1405.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang ada T-13?

1406.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Benar. Kumpulan C-1, Yang Mulia, plano.

1407.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kumpulan C-1 Plano?

1408.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Ya.

1409.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Buktinya bukan ... anu ... ya, bukan C-7 ada? C-7 itu buktinya di mana ini Anda?

1410.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Kalau yang kami susulkan tadi itu yang Aceh Tengah, Yang Mulia, sama Aceh Besar juga.

1411.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Aceh Tengah dan Aceh Besar.

1412.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Yang T-13 yang kami susulkan tadi itu (...)

1413.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

He eh.

1414.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Untuk Kota Sabang Satu, Yang Mulia.

1415.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sabang Satu. Nah, terus ini yang suara yang tadi saya tanyakan, Anda kan membandingkan antara C-7 dengan surat suara yang digunakan.

1416.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Benar.

1417.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kalau surat suara yang digunakan, itu bisa dilihat dari C-1 plano, kan?

1418.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Benar. Inggih.

1419.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu orang yang memilih berapa.

1420.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Ya.

1421.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Suara sah dan tidak sahnya berapa, itu kan klop di situ dengan C-7 nya.

1422.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Ya.

1423.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Makannya saya tanyakan, T-7 itu di situ ada enggak sebagai bukti? Enggak ada disini C-7 (...)

1424.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Untuk C-6 dan C-7 nya kita di T-11, Yang Mulia.

1425.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Gimana?

1426.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

C ... T-11. C-6 dan C-7 TPS 1 Desa Oak itu di T-11.

1427.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

T-11?

1428.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Ya. Sudah kita lampirkan tadi, Yang Mulia, bukti tambahan.

1429.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, nanti kita lihat. Mbak, ada T-11, Mbak? Sebentar, biar sekaligus kita lihat. Yang enggak ada T-12 nya, tapi yang T-11 ada. Ya, ada ya T-11? Jadi, yang enggak ada T-12? Gimana, T-12 enggak ada?

Ini sebetulnya persoalannya sepele, kalau ada Bukti C-7 dan C-1 plano, itu sudah selesai. Ya, tapi yang benar mana, itu kan enggak jelas, tapi kalau sudah ada bukti ini ... Oke, T-12 untuk Aceh Besar. Tapi, ini untuk Aceh Tengah II, enggak ada? Aceh Tengah 12, ya? Ada, betul, baru masuk. Ya, betul, ya?

1430.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Benar, Yang Mulia. C-7 TPS 2 Desa Oak.

1431.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

C-7 TPS Desa Oak?

1432.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Oak. Ya, benar.

1433.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Ya. bagus. Ya, udah.

1434.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Siap.

1435.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang ganti Pihak Terkait, PDIP.

1436.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI (PDIP)

Terima kasih, Yang Mulia. (...)

1437.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pak Wayan Sudirta, kok enggak pernah ngomong? Bagiannya pilpres, ya pak.

1438.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI (PDIP)

Terima kasih, Yang Mulia.

1439.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Mendampingi, ya, mendampingi. Makanya itu saya lihat. Kok Pak Wayan Sudirta enggak pernah ngomong. Saya ingin dengar suaranya, ternyata enggak ngomong-ngomong dari tadi. Ya, silakan.

1440.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI (PDIP)

Terkait dengan PDI Perjuangan akan menanggapi terkait Dapil Aceh Tengah II.

1441.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Aceh Tengah 2. Ya, gimana Aceh Tengah II?

1442.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI (PDIP)

Yang pertama, kita mengajukan banyak eksepsi untuk perkara ini.

1443.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

1444.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI (PDIP)

Yang pertama, terkait dengan tenggang waktu.

1445.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, nanti kita baca saja. Tenggang waktunya gimana?

1446.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI (PDIP)

Bahwa permohonan yang diajukan oleh Partai PPP ini yang diajukan pada tanggal 23 Mei 2019 itu hanya terhadap 2 dapil, yaitu Dapil Sabang Satu dan Dapil Aceh Besar V.

1447.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, jadi untuk yang Aceh Tengah enggak ada, ya?

1448.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI (PDIP)

Nah, kemudian untuk Dapil Aceh Tengah ini baru diajukan pada tanggal 30 Mei 2019.

1449.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ada diperbaiki permohonan, toh?

1450.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI (PDIP)

Ada diperbaiki permohonan.

1451.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, nanti kita nilai. Oke.

1452.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI (PDIP)

Jadi menurut Pihak Terkait, pengajuan khusus Dapil Aceh Tengah II ini telah melaut ... melewati tenggang waktu.

1453.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, tidak bisa ada penambahan dapil.

1454.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI (PDIP)

Ya.

1455.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terus?

1456.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI (PDIP)

Yang kedua, terkait dengan ... bahwa permohonan Pemohon cacat formil, ini karena Pemohon tidak mendalilkan adanya ... apa ... adanya perbedaan perolehan suara. Kemudian terkait dengan eksepsi permohonan Pemohon kabur.

1457.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

1458.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI (PDIP)

Nah ini ... di dalam Petitem permohonan, angka 3, halaman 25, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara partai yang benar untuk Pemohon, untuk pengisian anggota DPR provinsi kabupaten/kota di beberapa daerah pemilihan sebagai berikut, tanpa menyebutkan angka perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

1459.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, oke.

1460.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI (PDIP)

Kemudian pada Petitem 3.3, tertulis perolehan suara Pemohon (Calon Anggota DPRK) untuk pengisian Anggota DPRK dan di bawahnya tertulis Pemohon Partai Persatuan Pembangunan Calon Anggota DPRK Dapil II Kabupaten Aceh Tengah sebagai berikut. Namun, di dalam tabel yang ditampilkan, sama sekali tidak menyebutkan perolehan suara menurut Pemohon.

1461.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

1462.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI (PDIP)

Namun tabel yang ditampilkan hanya berkaitan dengan data pemilih. Sehingga dari apa yang diuraikan di atas menurut Pihak Terkait Petitem permohonan Pemohon kabur.

1463.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sekarang (...)

1464.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI (PDIP)

Kemudian eksepsi yang ke-4.

1465.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

He eh.

1466.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI (PDIP)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon ini telah gugur dengan alasan, pada persidangan tanggal 9 Juli 2019 dengan agenda pembacaan permohonan, secara tegas Kuasa Hukum Pemohon menyampaikan bahwa khusus untuk permohonan Dapil Aceh Tengah II tidak bersedia untuk menyampaikan atau membacakan permohonan di dalam persidangan tersebut. Bahwa menurut Pihak Terkait, ketidaksediaan Kuasa Hukum Pemohon untuk menyampaikan atau membacakan permohonan tersebut dalam persidangan haruslah dianggap sebagai bentuk ketidakhadiran Pemohon dalam persidangan.

1467.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Atau bisa juga tidak serius ini, ya.

1468.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI (PDIP)

Ya, sehingga menurut Pihak Terkait, kondisi demikian haruslah dianggap permohonan Pemohon gugur.

1469.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Di pokok permohonannya merespons, enggak?

1470.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI (PDIP)

Ya, kita merespons, Yang Mulia.

1471.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Responsnya gimana?

1472.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI (PDIP)

Ini ada kaitan dengan perkara yang diajukan oleh ... dengan ... yang diajukan oleh Partai Aceh untuk DPRA, terutama berkaitan dengan TPS 1 dan TPS 2 di Desa Oak.

1473.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

1474.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI (PDIP)

Jadi, Pemohon menguraikan adanya rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwas Kecamatan Linge terkait dengan adanya perbedaan jumlah daftar pemilih dengan daftar pengguna hak pilih.

1475.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

1476.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI (PDIP)

Jadi, keterkaitan dengan hal tersebut, Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut. Bahwa perbedaan catatan penggunaan hak pilih di kedua TPS tersebut sama sekali tidak memengaruhi perolehan suara dan tidak ada pihak yang dirugikan. Dimana, terkait dengan kekeliruan tersebut merupakan kesalahan teknis yang kemudian telah dilakukan koreksi pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara di kedua TPS tersebut, saksi-saksi partai politik dan pengawas TPS sama sekali tidak ada mengajukan keberatan.

Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Linge, telah dilakukan penghitungan suara ulang untuk TPS 1 dan TPS 2 Desa Oak, dimana dari hasil penghitungan suara ulang tersebut, tidak ada perolehan su ... tidak ada perubahan perolehan suara sebagaimana yang telah dituliskan di dokumen C-1.

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada halaman 23 yang menyebutkan adanya perbedaan perolehan suara pada dokumen C-1 dengan dokumen DAA-1 di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Linge, Kecamatan Pegasing, Kecamatan Atu Lintang, dan Kecamatan Jagong Jeget adalah dalil yang tidak benar. Ini kita sudah jelaskan pada halaman

6, Yang Mulia, tabel perolehan suara di masing-masing kecamatan yang didalilkan tersebut.

1477.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

1478.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI (PDIP)

Kemudian Petitum (...)

1479.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, dianggap dibacakanlah Petitumnya.

1480.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI (PDIP)

Oke, terima kasih, Yang Mulia.

1481.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang Pihak Terkait Partai Gerindra. Oh, partai ... anu ... dulu, Partai Nanggroe Aceh, PNA.

1482.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAYUTI ABUBAKAR (PNA)

Terima kasih, Yang Mulia.

Pada prinsipnya, jawaban keterangan dari Pihak Terkait itu tidak jauh berbeda dengan jawaban yang disampaikan oleh Termohon. Ada 2 persoalan yang dimohonkan oleh Pihak Pemohon, yaitu yang pertama, persoalan pengurangan suara Pemohon di Desa Meunasah Papeun di TPS 6. Menurut Pemohon (...)

1483.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ini yang direspons tuh yang mana? Yang Aceh Besar?

1484.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAYUTI ABUBAKAR (PNA)

Aceh Besar 5, Yang Mulia.

1485.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

1486.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAYUTI ABUBAKAR (PNA)

Dapil Aceh besar 5.

1487.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

1488.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAYUTI ABUBAKAR (PNA)

Di ... menurut Pemohon di TPS 6 Desa Meunasah Papeun, pemohon memperoleh 10 suara. Setelah diteliti, kita lihat di Form C-1 dan kita lihat juga di Form DAA-1, ternyata suara dari Pemohon adalah 0 dan itu suara itu juga dituangkan dalam Form DA-1 sebagaimana Bukti PT-9 yang telah kami lampirkan.

1489.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

1490.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAYUTI ABUBAKAR (PNA)

Terus (...)

1491.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Bukti berapa itu?

1492.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAYUTI ABUBAKAR (PNA)

PT-9, Yang Mulia.

1493.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

PT-9. Terus?

1494.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAYUTI ABUBAKAR (PNA)

Terus, persoalan kedua adalah penambahan dalil Pemohon terkait penambahan suara yang tadi di Desa Gla Meunasah Baru (...)

1495.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

TPS berapa?

1496.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAYUTI ABUBAKAR (PNA)

Di TPS 3. Menurut Pemohon, jumlah suara Pihak Terkait dalam hal ini PNA itu adalah 14 suara. Ternyata, setelah kita teliti, kita lampirkan juga bukti C-1, DAA-1 dan DA-1, ternyata suara Pihak Terkait adalah 27 suara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon.

1497.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

1498.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAYUTI ABUBAKAR (PNA)

Dan satu hal lagi, sebelumnya Pemohon telah mengajukan keberatan dalam rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten dan mengajukan keberatan terhadap persoalan ini dan akhirnya dari Pihak Termohon langsung ditindaklanjuti dan dibuka kotak suara, ternyata apa yang didalilkan oleh Pemohon itu adalah tidak benar.

Cukup, Yang Mulia.

1499.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, sudah dilakukan koreksi langsung, ya?

1500.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAYUTI ABUBAKAR (PNA)

Ya, sudah diperiksa langsung.

1501.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Di 2 TPS itu? TPS 6 dan TPS 3 itu tadi?

1502.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAYUTI ABUBAKAR (PNA)

Ya. Di 2 desa itu, Yang Mulia.

1503.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, 2 desa itu. 2 desa itu kan TPS-nya beda, kan?

1504.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAYUTI ABUBAKAR (PNA)

Ya.

1505.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

TPS 6 dan TPS (...)

1506.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAYUTI ABUBAKAR (PNA)

TPS-nya beda, Yang Mulia.

1507.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Oke. Cukup, ya?

1508.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAYUTI ABUBAKAR (PNA)

Cukup ... masih ada yang kurang, Yang Mulia.

1509.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Apa?

1510.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAYUTI ABUBAKAR (PNA)

Jumlah suara yang benar, Partai Nanggroe Aceh secara keseluruhan di Dapil Aceh Besar V untuk Partai Nanggroe Aceh 3.486 suara.

1511.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sama dengan Termohon?

1512.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAYUTI ABUBAKAR (PNA)

Sama dengan Termohon.

1513.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pemohon juga sama?

1514.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAYUTI ABUBAKAR (PNA)

Untuk Pemohon juga sama, 3.468 suara.

1515.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

1516.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAYUTI ABUBAKAR (PNA)

Terima kasih, Yang Mulia.

1517.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih.

Sekarang yang terakhir dari Pihak Terkait PBB. Silakan, PBB menanggapi dapil berapa ini?

1518.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRFAN MAULANA (PBB)

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

1519.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sabang I?

1520.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRFAN MAULANA (PBB)

Untuk PBB, Dapil Kota Sabang I.

1521.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

1522.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRFAN MAULANA (PBB)

Namun, sebelum saya menyampaikan keterangan Pihak Terkait, izinkan saya untuk ada sedikit koreksi pada halaman 1 keterangan Pihak Terkait untuk (...)

1523.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Koreksi (...)

1524.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRFAN MAULANA (PBB)

Penomoran (...)

1525.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Koreksi kete ... keterangannya?

1526.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRFAN MAULANA (PBB)

Penomoran surat kuasa, Yang Mulia.

1527.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, jadi renvoi punya Anda sendiri?

1528.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRFAN MAULANA (PBB)

Ya, benar.

1529.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

1530.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRFAN MAULANA (PBB)

Renvoi. Di sini tertulis Nomor A749, seharusnya sesuai surat kuasa yang kami sampaikan Nomor A-756/DPP-SEK/07/2019 tertanggal 6 Juli 2019.

1531.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

1532.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRFAN MAULANA (PBB)

Selanjutnya, mengenai keterangan Pihak Terkait, kami mulai dari eksepsi, Majelis.

1533.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Eksepsi ada. Eksepsi, gimana eksepsinya?

1534.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRFAN MAULANA (PBB)

Untuk eksepsi, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas. Dengan alasan bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara detail bagaimana, oleh siapa, di mana, kapan terjadinya pengurangan dan penggelembungan suara tersebut. Seandainya terjadi hal demikian, tentunya Pemohon mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir DA-2 ataupun mengajukan laporan kepada Bawaslu. Tapi, nyatanya Pemohon tidak melakukan hal tersebut.

1535.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

1536.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRFAN MAULANA (PBB)

Untuk selanjutnya, mengenai Pokok Permohonan. Pada pokoknya, keterangan Pihak Terkait untuk perolehan suara, data-data kami sama dengan apa yang disampaikan oleh ... oleh ... jawaban oleh Termohon.

1537.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

1538.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRFAN MAULANA (PBB)

Persandingan yang benar menurut Pihak Terkait adalah Partai Bulan Bintang dengan 472 suara dan Partai Persatuan Pembangunan dengan 465 suara.

1539.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Buktinya di mana itu?

1540.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRFAN MAULANA (PBB)

Buktinya kami sampaikan (...)

1541.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

PT?

1542.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRFAN MAULANA (PBB)

Dari PT-7 sampai dengan PT-16.

1543.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

PT-16. Sudah cukup berarti?

1544.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRFAN MAULANA (PBB)

Cukup, Majelis.

1545.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Petitumnya (...)

1546.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRFAN MAULANA (PBB)

Petitumnya (...)

1547.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

(Suara tidak terdengar jelas) suara yang benar itu, kan?

1548.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRFAN MAULANA (PBB)

Ya, benar, Majelis.

1549.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

1550.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRFAN MAULANA (PBB)

Dianggap dibacakan. Sekian, terima kasih.

1551.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu surat kuasanya tadi renvoi gimana?

1552.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRFAN MAULANA (PBB)

Renvoi jadi A-756, sesuai surat kuasa yang kami daftarkan, Majelis.

1553.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan.

1554.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sebentar nih, Pihak Terkait, ya. Ini kuasanya ini kan banyak sekali, toh?

1555.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRFAN MAULANA (PBB)

Ya.

1556.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yang tanda tangan di sini, ya.

1557.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRFAN MAULANA (PBB)

Ya, benar.

1558.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian, di dalam permohonan ... di dalam keterangannya ini hanya ditandatangani oleh Firmansyah, Irfan Maulana, kemudian Yasin, Muhammad Fauzi, dan Ngurah Gede Jon Malem, ya.

1559.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRFAN MAULANA (PBB)

Benar, Majelis.

1560.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini kalau Yasin itu kan tidak tanda tangan di (...)

1561.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRFAN MAULANA (PBB)

Ya, tidak tanda tangan.

1562.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dalam surat kuasa.

1563.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRFAN MAULANA (PBB)

Benar.

1564.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Berarti di sini enggak hadir, ya.

1565.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRFAN MAULANA (PBB)

Enggak hadir.

1566.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yang ada siapa yang bacakan tadi di sini?

1567.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRFAN MAULANA (PBB)

Saya sendiri, Majelis.

1568.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Siapa namanya?

1569.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRFAN MAULANA (PBB)

Irfan Maulana.

1570.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Irfan Maulana. Baik. Karena sudah tidak tanda tangan, tidak bisa masuk sini, ya.

1571.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRFAN MAULANA (PBB)

Benar, Majelis. Sesuai yang tercantum dalam surat kuasa.

1572.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik.

Sekarang kita mau break dulu, Salat Ashar kemudian dilanjutkan Salat Magrib ... Oh, Bawaslu, Bawaslu, ya. Bawaslu ada keterangan? Oh, ya. Ini yang putri belum ngomong. Silakan ngomong ini.

1573.BAWASLU: MARINI

Ya, terkait untuk DPRK pemilihan Sabang I, Aceh Besar I, dan Aceh Tengah II, sama dengan Termohon.

1574.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sama dengan Termohon persis?

1575.BAWASLU: MARINI

Ya.

1576.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada persoalan?

1577.BAWASLU: MARINI

Tidak ada.

1578.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Hanya begitu?

1579.BAWASLU: MARINI

Ya.

1580.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke, cukup. Terima kasih.

1581.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Bapak Yang Mulia. Ada tambahan sedikit, Yang Mulia.

1582.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, tambahan sedikit, gimana?

1583.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Terhadap ... terhadap yang belum terjawabkan tadi. Berdasarkan hasil pengawasan di Desa Oak itu memang terdapat perbedaan antara pengguna surat suara dan jumlah suara sah dan tidak sah.

1584.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

1585.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Lalu (...)

1586.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu ... itu kan di (...)

1587.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

C-7 antara ... C-7 dengan ... antara pengguna hak suara dengan C-7 nya itu. Jadi, C7-DPT tercatat jumlah pemilih sebanyak 154.

1588.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

1589.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Sementara jumlah pengguna hak pilih sebanyak 220.

1590.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

1591.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Maka, ada 66 selisihnya. Lalu, berdasarkan hasil klarifikasi kita, peristiwa ini terjadi karena C-7 baru digunakan setelah mendapat teguran dari ketua KPPS.

1592.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

1593.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Terlambat penggunaan C-7. Lalu, terhadap hal tersebut, perlu juga kami sampaikan di sini bahwa saudara Ismuddin itu melaporkan peristiwa tersebut kepada panwas, kemudian panwas telah melakukan adjudikasi dan telah mela ... menerbitkan putusan yang kita lampirkan keputusannya itu. Bahwa dalam keputusan itu, terbukti secara sah kesalahan KPPS TPS (...)

1594.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi kesalahannya pada waktu awal itu, C-7 enggak digunakan?

1595.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Terlambat.

1596.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terlam ... ya, tadinya enggak digunakan, kan? Mestinya sejak awal digunakan, tapi itu tidak. Nah, terus kedatangannya ditunjukkan dengan apa itu dia? Surat C-6 nya? Ya, kan datang (...)

1597.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Dengan C ... dengan C-6 dan KTP (...)

1598.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Menunjukkan C-6, terus C-6 nya ditinggal di situ, kan?

1599.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Ya, dititip saja.

1600.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Jadi, terus yang ada di C-7 ditambah dengan adanya C-6, itu klop enggak, kalau menurut Anda? Ini ada 66.

1601.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Tidak ... tidak semua dengan C-6 juga, Yang Mulia.

1602.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh. Lah, terus, gimana?

1603.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Maka ... maka kemudian ketika laporan ini apa ... selisih apa ... jumlah sua ... 66 itu ditemukan, kemudian dilihat ... dijum ... dengan jumlah DPT, itu masih logis dan tidak memengaruhi perolehan suara.

1604.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Perolehan suara. Oke.

1605.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Kemudian terhadap ... terhadap (...)

1606.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu tadi berarti tidak memengaruhi perolehan suara, artinya dia datang itu memilih siapa juga enggak tahu, kan?

1607.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Ya.

1608.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Menguntungkan siapa juga enggak tahu, kan berarti?

1609.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Ya.

1610.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terus?

1611.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Terhadap pelanggaran administrasi tersebut tadi, panwaslih sudah menindaklanjutinya dengan mem ... memberikan peringatan kepada (...)

1612.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kepada (...)

1613.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Penyelenggara.

1614.KETUA: ANWAR USMAN

KPPS.

1615.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Ya.

1616.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Ketua dan anggotanya. Oke.

1617.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Demikian (...)

1618.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Cukup, ya?

1619.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Ya, cukup.

1620.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Saya kembalikan kepada Pak Ketua. Terima kasih, Yang Mulia.

1621.KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Jadi ini sudah lewat jauh ini waktu Salat Asar. Jadi, sekalian nanti sampai Magrib. Tapi sebelumnya, perlu diberitahukan kepada Partai Daerah Aceh untuk Perkara 245 ... eh, 248-17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, daftar dan alat bukti tambahan yang diserahkan dalam persidangan, itu belum diberi tanda sebagaimana mestinya. Jadi, nanti

waktu istirahat ini silakan berhubungan dengan Panitera, ya, untuk Partai Daerah Aceh (PDA). Kemudian kita skors sampai pukul 19.00 WIB, ya. Sidang di skors.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 17.19 WIB

SKORS DIBUKA PUKUL 19.10 WIB

Bismillahirrahmaanirrahiim.
Skors dicabut.

KETUK PALU 1X

Ya, kita lanjutkan persidangan ini dengan Perkara Nomor 176-04-010/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Ya, Yang Mulia.

1622.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Yang Mulia Ketua. Terima kasih.
Kita mulai untuk Perkara Nomor 176-04-010/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Pemohonnya adalah Partai Golongan Karya dan yang kedua perorangan, ya?
Termohon, siapa yang akan menyampaikan?

1623.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Terima kasih, Yang Mulia. Siap.

1624.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kita lihat terlebih dahulu. Sekarang ... jadi, untuk yang partai yang dipersoalkan di dapil mana itu?

1625.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Ada 2 dapil, Yang Mulia, Kota Banda Aceh III dan Dapil Aceh I.

1626.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sebentar. Banda Aceh III?

1627.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Dan Dapil Aceh I.

1628.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Aceh I. Kalau yang perorangan?

1629.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Maaf, yang tadi perorangan, dua-duanya perorangan.

1630.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, kedua-duanya perorangan?

1631.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Ya.

1632.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Perorangan, enggak ada Pihak Terkait berarti ini? Semuanya dari Golkar, jadi enggak ada Pihak Terkait, ya?

1633.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Benar, Yang Mulia.

1634.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Ada eksepsi?

1635.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Ada, Yang Mulia.

1636.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, eksepsinya, gimana?

1637.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Eksepsi ... sebelum menyampaikan eksepsi, kami sampaikan terlebih dahulu bahwa jawaban dari Termohon tidak terlepas dari ... atau bersandarkan pada kronologis yang dibuat oleh KIP Aceh.

1638.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

1639.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Bukti T-003 Aceh I, kronologis yang dibuat oleh Ketua KIP Aceh, Bukti T-018 Aceh I dan Kronologis KIP Banda Aceh, Bukti T-008 Kota Banda Aceh III.

1640.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

1641.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Untuk eksepsi pertama.

1642.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

1643.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Pemohon atas nama Dra. Hj. Kasumi Sulaiman, M.M. untuk Caleg Golkar Nomor Urut 6 tidak memiliki Kedudukan Hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar sebagaimana terbukti dari dokumen APBL yang kami lihat, sehingga permohonannya tidak sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK Nomor 2 Tahun 2018.

1644.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tidak punya Legal Standing?

1645.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Ya, baik.

1646.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terus yang kedua?

1647.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Eksepsi yang kedua, perbaikan permohonan. Atas nama Teuku Juliansyah, Caleg Nomor Urut 2, Dapil Aceh I melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan karena diajukan permohonan ... perbaikan permohonan tersebut diajukan pada tanggal 20 Juni 2019 pukul 13.48 WIB. Yang artinya, melewati batas waktu pengajuan perbaikan permohonan. Seharusnya batas terakhir adalah untuk perbaikan permohonan diajukan 31 (...)

1648.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

31, pukul 10.00 WIB, ya?

1649.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Betul sekali, Yang Mulia.

1650.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

1651.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Lalu yang ketiga, eksepsi yang ketiga. Permohonan tidak memenuhi syarat permohonan untuk Pemohon perseorangan atas nama Teuku Juliansyah, AP3 Nomor 257 karena dalam permohonannya Pemohon tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan Termohon dan tidak menguraikan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

1652.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tidak berkait dengan penghitungan suara?

1653.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Ya dan uraian yang disampaikan dalam permohonan (bukan perbaikan permohonan). Jadi, dalam permohonan adalah tentang permasalahan penghitungan perolehan suara caleg lain di Dapil IV Papua Barat.

1654.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Salah anu ... ya, caleg di Papua Barat.

1655.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Ya, permohonan demikian (...)

1656.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Karena yang perbaikannya itu lewat waktu.

1657.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Betul.

1658.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang dipakai yang pertama yang pertama itu locus-nya?

1659.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Salah.

1660.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Salah.

1661.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Betul, Yang Mulia, Dapil IV Papua Barat.

1662.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Berarti menurut Saudara, error in objecto?

1663.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Error in objecto, Yang Mulia.

1664.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terus?

1665.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Eksepsi cukup 3, Yang Mulia.

1666.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Berarti Pokok Permohonan enggak direaksi?

1667.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Pokok Permohonan dijawab.

1668.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, masih dijawab. Baik.

1669.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Tadi eksepsi saja ... baru eksepsi saja.

1670.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Lah, kalau eksepsinya diterima, sudah selesai. Ph ... anunya ...
Pokok Permohonannya enggak usah.

1671.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Ya, Yang Mulia.

1672.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tapi, ini masih baik, kan.

1673.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Ya, kami tetap menjawab pokok permasalahan atau Pokok
Permohonannya.

1674.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Soalnya dikemukakan oleh Termohon habis makan. Jadi, masih
lebih baik, kan, gitu. Ya, silakan, Pokok Permohonannya, gimana?

1675.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Untuk Pokok Permohonan yang pertama. Untuk Dapil Kota Banda Aceh III, Pemohon perseorangnya atas nama Dra. Hj. Kasumi Sulaiman.

1676.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu Caleg Nomor 6.

1677.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Caleg Nomor 6. Dalil pokok ... untuk jawaban selengkapnya ada di Jawaban, kami bacakan intinya saja.

1678.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

1679.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Dalil pokok Pemohon adalah ada kesalahan penghitungan perolehan suara di Kota Banda Aceh Dapil III, Kota Banda Aceh Dapil III.

1680.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kesalahan perhitungan suara?

1681.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Ya, betul. Di TPS 3 dan TPS 4 Desa Tibang, Kecamatan Syiah Kuala.

Menurut Pemohon, akibat penghitungan ... kesalahan penghitungan perolehan suara tersebut, terjadi pengurangan suara terhadap Pemohon sebanyak 4 suara dan ada penambahan suara terhadap caleg lain, yaitu Maulidawati sebanyak 4 suara. Maulidawati ini adalah Caleg Nomor Urut 7.

1682.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Penambahan suara pada Caleg Nomor 7?

1683.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Ya, sebanyak 4 suara.

1684.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

1685.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Ya. Jadi, menurut Pemohon, jumlah suara yang diperoleh Pemohon, versi Pemohon adalah 492.

1686.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

1687.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Sedangkan versi Termohon adalah 488.

1688.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

488?

1689.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Betul.

1690.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ada 4 suara ini, ya?

1691.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Betul, Yang Mulia.

1692.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terus?

1693.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Ya. Kami Termohon, menolak dalil dari Pemohon tersebut. Karena berdasarkan formulir model yang kami miliki, yaitu ... sebentar, C-1, kumpulan C-1, kemudian Bukti DB1-DPRK, DAA1-DPRK. Bahwa jumlah suara yang benar menurut Termohon untuk Pemohon adalah 488.

1694.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Suara yang benar 488?

1695.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Betul. Berdasarkan (...)

1696.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Bukan 492, ya?

1697.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Bukan.

1698.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terus?

1699.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Jadi 488, berdasarkan ... Kami ulangi lagi, berdasarkan Bukti C, C1-KPU, vide Bukti T-007 Kota Banda Aceh III.

1700.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

T-007?

1701.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Dan Bukti DAA1-DPRK, vide Bukti T-006 Kota Banda Aceh III.

1702.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

1703.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Juga Bukti DB1-DPRK, vide Bukti T-005 Kota Banda Aceh III.

1704.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

T-005, itu yang DB, ya?

1705.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Betul.

1706.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang DAA-1 (...)

1707.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

DAA-1 Bukti T-006.

1708.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

006, ya?

1709.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Ya. Lalu, jika melihat hasil rekapitulasi secara berjenjang di TPS tingkat kabupaten, jumlah suara tersebut tetap dan konsisten, Yang Mulia.

1710.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Masih tetap satu ... anu ... 488, itu?

1711.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Betul, Yang Mulia.

1712.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

1713.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Untuk tabel persandingan perolehan suaranya dapat dicermati di jawaban.

1714.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jawaban. Halaman berapa?

1715.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Tabel angka 24, 25, dan 26.

1716.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Angka 24 dan 25 dan 26, ya. Halaman berapa sih itu?

1717.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

24 ... oh, maaf, Yang mulia, sebentar. Halaman (...)

1718.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Eenggak pake halaman?

1719.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Ada halamannya.

1720.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, ada?

1721.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Halaman 10 sampai dengan 11.

1722.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Angka 24, 25, 26?

1723.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Ya, Yang Mulia.

1724.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Cukup?

1725.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Cukup.

1726.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terus, sekarang yang perorangan kedua.

1727.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Untuk yang kedua (...)

1728.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Di Aceh I?

1729.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Ya, Dapil Aceh I, Pemohonnya atas nama Teuku Juliansyah, Caleg Nomor Urut 2.

1730.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

1731.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Jawaban lengkap ada di halaman 6 sampai dengan 10, jawaban.

1732.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Halaman 6 sampai dengan 10?

1733.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Betul.

1734.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terus?

1735.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Lokus-nya ada di 27 TPS.

1736.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang benar itu di lokus 26 TPS?

1737.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Ya.

1738.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

1739.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Kalau kami lihat, kami baca 27 TPS.

1740.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

27 TPS?

1741.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Ya. 10 desa (...)

1742.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ini berarti ... anu ... ya, yang didalilkan di perbaikan permohonan, ya berarti?

1743.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Ya. 10 desa (...)

1744.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Padahal, menurut Anda yang dipakai mestinya yang perbai ... anu ... pertama, ya, permohonan pertama.

1745.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Ya, Yang Mulia.

1746.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ya, oke.

1747.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Ya. Kami ulangi, di 27 TPS, di 10 desa dan 4 kecamatan. Kecamatananya Seulimeum ... maaf Seulimeum, Kecamatan Darul Imarah, Kecamatan Jantho dan Kecamatan Peukan Bada.

1748.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Saya juga enggak bisa baca itu, saya enggak tahu (...)

1749.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Seulimeum, ya.

1750.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu tanya Pak Ketua Bawaslu itu, ya, atau Bu ... Bu Ketua Bawaslu tahu itu bacanya gimana itu, daerah itu.

1751.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Ya. Ya, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia.

1752.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

1753.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Ya. Jadi, kalau kami cerma ... Termohon cermati gugat ... permohonannya, dalil Pemohon pada pokoknya adalah adanya penambahan suara pada Caleg lain bernama Ansari Muhammad, Caleg Nomor Urut 4 dan pengurangan suara pada Pemohon. Di lokus yang tadi Termohon sebutkan.

1754.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, penambahan Caleg Nomor 4?

1755.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Betul. Atas nama Ansari Muhammad.

1756.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terus? Yang dikurangi Caleg Nomor 6?

1757.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Dan suara Pemohon, ya. Caleg Nomor Urut 2.

1758.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nomor Urut 2?

1759.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Teuku Juliansyah, Pemohon.

1760.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nomor 2 toh berarti? Kalau di (...)

1761.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Ya, Nomor 2.

1762.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

1763.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Di lokus-lokus yang tadi Termohon sebutkan.

1764.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

1765.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Ya. Jadi, menurut Pemohon dengan mendasarkan pada dokumen C1-DPRA, DA1-DPRA yang dimiliki Pemohon bahwa suara Pemohon menurut dokumen C1-DPRA adalah 38.

1766.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya?

1767.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Tetapi, di DA1-DPRA berkurang sebanyak 4 menjadi 34.

1768.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya?

1769.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Di dokumen C1-DPRA, suara Ansari Muhammad sebanyak 127.

1770.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya?

1771.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Tetapi, di dokumen DA1-DPRA bertambah sebanyak 88 menjadi 215.

1772.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

100?

1773.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

215.

1774.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

215?

1775.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Betul, Yang Mulia.

1776.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya?

1777.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Ya. Ya, Termohon menolak dalil Pemohon tersebut karena tidak benar. Bahwa berdasarkan bukti yang dimiliki oleh Termohon, yaitu C1-

DPRA, vide Bukti T-015 Aceh I Golkar. Dokumen DAA-1, vide Bukti T-013 Aceh I, Golkar.

1778.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya?

1779.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Dan dokumen DA-1, vide Bukti T-013 Aceh I, Golkar. Bahwa hasil perhitungan atau hasil perolehan suara Pemohon dan Ansari Muhammad, yang benar adalah sebagaimana dalam jawaban, yaitu total suara Pemohon adalah 33, bukan 38, dan total perolehan suara Ansari Muhammad adalah 196.

1780.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

96?

1781.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Ya, 196 untuk suara Ansari Muhammad.

1782.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

196 yang betul menurut Termohon, ya?

1783.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Ya, Yang Mulia.

1784.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Oke. Ada lagi?

1785.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Ya, jadi jumlah ... persandingan perolehan suara tersebut sudah kami sampaikan di jawaban dalam tabel-tabel di halaman 6 sampai dengan 7. Untuk tabel perolehan suara Pemohon, itu ada diangka 17. Untuk tabel perolehan suara Ansari Muhammad, ada di butir 19.

1786.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

1787.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Jika Termohon cermati untuk rekapitulasi secara berjenjang, jumlah ... perolehan jumlah suara Pemohon dan Ansari Muhammad tetap dan konsisten, Yang Mulia.

1788.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

1789.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Juga kami sampaikan dalam jawaban tabel persandingan suaranya atau tabel perolehan suaranya. Begitu ... demikian, Yang Mulia.

1790.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

1791.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Untuk Petitum, mohon dianggap dibacakan.

1792.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dianggap dibacakan, baik. Terima kasih, Termohon.

1793.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Terima kasih, Yang Mulia.

1794.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ini Pihak Terkaitnya enggak ada. Sekarang Bawaslu. Bawaslu ada catatan ini?

1795.BAWASLU: MARINI

Baik, Yang Mulia. Ada, Yang Mulia.

1796.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan disampaikan!

1797.BAWASLU: MARINI

Adapun untuk ... DPRK Daerah Pemilihan III Banda Aceh.

1798.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

1799.BAWASLU: MARINI

Ada catatan di kami bahwa berdasarkan salinan C1-DPRK TPS 3.

1800.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

1801.BAWASLU: MARINI

Desa Tibang Kecamatan Syiah Kuala, perolehan suara untuk Dra. Hj. Kasumi Sulaiman, M.M=4 suara, adapun perolehan suara untuk Saudara Maulidawati sebanyak 0, bukti di PK-2 ... Bukti di PK-2, 196.

Selain itu, sebenarnya ada putusan dari Panwaslih Kota Banda Aceh. Adapun putusannya itu menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu, memerintahkan kepada Komisi Indenpenden Pemilihan Kota Banda Aceh untuk memberikan peringatan tertulis kepada terlapor, memerintahkan kepada PPK melalui KIP Kota Banda Aceh untuk menyelesaikan dan menindaklanjuti pelanggaran administrasi dengan cara mencermati tata cara rekapitulasi sesuai dengan tingkatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, pada tanggal 3 Juli 2019, Panwaslih Kota Banda Aceh mengawasi proses pengambilan dokumen hasil pungut-hitung suara pada TPS 3 Desa Tibang, Kecamatan Syiah Kuala yang dilaksanakan oleh KIP Kota Banda Aceh pada 3 Juli 2019. Ditemukan fakta bahwa pada Model C plano TPS 3, perolehan suara Dra. Hj. Kasumi Sulaiman, M.M sebanyak 4 suara dan Maulidawati. S.Pd.I. sebanyak 0 suara.

1802.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

0 suara masih.

1803.BAWASLU: MARINI

Ya. Kemudian pada Formulir Model C plano TPS 4, perolehan suara Hj. Kasumi Sulaiman sebanyak 1 suara dan Maulidawati sebanyak 0 suara.

1804.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

1 dan 0, ya?

1805.BAWASLU: MARINI

Ya.

1806.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Yang di TPS 4 ini?

1807.BAWASLU: MARINI

TPS 4.

1808.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Untuk kedua caleg tadi, ya?

1809.BAWASLU: MARINI

Ya.

1810.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Ada lagi?

1811.BAWASLU: MARINI

Untuk sementara itu.

1812.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya? Silakan.

1813.BAWASLU: MARINI

Cukup.

1814.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Cukup, ya. Untuk yang ... anu ... enggak ada, ya? Yang satunya Aceh?

1815.BAWASLU: MARINI

Tidak ada, Yang Mulia.

1816.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke, ini cukup, ya? Baik. Terima kasih.
Ada tambahan dari Termohon? Cukup? Baik.

1817.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Cukup, Yang Mulia.

1818.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terima kasih.
Sekarang Perkara Nomor 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Bulan Bintang. Pihak Terkaitnya Partai Aceh dan Partai Demokrat. Sebentar, saya cari dokumennya dulu.

1819.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Assalamualaikum wr. wb.

1820.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumussalam wr. Wb.
Oke, silakan Termohon!

1821.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Dalam Perkara Nomor 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ini ada 2 dapil yang dipermasalahkan.

1822.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

1823.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Yakni, untuk Pidie Jaya III, PHPU untuk Anggota DPRK Pidie Jaya, Kabupaten Pidie Jaya.

1824.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pidie Jaya III. Ya?

1825.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Kemudian (...)

1826.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terus, yang kedua?

1827.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Yang kedua, untuk (...)

1828.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dapil (...)

1829.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Untuk Dapil Bireuen II, pengisian DPRK (...)

1830.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Apa namanya, dapil apa ini?

1831.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Bireuen II, Bireuen.

1832.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Bireuen. Saya dengarnya biru, kok. Kayak lagunya ... anu ... aja (...)

1833.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Ini memang ada eksepsi yang sifatnya normatif, seperti yang saya sampaikan tadi.

1834.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

1835.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Pada pokoknya bahwa berkaitan kewenangan (...)

1836.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Mahkamah.

1837.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Mahkamah Konstitusi karena ini mengait pada administratif ... pelanggaran administratif (...)

1838.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pelanggaran administratif.

1839.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan, maka itu sudah seharusnya diajukan ke Bawaslu terlebih dahulu.

1840.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

1841.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Kemudian (...)

1842.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kalau Bawaslu enggak terselesaikan baru, ya?

1843.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya.

1844.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tapi ini gimana, di ... di aju ... pernah diajukan ke Banwaslu, enggak?

1845.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Pada akhirnya diajukan ... diajukan, tetapi tidak terselesaikan.

1846.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

1847.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ini untuk yang Pidie Jaya.

1848.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pidie Jaya III?

1849.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya.

1850.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

1851.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya. Jadi, tepatnya begini, akan saya sampaikan.

1852.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Jadi eksepsinya berhubungan dengan ... bahwa persoalan ini adalah persoalan pelanggaran administrasi?

1853.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya.

1854.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang sudah masuk dalam Pokok Permohonan.

1855.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya, masuk Pokok Permohonan.

1856.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Yang pertama yang di Dapil Pidie Jaya III?

1857.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Berkaitan Pidie Jaya III. Karena di sana juga ada alasan berkaitan dengan kehilangan suara, maka kami menyampaikan tabel di halaman 8, di situ sudah ada perolehan suara partai politik untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Pidie Jaya, Dapil Pidie Jaya III.

1858.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

1859.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Nah, di situ di Nomor 19, PBB, suara menurut Pemohon adalah 1.355, menurut Termohon juga sama 1.355, jadi tidak ada pengurangan suara. Kemudian tabel 2, rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat TPS di Desa Desa Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru menurut Pemohon sebagai berikut. Di situ ada tabel (...)

1860.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

1861.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Di halaman 9, cuma mohon koreksi, Majelis. Di situ di TPS 05, untuk PBB (...)

1862.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

1863.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Angka 77 itu yang benar sesuai dengan DAA-1 adalah 69.

1864.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sebetulnya 69?

1865.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya, itu salah ketik. Jadi, 69.

1866.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

1867.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Itu bukti T-11 sampai T-14 Pidie Jaya III PBB dan selanjutnya.

1868.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

1869.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Nah, kemudian alasan ... permasalahan lain yang diajukan oleh Pemohon adalah berkaitan dengan adanya laporan tertulis dari Mohammad Thaib, S.E., kepada Bawaslu. Berkaitan dengan peristiwa adanya penyelenggaraan-penyelenggaraan pemilu, yakni dilakukan saudara Ridwan Benseh Anggota KPPS TPS 08 di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru yang melakukan pencoblosan lebih dari 1 kali dan melakukan pencoblosan di luar bilik suara dan selanjutnya (...)

1870.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ini petugas KPPS berarti yang .. anu?

1871.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya, petugas KPPS 08.

1872.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kemudian (...)

1873.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya, kemudian berkaitan itu sudah dilakukan ... apa ... pemeriksaan. Nah, terdapat di T-6 ... 15 Pidie Jaya III itu, ada keterangan ... surat keterangan dari KPPS yang intinya adalah tidak melihat adanya pencoblosan itu dan sebagainya.

1874.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

1875.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Selanjutnya, berkaitan dengan proses penghitungan suara di tingkat kecamatan (...)

1876.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

He em.

1877.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Pada saat penghitungan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan dari saksi-saksi peserta pemilu maupun panwaslih di tingkat kabupaten, Bukti T-008 (...)

1878.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada keberatan, ya?

1879.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Tidak ada keberatan.

1880.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Termasuk keberatan Pemohon, enggak ada, ya?

1881.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Tidak ada.

1882.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

1883.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Baik. Selanjutnya, berkaitan dengan pemberi jawaban Bawaslu, terbit 2 surat dari Panwascam Bandar Baru Nomor 01/PANWASCAM/IV/2019 tanggal 26 April 2019, Perihal Hasil Penelitian ... Penelitian.

1884.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

He eh.

1885.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Itu Bukti T-016 Pidie Jaya III dan pemeriksaan panitia Panwascam Bandar Baru terhadap laporan Panwas ... Pengawasan PTPS atas pelaksanaan pemungutan penghitungan suara di TPS Gempong Baru ... eh ... Gempong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru.

1886.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

1887.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Sebagaimana itu Bukti T-017 Pidie Jaya. Tembusannya ... akan tetapi, tembusannya itu karena rekomendasinya adalah melakukan pemungutan suara ulang, tembusannya pada diterima oleh KIP Pidie Jaya pada tanggal 27 April 2019, pukul 00.14 WIB. Artinya, bertepatan pada hari ke-10 setelah hari pencoblosan, vide bukti T-018 Pidie Jaya, PBB 92, dan sebagainya.

Nah, terhadap hal tersebut, kemudian KIP Pidie Jaya menindaklanjuti (...)

1888.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tidak dilaksanakan (...)

1889.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Rekomendasi tersebut dan menerbitkan Berita Acara Komisi Independen. Kabupaten Pidie Jaya Nomor 45, itu Bukti T-023 Pidie Jaya.

1890.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

1891.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Yang intinya adalah tentang tindak lanjut rekomendasi pemungutan suara ulang di TPS 01, 02, TPS 03, 04, TPS 05, 06, 07, dan 08 Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, bukti itu.

1892.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, ada 3 tindak lanjut?

1893.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Karena itu sudah tidak mungkin dilaksanakan, jadi (...)

1894.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tidak bisa dilaksanakan?

1895.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya, tidak bisa dilaksanakan.

1896.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu buktinya T-023 itu.

1897.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya, mengingat karena memang di dalam (...)

1898.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sudah lewat menurut undang-undang (...)

1899.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya, Pasal 373 ayat (3) itu pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 hari setelah hari (...)

1900.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

1901.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Pemungutan suara, dan selanjutnya. Seperti itu.

1902.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

1903.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Intinya seperti itu. Kemudian, selanjutnya cuma dokumen-dokumen yang disampaikan.

1904.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Jadi itu kenapa direkomendasikan untuk diulang karena menurut ... anu ... setelah diteliti, ada coblos lebih dari 2 kali itu, ya?

1905.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya. Itu yang Majelis kemarin menyampaikan ada preman itu, Pak.

1906.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh itu, ya?

1907.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya.

1908.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, jadi di ... ada orang yang ... anu ... gitu. Oke.

1909.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya, Yang Mulia.

1910.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Berarti belum dilaksanakan?

1911.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Belum dilaksanakan.

1912.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tapi umpama itu dilakukan PSU, suaranya signifikan bisa bergeser enggak, menurut Termohon?

1913.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Tidak tahu, Majelis, tidak bisa menjawab.

1914.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

1915.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Apa yang dicoblos dan ... soalnya begini, menurut ... karena itu belum di ... apa namanya ... dilakukan penelitian yang mendalam. Kemudian juga oleh (...)

1916.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Enggak. Tapi, kalau ketentuan undang-undang kan orang yang mencoblos dulu lebih dari 2 kali kan aturannya harus dilakukan PSU, kan? Masalah itu menguntungkan siapa, gitu kan, Bawaslu? Betul, ya? Masalahnya, itu menguntungkan siapa, kita tidak urusan. Tapi, undang-undang mengatakan kalau itu dicoblos lebih dari 2 kali, maka bisa direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang.

1917.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Dilanjutkan, Majelis?

1918.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tetapi, itu tadi. Akhirnya, apakah itu berpengaruh atau tidak, nanti kita lihat, ya. Oke.

1919.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Yang untuk berikutnya.

1920.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang sekarang.

1921.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Dapil Bireuen II.

1922.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Bireuen II, ya.

1923.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya, kami menyampaikan persandingan data suara sah menurut Pemohon untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bireuen, Dapil Bireuen II.

1924.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

1925.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Di halaman 13. Di sana untuk Partai Aceh versi Pemohon 12.127, versi Termohon 12.266, ada selisih 139. Untuk Partai PBB, versi Pemohon adalah 2.409 ... mohon maaf, 2.436, versi dari Termohon 2.432, ada selisih 4 suara.

1926.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

1927.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Kemudian tabel 4, halaman berikutnya, berkaitan sebaran perolehan suara di tingkat TPS.

Untuk Kecamatan Peusangan Selatan, Kecamatan Peusangan, dan Kecamatan Peusangan Siblih Krueng, seperti itu.

1928.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terus?

1929.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Nah, kalau di tingkat kabupaten, maka di tingkat kecamatan itu diperoleh angka atau suara menurut Pemohon dua ... Kecamatan Peusangan Selatan 22, Termohon 53, ada selisih. Untuk Kecamatan

Peusangan, Pemohon 167, Termohon 289. Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Pemohon III, Termohon 108. Jadi, jumlahnya kalau dari Pemohon ditotal 192, kalau oleh versi Termohon 450.

1930.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

1931.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Tanggapannya, berkaitan dengan selisih suara tadi, maka untuk Kecamatan Peusangan Selatan, Darul Aman TPS 1 adalah tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon. TPS 1 Ulee Jalan juga tidak benar sesuai yang didalilkan Pemohon. Desa Uteun Raya TPS 1, juga tidak benar sesuai dengan yang didalilkan Pemohon.

1932.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

1933.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya. Kami menyangkal semua terhadap Kecamatan Peusangan, juga kesa ... Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, sama.

1934.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang benar totalnya gimana, menurut Termohon?

1935.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Terkait suara sah Pemohon menurut Termohon adalah 12.266 suara, bukan 12.127 suara sesuai yang didalilkan

1936.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

12.000 berapa? Diulangi. Menurut Termohon? Pemohon memperoleh 12.000?

1937.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

12.266 suara.

1938.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

12.266.

1939.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Bukan 12.127 suara.

1940.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

1941.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Sehingga tidak ada pengurangan suara sah atau penambahan suara sah di Kabupaten Bireuen untuk Dapil Bireuen II.

1942.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

1943.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Berikutnya adalah Petitem, mohon dianggap dibacakan.

1944.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dianggap dibacakan.

1945. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Terima kasih.

1946.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terima kasih.

Sekarang untuk Pihak Terkait Partai Aceh. Gimana, Partai Aceh? Ini Partai Aceh merespons yang mana ini? Yang Pidie Jaya atau yang Bireuen II?

1947.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NIKO KRESNA ARIA PUTRA (PARTAI ACEH)

Bireuen II, Yang Mulia.

1948.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Birin II, ya. Silakan.

1949.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NIKO KRESNA ARIA PUTRA (PARTAI ACEH)

Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, mengenai permohonan dari Pemohon, persoalan adanya penambahan pada TPS-TPS di 3 kecamatan di Dapil II Bireuen. Pada intinya, kami sama dengan pihak ... dalam Pokok Perkara, kami sama dengan Pihak Termohon, Yang Mulia. Bahwasanya penam ... penambahan yang dimaksud dalam permohonan itu tidak ada, Yang Mulia, dan kami menyangkal keseluruhan adanya penambahan-penambahan di tiap-tiap TPS tersebut. Kemudian, ini untuk eksepsinya jadi mundur. Eksepsi mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1950.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

1951.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NIKO KRESNA ARIA PUTRA (PARTAI ACEH)

Kemudian, terkait sama PSU yang dimohonkan oleh Pemohon.

1952.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu yang PSU kan yang di... anu?

1953.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NIKO KRESNA ARIA PUTRA (PARTAI ACEH)

Di sini ada juga, Yang Mulia.

1954.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, di Bireuen juga ada diminta PSU?

1955.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NIKO KRESNA ARIA PUTRA (PARTAI ACEH)

Ada, Yang Mulia.

1956.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Di mana itu? Ada rekomendasi PSU juga?

1957.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NIKO KRESNA ARIA PUTRA (PARTAI ACEH)

Tidak, tidak ada. Mereka (...)

1958.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ini permintaan PSU kan permintaannya (...)

1959.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NIKO KRESNA ARIA PUTRA (PARTAI ACEH)

Pemohon.

1960.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pemohon.

1961.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NIKO KRESNA ARIA PUTRA (PARTAI ACEH)

Ya.

1962.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, gimana?

1963.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NIKO KRESNA ARIA PUTRA (PARTAI ACEH)

Jadi, kami menanggapi dengan ... bahwa mengenai dalil Pemohon untuk melakukan PSU di seluruh TPS yang ... yang dimaksud adalah kurang tepat karena untuk melakukan pemungutan suara ulang harus kondisi pelanggaran yang sifatnya TSM. Seperti kondisi bila ditemukan surat suara yang sudah tercoblos atau rusak oleh petugas KPPS dan kondisi dimana ada pemilih yang berikan suara tapi bukan merupakan hak pilihnya, dan sebagainya. Dan kondisi ini masuk dalam sengketa proses pemilu, dimana dilaporkan kepada panwas dan permintaan PSU dimohonkan oleh Pemohon tidak sesuai dengan kondisi yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam dalilnya di permohonan, Sehingga layak dan berdasarkan apabila permintaan Pemohon untuk diabaikan dan ditolak, Yang Mulia.

1964.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

1965.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NIKO KRESNA ARIA PUTRA (PARTAI ACEH)

Nah, dan untuk di Petikum, Yang Mulia. Mungkin kami agak meralat sedikit. Tapi yang disampaikan oleh Termohon itu yang berjumlah 12.266 itu perolehan Termohon ini sebetulnya perolehan Pihak Terkait, Yang Mulia. Jadi sudah sama intinya untuk (...)

1966.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, yang 12.266 itu perolehan suara (...)

1967.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NIKO KRESNA ARIA PUTRA (PARTAI ACEH)

Suara Pihak Terkait, Yang Mulia.

1968.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

1969.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NIKO KRESNA ARIA PUTRA (PARTAI ACEH)

Partai Aceh.

1970.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pihak Terkait. Kalau Pemohonnya berapa kalau gitu menurut (...)

1971.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NIKO KRESNA ARIA PUTRA (PARTAI ACEH)

2.432 suara. Sama dengan versi Termohon, Yang Mulia.

1972.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

2.000?

1973.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NIKO KRESNA ARIA PUTRA (PARTAI ACEH)

432.

1974.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

432. ini 12.000 sama 2.000, ya berarti? Ha?

1975.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NIKO KRESNA ARIA PUTRA (PARTAI ACEH)

12.000. Ya, untuk perebutan kursi ketiga, Yang Mulia.

1976.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Ya, jadi itu untuk kelebihanannya berarti, ya?

1977.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NIKO KRESNA ARIA PUTRA (PARTAI ACEH)

Ya, betul.

1978.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kalau lebih masih lebih tinggi daripada ... sisa suara masih lebih tinggi dari perolehan suara partai yang lain berarti dapat lagi, kan gitu, kan?

1979.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NIKO KRESNA ARIA PUTRA (PARTAI ACEH)

Ya, betul.

1980.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, ini yang dipersoalkan itu, ya. Baik, cukup berarti?

1981.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NIKO KRESNA ARIA PUTRA (PARTAI ACEH)

Sementara cukup, Yang Mulia.

1982.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sekarang Pihak Terkait untuk Demokrat.

1983.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO (DEMOKRAT)

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

1984.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ini berarti mempersoalkan yang Pidie Jaya, ya?

1985.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO (DEMOKRAT)

Pidie Jaya III Bandar Baru, Yang Mulia.

1986.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

III, ya?

1987.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO (DEMOKRAT)

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRK Pidie Jaya di daerah pemilihan Pidie Jaya III Bandar Baru, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut tertuang dalam tabel 1, Yang Mulia.

1988.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

1989.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO (DEMOKRAT)

Pihak Terkait memperoleh suara 1.700 untuk perolehan kursi keenam.

1990.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

1991.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO (DEMOKRAT)

Sementara untuk Pemohon 1.355. Sedikit renvoi, Yang Mulia, untuk poin nomor 2. Bahwa perolehan hasil berdasarkan tabel di atas telah benar dan sesuai dengan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara yang dilakukan pada tingkat Kabupaten Pidie Jaya untuk daerah pemilihan III, meliputi Kecamatan Bandar Baru, sebagaimana yang tertuang dalam DB1-DPRK Kabupaten Pidie Jaya. Vide Bukti itu PT, Yang Mulia.

1992.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. PT berapa?

1993.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO (DEMOKRAT)

PT-01, Yang Mulia.

1994.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

PT-01?

1995.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO (DEMOKRAT)

Ya.

1996.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

1997.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO (DEMOKRAT)

Untuk selanjutnya, Yang Mulia, poin ketiga. Bahwa selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebanyak 345 suara.

1998.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

1999.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO (DEMOKRAT)

Merupakan hasil perolehan suara yang sebenarnya berdasarkan hasil perhitungan di seluruh TPS yang tersebar di Kecamatan Bandar Baru, Dapil Pidie Jaya III.

2000.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Saya mau minta konfirmasi.

2001.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO (DEMOKRAT)

Baik, Yang Mulia.

2002.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ada rekomendasi, betul, untuk pemungutan suara ulang?

2003.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO (DEMOKRAT)

Untuk rekomendasi pemungutan suara ulang (...)

2004.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ada, ya?

**2005.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO (DEMOKRAT)
(DEMOKRAT)**

Tidak ada, Yang Mulia.

2006.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ha?

2007.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO (DEMOKRAT)

Tidak ada, Yang Mulia.

2008.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tadi Termohon mengatakan ada. Anda enggak tahu kalau ada rekomendasi pemungutan suara ulang yang kemudian tidak di ... jadi tindak ... ditindaklanjuti karena waktunya sudah habis?

2009.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO (DEMOKRAT)

Oh, ya. Ada ... ada tapi karena sudah melewati batas waktu 10 hari 14 menit, sehingga KIP Pidie Jaya mengeluarkan keputusan tidak dapat dilaksanakannya pemungutan suara ulang, sebagaimana rekomendasi (...)

2010.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi belum ... itu belum terselesaikan?

2011.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO (DEMOKRAT)

Ya, Yang Mulia.

2012.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Makanya terus oleh Pemohon didalilkan untuk diselesaikan MK, gitu kan?

2013.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO (DEMOKRAT)

Ya, Yang Mulia.

2014.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Jadi ada rekomendasi, ya?

2015.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO (DEMOKRAT)

Ada, Yang Mulia.

2016.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terus, gimana? Ada lagi?

2017.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO (DEMOKRAT)

Untuk ... bahwa untuk tabel 2, sebagaimana yang tertuang dalam tanggapan Pihak Terkait, Yang Mulia. Bahwa Pihak Terkait itu memiliki ... mendapatkan suara 1.700, sementara Pemohon itu 1.335, itu terdapat selisih 345.

2018.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2019.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO (DEMOKRAT)

Nah, di TPS yang dipermasalahkan tertuang dalam tabel 3 itu, ya, poin 4.

2020.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2021.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO (DEMOKRAT)

Dalam tanggapan Pihak Terkait ini. Bahwa Pihak Pemohon itu, ya, Pemohon itu mendapatkan 446, Pihak Terkait itu 132. Tapi selisih antara ... keseluruhan antara Pihak Terkait dengan Pemohon itu sebesar 345, Yang Mulia.

2022.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Ya, cukup, ya?

2023.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO (DEMOKRAT)

Cukup, Yang Mulia. Petitum dianggap dibacakan.

2024.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dianggap dibacakan, ya.

2025.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO (DEMOKRAT)

Dan tertuang dalam permohonan ... tanggapan permohonan Pihak Terkait, Yang Mulia. Terima kasih.

2026.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Catatan dari Bawaslu.

2027.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

2028.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2029.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Yang pertama kami ingin menjelaskan tentang Ridwan Benseh, yang mundur, Yang Mulia, orang hebat. Dia mencoblos di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, dan TPS 8.

2030.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2031.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Kemudian, yang dilakukan oleh panwas, ya, seketika pengawas TPS menyaksikan itu, kemudian menindaklanjutinya. Ridwan Benseh ini sudah di ... diproses untuk pidana pemilu.

2032.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ini sudah diproses pidana pemilu tapi belum ada putusan pengadilan?

2033.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Bukan. Apa ... pada ... pada proses itu Ridwan Benseh ini tidak pernah ... apa namanya ... tidak pernah hadir setelah dipanggil secara patut lebih dari 3 kali.

2034.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh.

2035.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Kemudian, aspek pidananya demikian. Kemudian ditutup, ya. Kemudian, aspek administratifnya terkait dengan pencoblosan itu. Nah, panwaslih ... kami mengubah itu sedikit di 519 di halaman 15. Itu tertulis bahwa Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya yang melakukan penelitian atas laporan PTPS yang hasilnya adalah tertulis *PPK*, sebenarnya ... yang sebenarnya *panwascam*, pengawas kecamatan.

2036.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2037.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Itu menemukan bukti dan pada tanggal 26 April 2019, panitia pemilihan kecamatan meneruskan rekomendasi pemungutan suara kepada KIP. Bukan tanggal 27, tetapi pada tanggal 26 April, ya, panwas kecamatan meneruskan rekomendasi pemungutan suara ulang kepada KIP Pidie Jaya.

Kemudian pada tanggal 27 April, KIP Pidie Jaya melakukan rapat pleno tertutup perihal tindak lanjut rekomendasi pemungutan suara ulang. Itu dengan PK, bukti, PK-2.18-8. Kemudian pada tanggal 27 April 2019, KIP Pidie Jaya mengeluarkan keputusan terkait rekomendasi pemungutan suara, yang pada pokoknya menetapkan tidak dapat melaksanakan pemungutan suara.

Poin penting yang ingin kami sampaikan di sini bahwa surat penerusan pemungutan suara ulang, itu pada tanggal 26 April.

2038.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2039.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Kemudian, untuk tanggapan kami terhadap DPRK Pemilihan Bireun II. Dalam keterangan kita, kita hanya menyampaikan sesuai yang didalilkan di ... di Kecamatan Peusangan Selatan dan di TPS-TPS yang disebutkan. Kita menyampaikan C-1 Kecamatan Peusangan Selatan di TPS 1 Desa Darul Aman. Kemudian TPS 1 di Desa Uteun Raya Aceh, sebagaimana tersebut di dalam keterangan kita, perolehan suara.

Kemudian demikian juga di Kecamatan Peusangan yang kita sampaikan adalah TPS 2 Desa Pante Pisang, ya, perolehan suara Partai Aceh itu. Jadi, di 3 dalil yang kita sampaikan, ini semuanya adalah form

C-1 Kecamatan Peusangan di TPS yang dipersoalkan. Kami pikir, demikian, terima kasih.

2040.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, jadi yang tadi yang di Pidie Jaya memang anu, ya ... belum dilaksanakan, ya? PSU-nya, ya? Ya, betul, ya?

2041.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Ya, Yang Mulia.

2042.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu meliputi berapa TPS yang dimintakan PSU atas dasar rekomendasinya?

2043.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

8 TPS, Yang Mulia.

2044.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

8 TPS. 8 TPS, itu masing-masing TPS DPT-nya berapa sih? Sekitar 300 menurut undang-undang atau ada yang lebih banyak dari 300?

2045.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Kita tidak tidak ingat, Yang Mulia.

2046.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ingat. Yang ... kan kalau undang-undang (...)

2047.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

300 (...)

2048.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

1 DPT kan 300. Tapi, ada yang melebihi 300? DPT di 8 TPS, itu?

2049.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Enggak ada.

2050.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Enggak ingat, ya? Baik, kalau begitu. Ya, cukup.
Ya, silakan, Prof.

2051.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Saya kembali sebentar ke Pihak Terkait, ya? Terkait dengan permohonan. Permohonan ini ada kuasa hukumnya, ya? Ada Surat Kuasa Khusus, ya?

2052.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pihak terkait Aceh atau Demokrat?

2053.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pihak terkait dengan Demokrat.

2054.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO (DEMOKRAT)

Baik, Yang Mulia.

2055.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ada Surat Kuasa Khusus, ya?

2056.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO (DEMOKRAT)

Ada, Yang Mulia.

2057.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Surat Kuasa Khusus yang bertanggal berapa itu?

2058.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO (DEMOKRAT)

21 mei, Yang Mulia.

2059.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

21 Mei, ya?

2060.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO (DEMOKRAT)

Ya, Yang Mulia.

2061.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

21 Mei. Ini yang tanda tangan banyak nih?

2062.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO (DEMOKRAT)

Banyak, Yang Mulia.

2063.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian di dalam keterangannya, ini yang tanda tangan berapa ini? Hanya 2 orang saja?

2064.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO (DEMOKRAT)

Ya, Yang Mulia.

2065.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kenapa tidak tanda tangan yang lain? Natalia Sahetapy, Klemens, kemudian Dormauli? Memang tidak hari atau?

2066.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO (DEMOKRAT)

Tidak hadir, Yang Mulia.

2067.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, Saudara siapa namanya?

2068.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO (DEMOKRAT)

Pangihutan B. Haloho.

2069.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, berarti ini karena sudah Kuasanya, sebaiknya memang tanda tangan juga yang di sini, ya?

2070.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO (DEMOKRAT)

Ya, Yang Mulia.

2071.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, itu saja klarifikasi itu.

2072.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO (DEMOKRAT)

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

2073.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih, Prof.
Sekarang yang terakhir untuk sesi hari pertama ini. Permohonan dari Partai Nasdem. Silakan, Termohon? Siapa yang akan menyampaikan?

2074.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

2075.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pak Arief, tolong miknya dimatikan, Pak Arief, Bawaslu. Ya.

Ya, silakan!

2076.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Baik. Jawaban Termohon untuk permohonan dari Partai Nasdem. Dalam eksepsi, Yang Mulia. Kami langsung ke eksepsi.

Kami berpendapat bahwa perbaikan Pemohon itu bisa dikatakan sebagai permohonan baru yang telah kedaluwarsa. Alasannya karena di dalam Dapil-Dapil Aceh ini. Kebetulan Dapil Aceh ini ada beberapa, Yang Mulia. Dapil Aceh I untuk DPR RI, Dapil Aceh II untuk DPR RI, Dapil Aceh III untuk Pemilu DPRA, dan Dapil Aceh V untuk DPRA juga, dan terakhir Dapil Aceh. DAPIL II untuk DPRK Bireun.

2077.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2078.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Nah, dalam dapil-dapil ini. Permohonan awal dari Pemohon, angkanya itu berubah atau tidak sama dengan perbaikannya. Sehingga menurut kami, perubahan itu tentunya bersifat substansi, sehingga mengubah hasil, Yang Mulia. Dengan demikian, seluruh perubahan angka pada dapil-dapil yang kami sebutkan, mohon dianggap sebagai perubahan yang sudah kedaluwarsa.

2079.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kalau dari sisi tenggang waktunya, kedaluwarsa enggak itu? Menurut Anda tenggang perubahan perbaikannya kapan bisa di (...)

2080.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

31 Mei, Yang Mulia.

2081.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jamnya?

2082.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Pukul 10.25 WIB. Berkaitan dengan angka, Yang Mulia. Yang kami persoalkan, angkanya saja. Jadi karena mengubah begitu.

2083.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Perubahan angkanya?

2084.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Ya.

2085.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi mengubah angka dianggap Saudara ini ... anu ... baru gitu, ya?

2086.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Menurut kami demikian, Yang Mulia.

2087.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke, terus?
Ini di dapil berapa ini, seluruhnya?

2088.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Seluruh Dapil, Yang Mulia.

2089.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Seluruh Dapil? Tapi sebetulnya Pemohon ini mempersoalkan dapil mana?

2090.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Dapilnya yang dipersoalkan oleh Pemohon. Yang pertama, Dapil I Aceh ... Dapil Aceh I untuk Pemilu DPR RI.

2091.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2092.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Kemudian Dapil Aceh II, juga untuk Pemilu DPR RI.

2093.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2094.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Kemudian Dapil Aceh III untuk Pemilu DPRA Aceh.

2095.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2096.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Kemudian, Dapil V untuk Pemilu DPRA Aceh, dan terakhir Dapil II untuk Anggota DPRK Bireun.

2097.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

2098.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Kemudian, selain itu (...)

2099.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ini menurut Saudara, angkanya semuanya berubah, ya?

2100.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Berubah, Yang Mulia, berubah.

2101.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Sekarang satu persatu kita lihat. Di pokok permohonannya gimana? Pokok permohonannya.

2102.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Jadi pertama, permohonan awal Pemohon mendalilkan suara yang benar untuk Partai Nasdem menurut Pemohon adalah 90.445. Itu untuk Dapil Aceh I DPR RI. Kemudian, dalam perbaikannya berubah menjadi 91.512 suara, Yang Mulia.

2103.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2104.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Kemudian untuk yang Partai ... Partai PKB, menurut Pemohon di permohonan awalnya itu 90.825 suara. Kemudian pada perubahan berikutnya itu 89.708 suara.

2105.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2106.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Begitu pun juga untuk Dapil Aceh II (...)

2107.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2108.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Yang awalnya, Pemohon mengklaim memperoleh suara untuk Partai Nasdem itu sebesar 89.898 suara.

2109.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2110.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Sedangkan dalam perbaikannya mengubah menjadi 88.219 suara.

2111.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2112.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Sehingga seolah-olah menyusut perolehan dari Pemohon tersebut, Yang Mulia.

2113.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2114.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Untuk Dapil III DPRA.

2115.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2116.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Juga ada perubahan. Dalam permohonan awal Pemohon mendalilkan suara Nasdem itu mendapat suara sebesar 13.101 suara. Kemudian dalam perubahannya menjadi 13.136 suara, Yang Mulia.

2117.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2118.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Sementara untuk Partai Nanggroe Aceh ... Partai Nanggroe Aceh menurut Pemohon itu awalnya 38.442 suara. Kemudian mengubah menjadi 37.731 suara.

2119.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

2120.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Untuk Dapil V (...)

2121.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

DPRA?

2122.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

DPRA, Yang Mulia.
Pada awalnya Pemohon mendalilkan mendapat suara untuk Partai Nasdem sebesar 18.748 suara.

2123.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2124.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Kemudian, dalam perbaikannya berubah menjadi 18.726 suara.

2125.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2126.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Kemudian, untuk Partai Aceh. Awalnya disebutkan memperoleh sebesar 128.894 suara. Kemudian, diubah menjadi 126.338 suara, Yang Mulia.

2127.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2128.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Kemudian untuk DPRK Bireuen.

2129.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

He eh.

2130.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Menurut Pemohon Partai Nasdem awalnya memperoleh suara 2.437 suara. Kemudian pada perbaikannya dirubah menjadi 2.436 suara.

2131.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Ini yang Anda sampaikan ini sebetulnya hampir sama dengan yang pada waktu eksepsi. Sekarang substansinya, kalau pada waktu itu diubah, kalau menurut Saudara gimana? Yang betul apa ... setelah diubah dia itu betul atau setelah diubah pun tetap salah?

2132.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Oh, sebentar.

2133.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kan? Apa yang disampaikan itu kan pada waktu Anda melakukan eksepsi mengatakan bahwa itu dia mengubah perolehan suara dari permohonan yang pertama ke permohonan kedua. Padahal perubahan itu menurut Saudara tidak bisa dilakukan dengan mengubah angka-angka, berarti itu sama dengan permohonan baru, itu kan sama? Ini tadikan Anda pokok permohonan masih menguraikan mengenai perubahan-perubahan perolehan suara, baik yang diterima di Nasdem maupun yang diterima di Para Pihak Terkait ini.

2134.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Ya.

2135.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tapi sekarang, substansinya setelah diubah itu menurut Anda, setelah diubah pun itu tetap salah atau bagaimana itu?

2136.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Tetep ndak sama, Yang Mulia.

2137.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tetap tidak sesuai dengan apa yang ditentukan Termohon?

2138.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Ya. Tidak sama.

2139.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang betul tetap Termohon yang betul?

2140.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Betul. Jadi tidak sama dengan data kami.

2141.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. ... anu ... apa yang ditentukan Termohon Anda punya tabelnya di situ?

2142.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Untuk tabel ada, Yang Mulia, dalam jawaban.

2143.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tabel berapa itu yang dimasukan di sini semua ini?

2144.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Halaman 1, Yang Mulia.

2145.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Halaman 1.

2146.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Pokok permohonan.

2147.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Di pokok permohonan?

2148.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Pokok permohonan, contohnya itu.

2149.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2150.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Ya. Jadi (...)

2151.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu suara yang benar, ya, tetap yang ditentukan Termohon itu, meskipun punya Termohon ... eh Pemohon diubah, tetap itu salah, ya?

2152.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Salah, Yang Mulia.

2153.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

2154.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Baik.

2155.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Kalau begitu yang semuanya sudah begitu, ya?

2156.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Ya, Yang Mulia.

2157.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sehingga di dalam Petitem, Saudara minta yang benar itu, ya, yang ditentukan oleh Termohon karena tidak ada persoalan apa-apa, gitu?

2158.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Betul.

2159.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

2160.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Kemudian selain itu, Yang Mulia, tadi dari perubahan itu juga ada ternyata penambahan lokus begitu.

2161.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Penambahan lokusnya dimana itu?

2162.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Baik. Berupa TPS-TPS, Yang Mulia. Ini (...)

2163.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, jadi ada penambahan lokus juga?

2164.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Ya. penambahan TPS-TPS begitu, bertambah banyak TPS-nya dibanding sebelum ada perbaikan begitu, Yang Mulia.

2165.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. He eh. Ya, ada lagi dalil atau respons Saudara?

2166.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Untuk eksepsi, cukup, Yang Mulia.

2167.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Cukup, ya?

2168.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Ya.

2169.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pokok permohonan sudahkan tadi berarti?

2170.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Kenapa?

2171.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pokok permohonannya kan sudah juga, kan?

2172.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Belum, Yang Mulia.

2173.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Loh, belum? Loh, tadi saya kira eksepsi semua. Terus yang masuk perubahan-perubahan itu saya sudah minta konfirmasi, meskipun itu diubah pun tetap substansinya yang betul tetap Termohon. Gimana?

2174.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Sebentar.

2175.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, tadi waktu Anda mengatakan eksepsi angkanya berubah-ubah, itu kita sudah tahu persis, tinggal mengecek aja.

2176.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Ya.

2177.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tapi sekarang substansi pokok permohonannya setelah diubah pun bagaimana?

2178.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Ya, setelah diubah ternyata tetap (...)

2179.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tetap (...)

2180.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Tidak sama dengan kami, Yang Mulia.

2181.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, itu tadi kan sudah. Berarti pokok permohonannya sudah dijawab.

2182.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Ya.

2183.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kan?

2184.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Betul.

2185.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, itu ditaruh di tabel berapa, di halaman berapa, buktinya ada apa enggak?

2186.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Oke. Baik, Yang Mulia. Untuk pokok permohonan, yang menjelaskan tentang hasil perolehan suara akhir untuk dapil I DPR RI, sebentar, Yang Mulia, kami ... untuk Partai Nasdem, Yang Mulia, memperoleh 90 (...)

2187.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Anu ... itu di tabel berapa saja?

2188.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Oke, sebentar.

2189.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ini kan untuk Termohon?

2190.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Untuk tabel pertama, Yang Mulia.

2191.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tabel pertama?

2192.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Ya.

2193.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu berkenaan dengan Dapil I?

2194.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Dapil I.

2195.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Suara yang benar menurut Termohon?

2196.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Termohon, Yang Mulia.

2197.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2198.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Baik.

2199.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terus kemudian untuk yang Dapil II di (...)

2200.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Dapil II ada di halaman ... sebentar kami lihat dulu.

2201.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jawabannya enggak ada halamannya. Halamannya bolak-balik?

2202.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Kami memang tidak membuat tabel, Yang Mulia. Untuk yang ... ada yang ada tabelnya, ada yang tidak, begitu.

2203.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Ya, mestinya kalau lebih memudahkan ada tabel.

Nah, kalau begitu ... beginilah. Yang di Dapil I Aceh itu buktinya di mana? Anda mengajukan bukti, enggak? Yang benar menurut Saudara adalah apa yang di (...)

2204.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Ya.

2205.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Rekap Saudara itu. Buktinya T berapa?

2206.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

T-002 Aceh I Nasdem, Yang Mulia.

2207.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. T-002. Terus yang ini berarti perolehan suaranya yang benar itu yang di tabel ini ya ... eh ... di bukti ini, ya?

2208.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Ya. Betul, Yang Mulia.

2209.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terus yang ... anu ... II?

2210.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Dapil II DPR RI ada di bukti T-002 Aceh II, Nasdem, Yang Mulia.

2211.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang tadi itu?

2212.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Aceh I.

2213.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Aceh I?

2214.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Betul. Jadi, perbedaannya di kode Aceh I sama Aceh II.

2215.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

2216.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Kemudian untuk DPRA (...)

2217.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2218.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Itu ada di bukti T-002 Aceh III, Nasdem, Yang Mulia.

2219.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Aceh III, Nasdem. Ya.

2220.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Kemudian, berikutnya T-002 Aceh V, Yang Mulia.

2221.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Aceh V, Nasdem.

2222.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Ya.

2223.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Yang terakhir yang Bireuen itu?

2224.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Sebentar. Untuk Bireuen, ada di ... sebentar, Yang Mulia, kami cek dulu. Ada di T-41 Bireuen II, Yang Mulia, Nasdem.

2225.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

T-41, Bireuen II, Nasdem.

2226.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Demikian, Yang Mulia.

2227.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Ini berarti perolehan suara yang benar itu ada di dalam bukti-bukti ini?

2228.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Betul.

2229.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, Saudara tidak menjawab di dalam jawabannya, tetapi Saudara melampirkan bukti, ya?

2230.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Ya, Yang Mulia.

2231.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

T-42 itu ya? Oke.

Jadi, untuk yang terakhir itu, Saudara tidak ada narasi di dalam jawaban, tapi Saudara memberikan bukti yang disebut tadi, ya?

2232.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Ya.

2233.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Ada lagi?

2234.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Demikian, Yang Mulia. Untuk Petikum mohon dianggap terbaca.

2235.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke, Petitemnya dianggap dibacakan.

2236.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

2237.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima Kasih.
Sekarang untuk Pihak Terkait I, Partai Aceh?

2238.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN (PARTAI ACEH)

Siap, Yang Mulia.

2239.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Partai Aceh ini merespons yang di mana?

2240.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN (PARTAI ACEH)

Partai Aceh ini, Yang Mulia. Ada 2 permohonan Yang Mulia, dengan dapil yang berbeda. Yang pertama adalah Dapil V, meliputi Aceh Utara Kota Lhokseumawe atau DPRA. Selanjutnya, ada 1 lagi untuk DPRK Kabupaten Bireuen meliputi Dapil II, Yang Mulia. Untuk sekarang, kami akan membacakan pokok-pokok keterangan Pihak Terkait (...)

2241.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sebentar, ulangi lagi supaya jelas. Ada 2 respons, ya, terhadap DPRA untuk Aceh V. Itu apa yang disampaikan?

2242.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN (PARTAI ACEH)

Kami akan menyampaikan pokok-pokok permohonan. Yang pertama adalah (...)

2243.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kok, pokok-pokok permohonan? Pokok-pokok keterangan.

2244.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN (PARTAI ACEH)

Pokok-pokok keterangan Pihak Terkait, Yang Mulia.

2245.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sebagai Pihak Terkait. Yang satunya yang mana?

2246.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN (PARTAI ACEH)

Yang pertama dalam eksepsi, Yang Mulia.

2247.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Enggak, sebentar. Yang ... ini satu, yang kedua?

2248.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN (PARTAI ACEH)

Yang kedua, dia juga memberikan kuasa yang berbeda dengan kami, Yang Mulia.

2249.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, kuasanya beda ini?

2250.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN (PARTAI ACEH)

Ada 2 tim, Yang Mulia.

2251.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ada 2 tim. Yang tim 1-nya mau merespons yang mana?

2252.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN (PARTAI ACEH)

Yang satunya akan merespons Bireuen II, Yang Mulia.

2253.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Bireuen II.

2254.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN (PARTAI ACEH)

Untuk DPRK, Yang Mulia.

2255.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Ini, PT ... PA juga, ya?

2256.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN (PARTAI ACEH)

Benar, Yang Mulia.

2257.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang yang mana dulu yang mau disampaikan?

2258.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN (PARTAI ACEH)

Untuk DPRA Dapil V, Yang Mulia.

2259.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

2260.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN (PARTAI ACEH)

Yang pertama adalah Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia, kami anggap dibacakan.

2261.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2262.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN (PARTAI ACEH)

Juga kami mengajukan eksepsi terhadap persoalan ini terkait tabel halaman 136 sampai dengan 186 terhadap permohonan Pemohon.

2263.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2264.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN (PARTAI ACEH)

Karena memang ada hal-hal yang didalilkan tidak sesuai dengan PMK Nomor 5 Tahun 2018.

2265.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2266.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN (PARTAI ACEH)

Karena tidak dihubungkan antara perolehan suara yang didapatkan oleh Pemohon dengan perolehan kursi sebagaimana diatur oleh PMK, Yang Mulia.

2267.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2268.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN (PARTAI ACEH)

Selanjutnya kami anggap dibacakan. Tenggang waktu, Yang Mulia. Permohonan Pemohon yang kami beri keterangan ini, Yang Mulia adalah permohonan perbaikan pada hari Jumat, tanggal 31 ... 31 Mei 2019, pukul 10.25 WIB, Yang Mulia. Jadi, ada kelebihan waktu di situ, Yang Mulia, 25 menit dari 3x24 jam, Yang Mulia. Kami anggap (...)

2269.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Waktu yang semestinya adalah 31 Mei pukul 10.00 WIB, ya?

2270.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN (PARTAI ACEH)

Pukul 10.25 WIB, Yang Mulia.

2271.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ini dia pukul 10.25 WIB.

2272.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN (PARTAI ACEH)

Ya, Yang Mulia. Benar, Yang Mulia.

2273.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kan?

2274.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN (PARTAI ACEH)

Benar, Yang Mulia.

2275.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Waktu batas maksimal perbaikan adalah 31 Mei pukul 10.00 WIB.

2276.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN (PARTAI ACEH)

Benar, Yang Mulia.

2277.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tapi, ini dia perbaikannya pukul 10.25 WIB.

2278.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN (PARTAI ACEH)

Benar, Yang Mulia.

2279.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ada melonjak dari ketentuan 25 menit.

2280.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN (PARTAI ACEH)

Benar, Yang Mulia.

2281.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terus, apa lagi?

2282.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN (PARTAI ACEH)

Selanjutnya, Yang Mulia. Kami mengajukan juga tentang permohonan Pemohon tidak jelas, Yang Mulia.

2283.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2284.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN (PARTAI ACEH)

Sebagaimana kami mendapatkan permohonan Pemohon di dalam web Mahkamah Konstitusi, itu ada beberapa halaman itu tidak tercantumkan, Yang Mulia.

2285.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2286.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN (PARTAI ACEH)

Contohnya halaman 172, 174, 177, 178, 182, 189, dan 190, Yang Mulia.

2287.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2288.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN (PARTAI ACEH)

Jadi, kami tidak bisa menjawab ini karena memang permohonannya tidak lengkap, Yang Mulia, dan kami anggap ini adalah guga ... permohonan tidak jelas, Yang Mulia.

2289.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2290.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN (PARTAI ACEH)

Selanjutnya, Yang Mulia. Pada permohonan Pemohon, ya, halaman 168 angka 9, Yang Mulia, juga kabur, Yang Mulia. Karena tidak ... selanjutnya kami tidak menemukan tabel-tabel, ya, yang kemudian perolehan suara perselisihannya adalah 4.415, Yang Mulia. Jadi, ada 2 dalil yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, Yang Mulia.

2291.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2292.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN (PARTAI ACEH)

Dalam pokok permohonan, Yang Mulia, ya. Pemohon, ya, mendalilkan lokus permohonannya di 28 ... 24 kecamatan, Yang Mulia, di 226 desa, Yang Mulia.

2293.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2294.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN (PARTAI ACEH)

Dan kami, Yang Mulia, menolak dengan tegas seluruh permohonan ini, ya, dan kami anggap permohonan Pemohon terlalu mengada-ngada tentang adanya penambahan suara Pihak Terkait yang dilakukan oleh Termohon sebanyak 6.015 suara, Yang Mulia.

2295.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2296.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN (PARTAI ACEH)

Dari perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 132.353 suara, di Dapil Aceh V DPRA, Yang Mulia.

2297.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

2298.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN (PARTAI ACEH)

Namun, Pemohon hanya dapat menguraikan, Yang Mulia. Sebenarnya juga, ada kesalahan permohonan Pemohon, Yang Mulia, mendalilkan ada perselisihan suara sekitar 6.515. Tetapi, di dalam rasionalisasi permohonan Pemohon hanya dapat merasionalisasikan, Yang Mulia, 4.415 dan itu salah pula, Yang Mulia.

2299.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2300.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN (PARTAI ACEH)

Selanjutnya, Yang Mulia. Kami akan membacakan kecamatan-kecamatan, Yang Mulia. Untuk Kecamatan Baktiya, permo ... permohonan Pemohon mendalilkan Termohon menambahkan suara ke Pihak Terkait 246 suara dan ini salah, Yang Mulia.

2301.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2302.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN (PARTAI ACEH)

Bahkan, Pemohon menambahkan suara Pihak Terkait ke tabel permohonan Pemohon, Yang Mulia, dan kami menolak permohonan Kecamatan Baktiya, Yang Mulia.

Dan selanjutnya, untuk tabel-tabel kami anggap dibacakan, Yang Mulia, sampai dengan halaman 10. Selanjutnya, Kecamatan Baktiya Barat, Yang Mulia.

2303.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2304.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN (PARTAI ACEH)

Kami juga menolaknya, Yang Mulia. Pemohon mendalilkan ada penambahan suara oleh Termohon.

2305.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kalau itu bisa (...)

2306.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN (PARTAI ACEH)

Untuk Pihak Terkait 21 suara, Yang Mulia. Di halaman 10 (...)

2307.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Bisa disingkat?

2308.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN (PARTAI ACEH)

Kami juga menolaknya.

2309.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Semua dalil mengenai penambahan di TPS-TPS atau di tingkat PPK itu semuanya tidak benar, ya?

2310.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN (PARTAI ACEH)

Benar, Yang Mulia. Kami tolak dan itu terlalu mengada-ngada, Yang Mulia.

2311.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2312.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN (PARTAI ACEH)

Selanjutnya, Yang Mulia. Kami bersandarkan pada Form DAA-1.

2313.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2314.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN (PARTAI ACEH)

Tingkat desa dengan telah merekapitulasi sebanyak ... sebanyak 24 kecamatan yang pesebarannya 226 desa, Yang Mulia.

2315.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2316.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN (PARTAI ACEH)

Berdasarkan perhitungan Sainte Lague Partai Aceh atau Terkait mendapatkan perolehan suara sebesar 1.320 ... 132.353 suara, Yang Mulia.

2317.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2318.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN (PARTAI ACEH)

Berdasarkan perhitungan Sainte Lague, Partai Aceh atau Pihak Terkait mendapatkan perolehan kursi yang ke-4, Yang Mulia.

2319.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2320.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN (PARTAI ACEH)

Jadi kemud ... sedangkan Partai Nasdem atau Pemohon, Yang Mulia, mendapatkan suara 18.637 dan tidak mendapatkan kursi di dapil tersebut, Yang Mulia.

2321.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

2322.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN (PARTAI ACEH)

Saya kira permohonan kami dan sekaligus pokok permohonan dan ... maaf.

2323.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Keterangan.

2324.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN (PARTAI ACEH)

Keterangan Pihak Terkait yang kami sampaikan tersebut. Selanjutnya, Petitem kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

2325.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2326.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN (PARTAI ACEH)

Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

2327.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb.

Sekarang satunya yang untuk ... apa ... DPRK Bireuen.

2328.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAYUTI ABUBAKAR (PARTAI ACEH)

Terima kasih, Yang Mulia.

Ini untuk permohonan dari 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 untuk DPRK Dapil Bireuen II.

2329.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2330.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAYUTI ABUBAKAR (PARTAI ACEH)

Jadi, sebelumnya ingin saya sampaikan, Yang Mulia. Bahwa untuk Dapil Bireuen II ini, ada Pemohon lain juga yang (...)

... yang mengajukan yaitu dari Partai Bulan Bintang, dari Partai Bulan Bintang di Dapil Bireuen II ini ada 10 kursi, Yang Mulia, 10 kursi. Jadi, untuk Pihak Terkait dalam hal ini adalah kursi yang ketiga, kursi yang ketiga. Dari perolehan suara, Partai Nasdem ini dari 10 kursi ini, Partai Nasdem menempati urutan Nomor 12, sedangkan yang Nomor 11 ini adalah dari Partai Bulan Bintang. Ini cuma sebagai gambaran saja, Yang Mulia.

2331.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2332.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAYUTI ABUBAKAR (PARTAI ACEH)

Jadi, terkait dalil, Pemohon untuk bagian eksepsi dianggap dibacakan.

2333.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2334.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAYUTI ABUBAKAR (PARTAI ACEH)

Dalam pokok permohonan, kami telah merinci secara detail terhadap dalil-dalil penmo ... permohonan.

Ada dua persoalan, yang pertama adalah persoalan pengurangan suara terhadap Partai Nasdem. Yang pertama untuk Kecamatan Jangka, kedua untuk Kecamatan Peusangan. Ada beberapa TPS, ini sudah kita lampirkan bukti. Ternyata setelah kami teliti, kami bandingkan antara C-1 dan DAA-1, ternyata dalil yang dimohonkan oleh Pemohon itu tidak benar. Yang kedua adalah persoalan penambahan suara terhadap Pihak Terkait, dalam ini Partai Aceh, itu juga tidak benar. Kami telah melampirkan bukti-bukti, baik C-1, DAA-1 dan DA-1 dimana lampiran bukti kami dari PT-1 hingga PT ... PT-48D, Yang Mulia.

2335.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

48D?

2336.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAYUTI ABUBAKAR (PARTAI ACEH)

Ya. Enggak, 50 ... 50B, Yang Mulia. Jadi, setiap TPS yang didalilkan oleh Pemohon (...)

2337.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

50B yang betul?

2338.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAYUTI ABUBAKAR (PARTAI ACEH)

50B, Yang Mulia.

2339.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Buktinya, ya.

2340.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAYUTI ABUBAKAR (PARTAI ACEH)

Buktinya. Setiap dalil yang didalilkan Pemohon dari TPS-TPS yang telah disebutkan, kita sudah periksa semua, kita teliti, kita bandingkan C-1 dan DA-1 ternyata memang dalil dari Pemohon itu tidak benar, Yang Mulia.

2341.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2342.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAYUTI ABUBAKAR (PARTAI ACEH)

Saya rasa setelah ... untuk Petikum, cuma kita minta men ... penetapan perolehan suara sah untuk Pemohon adalah 2.426 suara dan

untuk Partai Aceh Pihak Terkait 12.266 suara. Saya rasa cukup demikian,
Yang Mulia.

2343.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2344.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAYUTI ABUBAKAR (PARTAI ACEH)

Terima kasih.

2345.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih.

Sekarang untuk Partai Nanggroe Aceh. Ya, Partai Nanggroe Aceh?

2346.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAYUTI ABUBAKAR (PARTAI ACEH)

Terima kasih, Yang Mulia. Saya sendiri juga dari Partai Nanggroe Aceh.

2347.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ini untuk yang mana ini?

2348.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAYUTI ABUBAKAR (PARTAI ACEH)

Untuk Aceh III DPRA, Yang Mulia.

2349.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, ya. He em.

2350.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAYUTI ABUBAKAR (PARTAI ACEH)

Yang pertama, eksepsi, Yang Mulia.

2351.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, eksepsi.

2352.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAYUTI ABUBAKAR (PARTAI ACEH)

Eksepsi sebenarnya hampir bersama dengan eksepsi Pihak Termohon dan juga Pihak Terkait dari Partai Aceh tadi. Mungkin tidak disebutkan (...)

2353.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Karena ... karena ada perubahan-perubahan itu, kan.

2354.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAYUTI ABUBAKAR (PARTAI ACEH)

Perubahan-perubahan.

2355.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terus?

2356.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAYUTI ABUBAKAR (PARTAI ACEH)

Terus, untuk pokok perkara, ada juga dua persoalan sama seperti tadi, yaitu dalil Pemohon mengenai pengurangan suara Pemohon. Setelah kita teliti dan kita cermati, ternyata berdasarkan C-1 ... Bukti C-1 dan DAA-1, DA-1 dan DB, ternyata dalil Pemohon itu tidak benar. Jadi, apa yang telah ditetapkan oleh Termohon itu (...)

2357.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Termohon.

2358.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAYUTI ABUBAKAR (PARTAI ACEH)

Sudah benar, Yang Mulia.

2359.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itulah yang betul.

2360.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAYUTI ABUBAKAR (PARTAI ACEH)

Itulah yang betul. Yang kedua, mengenai penambahan suara Pihak Terkait yang didalilkan Pemohon juga tidak benar, Yang Mulia. Di sini kita telah melampirkan (...)

2361.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Bukti berapa itu?

2362.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAYUTI ABUBAKAR (PARTAI ACEH)

211 bukti, Yang Mulia.

2363.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Buktinya berapa, PT berapa itu?

2364.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAYUTI ABUBAKAR (PARTAI ACEH)

PT-1 sampai ... sampai PT-98C, Yang Mulia.

2365.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

98C.

2366.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAYUTI ABUBAKAR (PARTAI ACEH)

He eh. Terus sebagai tambahan juga, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan.

2367.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Tidak mengajukan keberatan.

2368.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAYUTI ABUBAKAR (PARTAI ACEH)

Di setiap jenjang rekapitulasi suara. Baik jenjang kecamatan ataupun kabupaten, Yang Mulia.

2369.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2370.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAYUTI ABUBAKAR (PARTAI ACEH)

Saya rasa cukup sekian, Yang Mulia.

2371.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Cukup, ya.

2372.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAYUTI ABUBAKAR (PARTAI ACEH)

Terima kasih.

2373.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang dari PKB.

2374.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN (PKB)

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb.

2375.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2376.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN (PKB)

Untuk eksepsi, Yang Mulia. Karena secara prinsip sama dengan Termohon dan Pihak Terkait yang lainnya, mohon dianggap dibacakan.

Nah, untuk pokok permohonan, Yang Mulia, untuk gugatan Nasdem untuk Dapil I Aceh DPR RI ini, secara prinsip ada tiga permohonan ... apa ... tiga dalil yang disampaikan. Yang pertama itu mengenai adanya perbedaan input data dari DB ke DC. Akan tetapi, Yang Mulia, setelah kita periksa dengan seksama sebagaimana bukti yang kita lampirkan dalam keterangan Pihak Terkait. Bukti PT-1 dan bukti PT-2 serta berikutnya berupa rekapan dari DC, DB, dan DA, ternyata tidak ada dalil yang disampaikan oleh Pihak Pemohon tersebut. Artinya, antara DB dengan DC yang disampaikan oleh Termohon itu sama, Yang Mulia.

2377.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2378.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN (PKB)

Itu untuk permasalahan yang pertama. Yang kedua, Pemohon mendalilkan mengenai masalah adanya pengurangan suara untuk Pemohon. Kami juga sudah menyandingkan data antara C-1, DAA, dan DA yang ada pada kami dan pada prinsipnya tidak ada permasalahan yang disampaikan oleh Pemohon, sehingga dalil-dalil Pemohon atas itu kami tolak sebagaimana yang tercantum di dalam halaman 14 untuk Kabupaten Aceh Besar, halaman 15 untuk Kabupaten Aceh Tenggara, halaman 17 Kabupaten Simeulue, halaman 19 untuk Kabupaten Aceh Singkil, halaman 23 untuk Kabupaten Gayo Lues, dan halaman 25 untuk Kabupaten Aceh Selatan.

Berikutnya, Yang Mulia, permasalahan yang kedua yang disampaikan oleh Pemohon adalah mengenai penggelembungan suara (...)

2379.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ini yang ketiga berarti?

2380.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN (PKB)

Gimana, Yang Mulia?

2381.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang ketiga atau masih yang kedua?

2382.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN (PKB)

Yang ketiga, Yang Mulia, yang disampaikan oleh Pemohon dalam dalilnya adalah terkait penggelembungan suara Pihak Terkait, seolah-olah begitu. Akan ... di ... yang terjadi di 5 kabupaten, Yang Mulia, dan kami juga sudah sampaikan bantahan kami untuk Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana Bukti PT-24 di halaman 33, Yang Mulia. Kami anggap dibacakan.

2383.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2384.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN (PKB)

Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Selatan. Nah, dari itu semua, kami membantah semua dalil yang ada disampaikan oleh Pemohon karena itu tidak benar, Yang Mulia.

2385.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dapil Aceh I, ya?

2386.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN (PKB)

Ya. Untuk Petitem, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

2387.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

2388.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN (PKB)

Sekian, terima kasih.

2389.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, anu, ya, dijawab melalui 3 persoalan ini, ya?
Sekarang yang ... masih ada Partai PKB Provinsi Aceh? Enggak ada, kan? Ada? PKB Provinsi Aceh, itu ada enggak? Pihak Terkait? Di sini kok ada (...)

2390.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN (PKB)

Tidak ada, Yang Mulia.

2391.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada, ya? Ini tadi, yang PKB ini tadi, ya?

2392.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN (PKB)

Tidak ada, Yang Mulia.

2393.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, berarti terakhir sekarang Partai Golkar. Mempersoalkan yang Dapil Aceh II berarti? Ya, betul?

2394.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PARTOGI MANURUNG (GOLKAR)

Terima kasih, Yang Mulia.
Dalam hal ini, permohonan sebagai Pihak Terkait Dapil Aceh II.

2395.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2396.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PARTOGI MANURUNG (GOLKAR)

Dalam eksepsi, saya rasa dianggap dibacakan saja.

2397.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2398.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PARTOGI MANURUNG (GOLKAR)

Masuk dalam pokok permohonan.

Bahwa dalil Pemohon yang mengaitkan perolehan suara Pihak Terkait dengan angka-angka versi Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada.

Bahwa berdasarkan rekapitulasi Model DD1-DPR.RI Komisi Pemilihan Umum menetapkan jumlah perolehan suara sah partai politik untuk Dapil Aceh II. Antara lain, Partai Golkar sebanyak 91.787 suara, sedangkan Partai Nasional Demokrat atau Nasdem sebanyak 86.564 suara.

2399.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

86.000?

2400.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PARTOGI MANURUNG (GOLKAR)

86.564 suara.

2401.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

86.564?

2402.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PARTOGI MANURUNG (GOLKAR)

Ya, Yang Mulia.

2403.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2404.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PARTOGI MANURUNG (GOLKAR)

Bahwa berdasarkan penetapan perolehan suara sah partai politik tersebut, maka perolehan suara Pihak Terkait untuk Dapil Aceh II adalah sebanyak 91.787 suara.

2405.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2406.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PARTOGI MANURUNG (GOLKAR)

Maka selisih perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah 5.223, bukan 4.587 sebagaimana dalil Pemohon.

2407.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2408.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PARTOGI MANURUNG (GOLKAR)

Bahwa untuk membuktikan sisa perolehan suara Pihak Terkait di atas, berikut ini Pihak Terkait menguraikan perolehan suara sah yang benar untuk seluruh partai politik di dapil menurut Pihak Terkait yang dikuatkan dengan Formulir Model DB1-DPRD kabupaten/kota sebagai berikut.

2409.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu ada tabelnya, ya?

2410.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PARTOGI MANURUNG (GOLKAR)

Ya, dianggap dibacakan saja, Yang Mulia.

2411.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dianggap dibacakan. Ini sama dengan tabelnya ... anu ... ya, punyanya Termohon tadi?

2412.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PARTOGI MANURUNG (GOLKAR)

Ya, sama.

2413.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sama, ya? He eh. Ya, terus? Itu urutan Nomor 1 perolehan suaranya, partai apa berarti yang di tabel Anda?

2414.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PARTOGI MANURUNG (GOLKAR)

Gerindra, Yang Mulia.

2415.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Gerindra Nomor 1. Nomor 2? Atau kalau enggak Golkar nomor berapa ... urut berapa perolehan suaranya?

2416.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PARTOGI MANURUNG (GOLKAR)

Nomor 6, Yang Mulia.

2417.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dengan 91.787 itu?

2418.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PARTOGI MANURUNG (GOLKAR)

Nomor 6.

2419.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terus Nasdem? 86.564, nomor urut berapa?

2420.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PARTOGI MANURUNG (GOLKAR)

7, Yang Mulia.

2421.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nomor 7, baik. Ya, itu berarti tabelnya seluruhnya sudah dibacakan, ya?

2422.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PARTOGI MANURUNG (GOLKAR)

Ya, betul.

2423.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, sekarang apa lagi yang akan disampaikan?

2424.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PARTOGI MANURUNG (GOLKAR)

Sudah, itu saja, Yang Mulia.

2425.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Petitumnya berarti suara yang benar menurut tabel ini untuk perolehan suara seluruh partai?

2426.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PARTOGI MANURUNG (GOLKAR)

Ya.

2427.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Ya, ada lagi?

2428.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PARTOGI MANURUNG (GOLKAR)

Sudah, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

2429.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Cukup.
Sekarang dari Bawaslu? Ada Bawaslu?

2430.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Terima kasih, Yang Mulia.

2431.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Bawaslu masih ada sampai pukul 05.00 pagi waktunya, kalau mau. Maksudnya 05.00 pagi itu 5 menit saja, jangan kebanyakan.

2432.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Baik.

2433.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Silakan, Bawaslu!

2434.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Terima kasih.
Untuk Dapil Aceh I DPR RI. Ada beberapa kabupaten yang disebutkan di dalam pokok permohonan.

2435.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

He eh.

2436.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Kita menyajikan sesuai dengan penyebutannya, termasuk kecamatan dan TPS-TPSnya.

2437.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya?

2438.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Untuk Kabupaten Aceh Besar yang terhadap dalil pengurangan suara Partai Nasdem.

2439.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya?

2440.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Itu di Desa Sibreh Keumudee, sebenarnya yang terjadi adalah koreksi. Ini mungkin dalil yang disampaikan C-1 itu adalah dalil suara C-1 yang awal.

2441.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pak, suaranya agak gede bisa enggak, Pak? Nanti kita ngantuk semua lho, Pak.

2442.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Baik.

2443.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dekat mik kalau bisa, dekat mik. Kayak suara saya nih, Bapak.

2444.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Oh, ya.

2445.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Halaman berapa ini halamannya, Pak?

2446.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Halaman 36, di halaman 36.

2447.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Memang suaranya kecil kok.

2448.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Halaman ... halaman 18, maaf. Kenapa? Halaman 13, di keterangan tertulis di halaman 13. Saya baca summary.

Itu untuk Aceh Besar di Desa Sibreh Keumudee perolehan suara C-1 DPA atas nama ... Nomor Urut 1, itu tertulis 1 suara, akan tetapi dicoret menjadi 0 suara. Sedangkan perolehan C1-DPR Aceh atas nama Desi Fitriani, sebanyak 1 suara. Kemudian terjadi kesalahan penjumlahan suara Partai, yaitu tertulis 21 seharusnya adalah 1 suara. Jadi, untuk Aceh Besar, ini adalah ... bisa kami sampaikan adalah koreksi di tingkat rekap di tingkat kecamatan.

Kemudian, untuk Aceh Tenggara. Di Aceh Tenggara yang disebutkan di Kecamatan Darul Hasanah, Kecamatan Ketambe, Kecamatan Babul Makmur, Kecamatan Lawe Sumur (...)

2449.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Buktinya yang tadi, Pak. Yang koreksi di rekap kecamatan itu buktinya yang PK-2.6.12 itu, ya?

2450.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Ya.

2451.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Untuk yang Aceh Besar, ya?

2452.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Ya, Untuk Aceh Besar.

2453.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oke. Ya, lanjut!

2454.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Kemudian, untuk Aceh Tenggara.

Untuk Aceh Tenggara, kita memasukkan terhadap dalil Pemohon yang mengatakan penambahan suara untuk Partai PKB di beberapa

kecamatan yang disebutkan. Kita menyebutkan perolehan suara Partai PKB untuk di setiap ... di setiap kecamatan yang disebutkan berdasarkan TPS-TPS yang disebutkan. Begitu juga Kecamatan ... Kecamatan Babussalam. Ini insya Allah lengkap, berdasarkan kecamatan dan TPS-nya dan data DAA-1 yang dimiliki oleh Panwas. Saya pikir dianggap sudah dibacakan, Kalau dibacakan sampai besok nih, Pak.

2455.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2456.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Untuk ... demikian juga terhadap (...)

2457.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Enggak, nanti begini, Pak Nyak Arief. Itu semua ada di dalam keterangannya, yang spesifik saja yang dibacakan apa? Yang spesifik ada persoalan di situ?

2458.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Yang ... yang kami sampaikan spesifik itu, sebenarnya di dalam rekap berjenjang itu banyak terjadi perubahan-perubahan.

2459.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Itu koreksi ... karena dilakukan koreksi, kan?

2460.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Ya.

2461.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi memang itu biasa, mulai ... apa namanya ... dalam perhitungan atau penghitungan suara, mulai dari tingkat TPS sampai ke rekap tingkat yang lebih di atasnya, memang selalu ada koreksi-koreksi, penyesuaian-penyesuaian.

2462.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Ya.

2463.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, itu kan memang biasa karena untuk menyesuaikan. Nah, sekarang yang spesifik. Terjadi apa begitu ada, enggak? Nanti kalau yang lain itu kita bisa kita baca nanti.

2464.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Tidak ada.

2465.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Enggak ada, ya. Misalnya, itu di situ ada yang protes karena memang tidak ... apa ... rekapnya enggak bener atau apa, enggak ada?

2466.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Tidak ada, Yang Mulia.

2467.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Semua koreksi untuk kepentingan perbaikan-perbaikan, kan?

2468.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Benar, Yang Mulia.

2469.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Karena kalau di situ kan enggak mungkin itu. Tapi ini di dalam rekap yang sudah dilakukan secara berjenjang pasti ada koreksi penyesuaian-penyesuaian yang kemudian mendapat persetujuan bersama, kan gitu, kan?

2470.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Benar, Yang Mulia.

2471.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Enggak ada yang spesifik lain? Ada protes, kemudian harus dilakukan rekapitulasi ulang atau harus dilakukan ... apa ... itu enggak ada?

2472.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Tidak ada, Yang Mulia.

2473.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Kalau begitu, kan intinya kan begitu Prof. Ya yang di ...
anukan. Baik, ada lagi yang lain, Pak?

2474.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Sudah dijawab, Yang Mulia. Tidak ada lagi.

2475.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada, ya?

2476.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Ya.

2477.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ternyata kecil tapi tegas sekali, ya? Sama-sama namanya aja kok
galak sekali, sih? Baik, Pak Nyak Arief. Terima kasih.

Berarti sudah selesai? Cuma ini, ya? Ini ada ... anu ... ada
permintaan, Pemohon itu dalam perkara ini ... Perkara Nomor 189-05-
01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, sudah ada menyampaikan alat bukti,
tapi kelewat waktunya sudah. Setelah bukti diserahkan pada persidangan
hari Selasa, melewati batas waktu untuk menyampaikan alat bukti. Ini
Pemohon, ya, jadi alat bukti itu tidak dapat diterima.

Terus kemudian Pihak Terkait Dapil Bireuen II, Dapil Aceh II,
belum menyerahkan softcopy-nya, ya, perbaikannya. Keterangan daftar
bukti dan softcopy daftar alat bukti, ya, ini softcopy-nya nanti diminta.

Terus kemudian, Bawaslu juga belum menyerahkan softcopy
keterangan Bawaslu dan daftar alat buktinya. Sudah? Softcopy-nya?

2478.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Sudah, sudah semuanya.

2479.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sudah? Oke.

2480.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01//PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAYUTI ABUBAKAR (PARTAI ACEH)

Mohon izin, Yang Mulia.

2481.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang mana?

2482.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01//PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAYUTI ABUBAKAR (PARTAI ACEH)

Untuk Dapil Bireuen II, Pihak Terkait telah menyerahkan softcopy-nya juga, Yang Mulia.

2483.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sudah?

2484.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01//PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAYUTI ABUBAKAR (PARTAI ACEH)

Flashdisk-nya sudah.

2485.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Diserahkan ke siapa? Untuk yang perbaikan.

2486.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01//PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAYUTI ABUBAKAR (PARTAI ACEH)

Sudah diserahkan.

2487.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Diserhkannya ke siapa? Kepada siapa?

2488.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01//PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAYUTI ABUBAKAR (PARTAI ACEH)

Di bawah, Yang Mulia. Yang sebelum hari Kamis, Yang Mulia. Kamis minggu lalu.

2489.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Nanti dicek kembali, ya.

2490.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 189-05-01//PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAYUTI ABUBAKAR (PARTAI ACEH)

Baik.

2491.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Baik. Silakan, Pak Ketua. Saya kembalikan waktunya. Terima kasih.

2492.KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Ya. Acara selanjutnya, pengesahan alat bukti. Mulai dari Nomor Perkara 248-17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Daerah Aceh. Untuk Termohon, alat buktinya untuk DPRA Dapil Aceh VI, T-001-AcehVI-PDA-248-170-01. Tadi saya langsung sebut ... ini, ya ... angkanya, ya, sampai dengan T-005 Aceh Timur-PDA-248-170-01. Kemudian ada catatan, alat bukti yang sudah ada, hanya sampai T-003-AcehVI-PDA-248-170-01. Sedangkan T-004 dan T-005 tidak ada. Itu untuk Dapil Aceh VI.

Sekarang Dapil Aceh Timur II. Catatan daftar alat bukti, tidak sesuai dengan alat bukti. Jadi nanti hanya menyesuaikan daftar bukti dengan alat bukti, ya, ada ketidak sesuaian. Contoh. Satu, Dalam daftar alat bukti T-002 Aceh Timur-PDA-248-1001, tertulis kumpulan Formulir Model DA1-DPRDK dan DAA1-DPRDK dari Peureulak Barat. Namun dalam alat bukti berisi Formulir DB-KPU, jadi nanti disesuaikan. Dua, dalam daftar alat bukti T-001-Aceh Timur-PDA-248, 17-01 yang diberi tanda adalah daftar bukti, bukan alat bukti. Nah, ini penandaannya keliru, jadi nanti disesuaikan, ya. Untuk Termohon, ya, benar, ya?

2493.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya, kami nanti sesuaikan, Majelis.

2494.KETUA: ANWAR USMAN

Jadi apa yang saya bacakan tadi benar, ya?

2495.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya.

2496.KETUA: ANWAR USMAN

Kemudian juga ada untuk jawaban Termohon ini, terdapat 16 nama Kuasa Hukum, tetapi ada 1 yang belum tandatangan, yaitu atas nama Ahmad S.H. M.H., ya. Nanti dipastikan apakah tetap ikut, atau gimana, ya?

2497.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya, terima kasih.

2498.KETUA: ANWAR USMAN

Untuk alat bukti benar tadi, ya? dengan catatan tadi?

2499.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Kami sudah merasa menyerahkan, tetapi tadi memang ada beberapa hal yang miss, jadi akan kami perbaiki.

2500.KETUA: ANWAR USMAN

Nah, itu dia nanti diselesaikan setelah sidang ini ditutup, ya?

2501.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya, Terima kasih.

2502.KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dinyatakan sah, dengan catatan!

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Pihak Terkait, masih Nomor 248/17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Nanggroe Aceh... eh Partai Daerah Aceh ... Pihak Terkait Partai Nanggroe Aceh. Daftar alat bukti, Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-6. Benar, ya? Pihak Terkait? Ya. Dinyatakan sah!

KETUK PALU 1X

Kemudian Bawaslu, Nomor 248/17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya. Bukti PK-231 sampai dengan PK-2310. Bawaslu belum menyerahkan softfile daftar alat bukti. Nanti diurus sama Panitera, ya. Kemudian catatan lainnya, softcopy keterangan Bawaslu merujuk pada Nomor Perkara 07-08-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, PKS, ya? Benar, ya, dengan catatan, ya?

2503.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Izin, Pimpinan.

2504.KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

2505.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Kebetulan saya membawa akta pengajuan keterangan Bawaslu.

2506.KETUA: ANWAR USMAN

Ya, nanti ... nanti di ... setelah sidang ditutup, ya.

2507.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Maksud saya, di seluruh keterangan di akta ini, semua merujuk kepada Partai PKS. Sementara pokok perkaranya berbeda, tetapi tertulis seperti itu.

2508.KETUA: ANWAR USMAN

Ya, saya hanya bacakan seperti ini. Ya, kan? Benar berarti. Jadi, buktinya tadi benar, ya? PK-231=PK-230. PK-2310. Jadi saya enggak menyebut titik, garis datar dan segala ... langsung sebut angkanya. Benar?

Saya ulangi ya. kalau begitu saya sebut lengkap supaya enggak bingung. PK 2.3-1 sampai dengan PK 2.3-10.

2509.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Oke.

2510.KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sebenarnya sama saja saya sebut angka tadi. Aduh. Dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Ya, berikutnya. Perkara 66-14-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Demokrat, Termohon daftar adalah bukti ... tolong diperhatikan Termohon T-001 Aceh VI Demokrat 66-14-01 sampai dengan T-002 Aceh V Demokrat 66-14-01. Lewati bukti yang telah dilampirkan ada Senin, 15 Juli pukul 08.54.

Kemudian Dapil Aceh V, T-001 Aceh V Demokrat 66-14-01 sampai dengan T-004 Aceh V Demokrat 66-14-01. Dapil III, T-001 Aceh Timur III Demokrat 66-14-01 sampai dengan T-003 Aceh Timur III Demokrat 66-14-01. Dapil DPRK Aceh Singkil III, T-001 Aceh Singkil III Demokrat 66-14-01 sampai dengan T-020 Aceh Singkil III Demokrat 66-14-01. Dapil Aceh Timur IV, T-001 Aceh Timur IV Demokrat 66-14-10 sampai dengan T-003 Aceh Timur IV Demokrat 66-14-01.

Ini ada catatan pada jawaban Termohon halaman 8 jawaban Termohon nomor 5 terdapat dalil yang merujuk pada vide bukti T-004 Kabupaten Aceh Timur V Demokrat 66-10-01. T-005 Kabupaten Aceh Timur V Demokrat 66-14-01. T-006 Kabupaten Aceh Timur V Demokrat 66-14-01. Tidak terdapat alat bukti sebagaimana dalil dimaksud. Karena daftar bukti yang dilampirkan hanya T-001 Aceh Timur III, Demokrat 66-14-01 sampai dengan T-003 Aceh Timur III Demokrat 66-14-01.

Alat bukti yang disebutkan tadi, Termohon, benar ya?

2511.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Betul, Yang Mulia.

2512.KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Jadi ada catatan tadi sesuaikan nanti dengan Panitera. Dinyatakan sah dengan catatan.

KETUK PALU 1X

Kemudian masih Nomor 66-14-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Pihak Terkait Partai Golkar. Daftar alat bukti PTPG 1 sampai dengan PTPG 19. Benar, Golkar?

2513.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 66-14-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERU ANDESKA (GOLKAR)

Benar, Yang Mulia.

2514.KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Masih Perkara Nomor 66-14-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Bawaslu, alat bukti. Bukti PK-24 sampai dengan Bukti PK-23.12. Bukti PK-23.13 sampai dengan PK-210.14. Bawaslu telah menyatakan soft file merujuk pada Perkara 07-08-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, sama dengan catatan tadi. Bukti yang disebutkan ini benar?

Ya. Dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Perkara Nomor 07-08-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Keadilan Sejahtera. Termohon daftar bukti T-001 Aceh Singkil I, PKS 07-08-01 sampai dengan T-021 Aceh Singkil I, PKS 07-08-01. Renvoi oleh Termohon pada 5 Juli 2019 menjadi T-001 Aceh Singkil I PKS 07-08-01 sampai dengan T-020 Aceh Singkil I PKS 07-08-01. Jadi sudah dilampirkan. Kemudian, ada catatan T-022 Aceh Singkil I PKS 07-8-01 sampai dengan T-31 Aceh Singkil I, PKS 07-08-01. Alat bukti tambahan pada Senin, 5 Juli 2019 pukul 08.54 WIB nomor alat bukti melompat, tidak terdapat Nomor Bukti T-021 Aceh Singkil I PKS 07-08-01. Jadi, untuk Termohon nanti disesuaikan, ya. Benar ini, ya? Ya, dinyatakan sah dengan catatan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, perkara ... masih Perkara Nomor 07-08-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Pihak Terkait PDIP. Alat bukti PT-Singkil 01 sampai dengan PT-Singkil 17, benar, PDIP?

2515.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 07-08-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI (PDIP)

Benar, Yang Mulia.

2516.KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Selanjutnya, Perkara 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Aceh, untuk Termohon daftar alat bukti T-001 Aceh IV Partai Aceh 46-15-01 sampai dengan T-021 Aceh IV Partai Aceh 46-15-01 untuk Dapil Aceh IV. Kemudian, T-022 Aceh II Partai Aceh 46-15-01 sampai dengan 028 Aceh II Partai Aceh 46-15-01, untuk Dapil Aceh II. Benar, Termohon? Termohon tadi, ya. Catatan untuk Termohon yang saya baca tadi. Ya, benar? Jangan gangguk, dong. Ya, gitu, ah. Kan ada mik itu.

2517.KUASA HUKUM TERMOHON:

Benar, Yang Mulia.

2518.KETUA: ANWAR USMAN

Nah, gitu kan tercatat itu di Berita Acara. Kalau begini enggak dicatat itu. Dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Yak, masih Perkara Nomor 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Aceh. Pihak Terkait PDIP. Daftar alat bukti untuk Partai Aceh yang Kuasanya Pak Fajri. PT-Aceh IV 0-1 sampai dengan PT-Aceh 4-12. Catatan, daftar dan alat bukti tambahan di persidangan, PT-Aceh IV 13 sampai dengan PT-Aceh 14-25. Benar, PDIP?

2519.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI (PDIP)

Kan 13 sampai 25, Yang Mulia.

2520.KETUA: ANWAR USMAN

Ya, tadi (...)

2521.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI (PDIP)

Ya, benar.

2522.KETUA: ANWAR USMAN

25, kan?

2523.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI (PDIP)

Ya, benar.

2524.KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Selanjutnya, Perkara Nomor 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 untuk Partai Aceh, Pihak Terkait Partai Gerindra. Alat bukti PT-2 DPRA-Prov.4 sampai dengan PT-2 DPRA Prov.9, ada catatan, terdapat kesalahan penulisan nomenklatur yang seharusnya tertulis Kuasa Hukum Pihak Terkait menjadi Tim Kuasa Hukum Pemohon. Wah, ini ada keliru. Nanti diperbaiki. Benar alat buktinya, Partai Gerindra?

2525.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAHRONI (GERINDRA)

Benar, Majelis.

2526.KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian, masih Perkara Nomor 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Aceh. Bawaslu, daftar alat bukti, bukti PK-21 sampai dengan PK-275. Benar, Bawaslu? Bawaslu? Bawaslu?

2527.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Benar, Yang Mulia.

2528.KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Ya, sekarang Perkara Nomor 89-16-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Partai Sira, perseorangan atas nama Said Mustajab, ya. Alat bukti Termohon T-001 Nagang Raya I Sira 89-16-01 sampai dengan T-005 Nagang Raya I Sira 89-16-01. Benar, Termohon?

2529.KUASA HUKUM TERMOHON: ULIN NUHA

Benar, Yang Mulia.

2530.KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Bawaslu, PK-2 15-1 sampai dengan PK-2 15-46. Benar, ya?

2531.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Benar, Yang Mulia.

2532.KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Cuma ada catatan bukti PK-2 15-1 hanya ada Form C-1 TPS 01 dan 02. Sedangkan, di daftar bukti ada angka 3, nanti dicocokkan. Begitu juga untuk buk ... bukti PK-2 15-13, hanya ada Form C-1 TPS 01. Ya, nanti dicocokkan.

Kemudian, Perkara Nomor 185-18-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Nanggroe Aceh. Alat bukti Termohon, T-001 Aceh VI PNA 185-18-01 sampai dengan T-003 Aceh VI PNA 185-18-01. Tambahan tanggal 15 Juli 2019. T-004 Aceh VI PNA 185-18-01 sampai dengan T-008.AcehVI.PNA.185-18-01. Benar, ya, Termohon?

2533.KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF

Benar, Majelis.

2534.KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Pihak Terkait PDA Partai Daerah Aceh PT-01 sampai dengan PT-47, PT-47.1 sampai dengan PT-47.13, PT-48, PT-48.1 sampai dengan PT-48.3, PT-49, PT-49.1 sampai dengan PT-49.3, PT-50, PT-50.1 sampai dengan PT-50.2, PT-51, PT-51.1 sampai dengan PT-51.3, PT-52 dengan catatan PT-46 dan PT-52 belum dimaterai dan leges. Jadi tolong diperhatikan.

Kemudian, Bawaslu PK-23.1 sampai dengan P ... jadi ini dulu, Pihak Terkait PDA dulu, benar itu, ya?

2535.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAYUTI ABUBAKAR (PARTAI ACEH)

Benar, Majelis.

2536.KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian Bawaslu, PK-23.1 sampai dengan PK-23.17 dengan catatan alat bukti PK-23.1, PK-23.2, dan PK-23.4 itu tidak ada. Coba nanti dicocokkan, ya. Benar, ya?

2537.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Benar, Yang Mulia.

2538.KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah dengan catatan.

KETUK PALU 1X

Ya. Selanjutnya, Perkara Nomor 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Persatuan Pembangunan. Bukti Termohon T-001 Kota Sabang I P-3 103-10-01 sampai dengan T-01 Kota Sabang I P-3 103-10-01 tambahan T-013 di persidangan tadi.

Kemudian T-001 Kabupaten Aceh Besar V P-3 103-10-01 sampai dengan T-014 Kabupaten Aceh Besar V P-3 103-10-01. Kemudian T-001 Kabupaten Aceh Tengah II P-3 10-01 sampai dengan T-015 Kabupaten Aceh Tengah II P-3 10-01. Catatan T-02 Sabang tidak ada. Ada 2 nomor T-008 Kabupaten Aceh Tengah II P-3 103-10-01 dengan keterangan C-2 TPS 01/26 Desa Oak dan C-1 TPS 2/27 Desa Oak. Bukti T-003, T-005, T-006, T-007 sampai dengan T-014 Aceh Besar belum dimaterai dan leges. Jadi, itu catatan untuk Termohon, ya, benar?

2539.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Benar, Yang Mulia.

2540.KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dinyatakan sah dengan catatan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait, PBB. PT-1 sampai dengan PT-16 dengan catatan Bukti PT-7 dan PT-9 sampai dengan PT-14, tulisan dan angka tidak terbaca. Nanti tolong dikasih jelas, ya. Benar?

2541.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: (PBB)

Benar, Yang Mulia.

2542.KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait PDIP, PT-AT01, PT-AT02, PT-AT03 sampai dengan PT-AT07.

2543.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IMRAN MAHFUDI (PDIP)

Benar, Yang Mulia.

2544.KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait PNA, PT 0 ... PT-1 sampai dengan PT-3, PT-4A sampai dengan PT-4.1 ... PT-4I bukan 4.1. PT-5A sampai dengan 5C, PT-6 catatan PT-6 dicoret, ditarik oleh Pihak Terkait. Kemudian alat bukti PT-6 ditambahkan kembali pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019, pukul 16.05 WIB namun tidak ada perbaikan daftar alat bukti. Jadi nanti diperbaiki, ya.

2545.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAYUTI ABUBAKAR (PARTAI ACEH)

Mohon izin, Yang Mulia.

2546.KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

2547.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAYUTI ABUBAKAR (PARTAI ACEH)

Untuk PT-6 sudah kita serahkan kembali, Yang Mulia.

2548.KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ini tadi sudah disebut tadi. Aduh sa ... saya ulangi, ya, biar jelas. Coba dengar kalimat saya. Jadi kan, PT-6 itu dicoret atau ditarik oleh Pihak Terkait. Nah, titik, kan. Nah, ternyata alat bukti PT-6 itu ditambahkan kembali. Nah, pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 pukul 16.05 WIB. Namun tidak ada perbaikan daftar alat bukti. Jadi alat bukti enggak diperjelas. Ya, jadi ... tadi belum disahkan, ya? Sudah, ya? Belum, ya? Ya, dinyatakan sah dengan catatan.

KETUK PALU 1X

Belum sempat di itu tadi langsung di itu sih. Kemudian Bawaslu, tolong Bawaslu jangan ... jangan ngelamun ah. Belanda masih jauh, Bawaslu PK-2.21 sampai dengan PK-2.26, PK-26.1 sampai dengan PK-26.5, PK-26.7 sampai dengan PK-26.10, PK-24.12 sampai dengan PK-2418, dengan catatan PK2-26 nama tidak sesuai dengan daftar bukti. Jadi,

nanti disesuaikan, ya? Kemudian PK26-10 dan PK26-12 tidak ada, nanti dikonfirmasi. Benar, ya? Oh.

2549.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Ya, Yang Mulia.

2550.KETUA: ANWAR USMAN

Aduh.

2551.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Lagi dicatat apa yang disampaikan.

2552.KETUA: ANWAR USMAN

Oh, gitu.
Dinyatakan sah dengan catatan

KETUK PALU 1X

Kemudian, Perkara Nomor 176-04-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Golkar. Alat Bukti Termohon T-001.AcehI.Golkar.176.04-01 sampai dengan T-004.AcehI.Golkar.176.04-01. T-005.KotaBandaAcehIII.Golkar.176.04-01 sampai dengan T-011.KotaBandaAcehIII.Golkar176.04-01. Tambahan T-012 sampai dengan T-018. Benar, Termohon?

2553.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Benar, Yang Mulia.

2554.KETUA: ANWAR USMAN

Dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Bawaslu PK2-19.1 sampai dengan PK-19.10 tidak ada catatan, benar?

2555.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Benar, Yang Mulia. Benar, Yang Mulia.

2556.KETUA: ANWAR USMAN

Dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Ya, masih tinggal 2 ... 2 lembar lagi.

Perkara Nomor 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 PBB. Bukti Termohon, Dapil Kabupaten Pidie Jaya III, bukti T-001.Pidie Jaya III.PBB.92.19-01 sampai dengan T-025.PidieJayaIII.PBB.92.19-01. Dapil Kabupaten Bireun II, bukti T-001.Bireuen.PBB.92.19.01 sampai dengan bukti T-004Bireun.PBB.92.19.01 dengan catatan bukti T-002.Bireun.PBB.92.19.01 dan T-013.Bireuen.PBB.92.19.01 tidak ada bukti fisiknya. Nanti dikonfirmasi lagi, ya, setelah sidang ini. Benar, Termohon?

2557.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya, benar, Yang Mulia.

2558.KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah dengan catatan.

KETUK PALU 1X

Kemudian Terkait, ya Pihak Terkait Partai Aceh. PT-1 sampai dengan PT-13, ya? PT-13C? Dengan catatan bukti fisik PT-6B tidak ada. Bukti fisik PT-11A tidak sesuai dengan daftar alat bukti dan bukti fisik PT-11C tidak ada. Nanti habis sidang supaya diselesaikan dengan Panitera.

Ya, Pihak Terkait Partai Aceh, benar?

2559.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAYUTI ABUBAKAR (PARTAI ACEH)

Benar, Yang Mulia.

2560.KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah dengan catatan.

KETUK PALU 1X

Bukti Pihak Terkait Partai Demokrat. PT-1 sampai dengan PT-16, benar?

2561.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PANGIHUTAN B. HALOHO (DEMOKRAT)

Benar, Yang Mulia.

2562.KETUA: ANWAR USMAN

Dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Bukti Bawaslu. PK2-18.1 sampai dengan PK2-11.3 tanpa catatan, benar?

2563.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Ya, Yang Mulia.

2564.KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Ya, lembaran terakhir ini. Wah, sudah pukul 21.00 WIB, ya. Perkara Nomor 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Nasdem. Bukti Termohon DPR RI Dapil Aceh I. T-002 Aceh I Nasdem 189.05.01 dan T-016 Aceh I Nasdem 189.05.01 sampai T-163 Aceh I Nasdem 189.05.01.

DPR RI Dapil Aceh II. T-002 Aceh II Nasdem 189.05.01 dan T-002 Aceh II Nasdem 189.05.01 sampai dengan T-226 Aceh II Nasdem 189.05.01, catatan T-003 Aceh II Nasdem 189.05.01 sampai dengan T-122 Aceh II Nasdem 189.05.01. Bukti fisik tidak sesuai dengan daftar buktinya. Jadi, tinggal menyesuaikan saja nanti untuk Termohon, ya?

Kemudian DPRA Dapil Aceh III. T-001 Aceh III Nasdem 189.05.01 sampai dengan T-002 Aceh III Nasdem 189.05.01 dan T-01A AcehIII Nasdem 189-05-01 sampai dengan T-1, AC-3 Nasdem 189-05-01. DPRD Dapil ... DPRA Dapil Aceh V, T-002 Aceh V Nasdem 189-05-01 dan T-3 Aceh V Nasdem 189-05-01. T-01 Bireuen II Nasdem 189-05-01 sampai dengan T-42 Bireuen II Nasdem 189-05-01. Benar, Termohon? Apa yang saya bacakan tadi?

2565.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK H.

Benar, Yang Mulia.

2566.KETUA: ANWAR USMAN

Ya. dinyatakan sah dengan catatan.

KETUK PALU 1X

Bukti Pihak Terkait, Pihak Terkait DPR RI Dapil Aceh I. PT-1 sampai dengan PT-70 kecuali PT-9, tidak ada fisiknya, tolong diperhatikan. Catatan bukti yang baru saja diserahkan di persidangan bukan bukti yang asli, softcopy daftar bukti juga belum diserahkan. Nah, nanti tolong diselesaikan dengan Panitera setelah selesai sidang.

Kemudian, Pihak Terkait DPR RI, Dapil Aceh II. PTPG-1 sampai dengan PTPG-48. Pihak Terkait DPRA Aceh, Dapil Aceh III. PT-1 sampai dengan PT-98C, kecuali PT-4B, PT-5B, PT-45C tidak ada fisiknya. Nanti tolong diselesaikan. PT-7G fisik tidak sesuai dengan daftar bukti. Nah, ini juga nanti dicocokkan.

Kemudian, Pihak Terkait DPRA Dapil Aceh V. PT sampai dengan PT 271 (...)

2567.KUASA PIHAK TERKAIT: KAMARUDDIN (PARTAI ACEH)

217, Yang Mulia.

2568.KETUA: ANWAR USMAN

Pihak Terkait DPRA Dapil Aceh V. PT -1 sampai PT 217, ya?

2569.KUASA PIHAK TERKAIT: KAMARUDDIN (PARTAI ACEH)

Benar, Yang Mulia.

2570.KETUA: ANWAR USMAN

Nah, masih ada. Pihak Terkait DPRK Dapil Bireuen II, PT-1 sampai dengan PT-50C, kecuali PT-4A, PT-4B, PT-46B, PT-7B, PT-9A, PT-9B, PT-10B, PT-11A, PT-20C, PT-20D, PT-22C , PT-24B, PT-25C, PT-26B, PT-27B, PT-30B, PT-31B, PT-33B, PT-34B PT-35B, PT-40A, PT-40B, PT-41B, PT-42B. Benar, ya? semua yang tadi saya bacakan dengan beberapa catatan, ya?

2571.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAYUTI ABUBAKAR (PARTAI ACEH)

Mohon izin, Yang Mulia.

2572.KETUA: ANWAR USMAN

Ya?

2573.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAYUTI ABUBAKAR (PARTAI ACEH)

Untuk Pihak Terkait Partai Aceh Dapil Bireun II.

2574.KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

2575.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAYUTI ABUBAKAR (PARTAI ACEH)

Untuk daftar bukti sudah kami serahkan semua, ini ada tanda terima tambahan berkas Pihak Terkait sudah lengkap semua, Yang Mulia.

2576.KETUA: ANWAR USMAN

Ya. PT-1 sampai PT-50, kan?

2577.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAYUTI ABUBAKAR (PARTAI ACEH)

Ya, betul, Yang Mulia.

2578.KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Tapi ada catatan tadi, coba nanti dicocokkan lagi, ya?

2579.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAYUTI ABUBAKAR (PARTAI ACEH)

Ya. Tapi menurut kami sih ini sudah lengkap, Yang Mulia.

2580.KETUA: ANWAR USMAN

Sama ada yang tidak sesuai daftar bukti dengan fisiknya tadi, ya?

2581.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAYUTI ABUBAKAR (PARTAI ACEH)

Ya, Yang Mulia.

2582.KETUA: ANWAR USMAN

Ya. disesuaikan lagi, ya?

2583.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAYUTI ABUBAKAR (PARTAI ACEH)

Oke, Yang Mulia.

2584.KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Baik, disahkan dengan catatan.

KETUK PALU 1X

Terakhir, ini bukti untuk Bawaslu. PT ... eh, PK-27 sampai dengan PK-221.28 tanpa ada catatan. Benar?

2585.BAWASLU: NYAK ARIEF FADILAHSYAH

Benar, Yang Mulia.

2586.KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Ya. Alhamdulillah selesai juga.

2587.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAYUTI ABUBAKAR (PARTAI ACEH)

Mohon izin, Yang Mulia?

2588.KETUA: ANWAR USMAN

Ya?

2589.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAYUTI ABUBAKAR (PARTAI ACEH)

Untuk Pihak Terkait Partai Nanggroe Aceh, belum pengesahan, Yang Mulia.

2590.KETUA: ANWAR USMAN

Lho (...)

2591.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAYUTI ABUBAKAR (PARTAI ACEH)

Untuk Dapil Aceh III, Yang Mulia.

2592.KETUA: ANWAR USMAN

Lho, lho, sebentar, belum. Nomor?

2593.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAYUTI ABUBAKAR (PARTAI ACEH)

Perkara Nomor 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Yang Mulia.

2594.KETUA: ANWAR USMAN

Sudah disahkan tadi. Ah, ini. Ah, ini ada catatan ... aduh, sudah, ya?

2595.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAYUTI ABUBAKAR (PARTAI ACEH)

Nanggroe Aceh, Yang Mulia. Dapil Aceh III?

2596.KETUA: ANWAR USMAN

Sudah, sudah di (...)
Sudah ini PP-nya aku catat, nanti bisa diputar lagi ini. Ah, aduh gimana, mau disahkan dua kali? Aduh, sudah, ya?

2597.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAYUTI ABUBAKAR (PARTAI ACEH)

Kalau sudah alhamdulillah, Yang Mulia.

2598.KETUA: ANWAR USMAN

Yalah.

2599.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAYUTI ABUBAKAR (PARTAI ACEH)

Tapi, yang saya dengar tadi Aceh ... Aceh V, Yang Mulia (...)

2600.KETUA: ANWAR USMAN

Sudah ini, Ibu Paniteranya yang itu sudah dan ada ini file-nya nanti (...)

2601.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAYUTI ABUBAKAR (PARTAI ACEH)

Nanti saya ketemu Ibu Panitera saja, Yang Mulia.

2602.KETUA: ANWAR USMAN

Ah, bilang saja mau ketemu Ibu Paniteranya?

Baik. tidak ada lagi, ya? sudah selesai, ya. Nah, ini ada pengumuman. Jadi hasil persidangan ini ada berapa perkara ini? Sekitar 10, ya, kalau tidak salah. Ya, akan dilaporkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Nah, bagaimana kelanjutan perkara ini? Ya, menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan. Apakah berakhir sampai ... nanti tanggal 22 ancar-ancarnya atau akan diteruskan.

Jadi sekali lagi, menunggu pemberitahuan dari Panitera. Sudah jelas, ya? Ya, baik. Kalau tidak ada lagi, maka sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 21.11 WIB

Jakarta, 15 Juli 2019
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.